



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN

TAHUN 2023

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang - Banten

Telp. (0254) 250002, Fakx. (0254) 250001

Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id

Serang - 42126

VISI

MEWUJUDKAN PENGADILAN
TINGGI BANTEN YANG AGUNG

MISI

- MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN
TINGGI BANTEN
- MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG
BERKEADILAN KEPADA PARA PENCARI
KEADILAN PADA PENGADILAN TINGGI
BANTEN
- MENINGKATKAN KUALITAS
KEPEMIMPINAN PENGADILAN TINGGI
BANTEN
- MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGADILAN TINGGI
BANTEN

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2023



Penghargaan Kategori Satker
UAPPA -Sedang



Penghargaan dari Komisi
Informasi Provinsi Banten
dengan Kategori
Badan Publik Menuju Informatif

Yang diterima pada tanggal 16
November 2023



Penghargaan Atas Partisipasi dan
Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah tahun 2023
Forkompinda Provinsi Banten

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banten pada tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020-2024. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang terdiri 2 (dua) Sasaran. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun ada satu indikator dibawah target yang ditetapkan tetapi secara rata-rata keseluruhan capaian mencapai 100%, capaian ini dikatakan BERHASIL. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten, masyarakat dan stakeholder yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Banten di masa mendatang.



Serang, 26 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Banten,

Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.



PENGADILAN TINGGI BANTEN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Banten untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 26 Februari 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja,



Achmad Rivai, S.H., M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2023 capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, dilihat dari 2 (dua) sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian 100%, yaitu :

1. Untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” dengan capaian sebesar 100%;

2. Untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dengan capaian sebesar 100%.

Dari 2 (dua) Sasaran Strategis terkait core bussines tersebut terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian per indikator akan dituangkan dalam tabel dibawah

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%	49%	96%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	93,93	104%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata – rata capaian kinerja pada sasaran Strategis 2					100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategi 2					100%

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA tahun anggaran 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten menunjukkan persentase capaian serapan anggaran 97,99% untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan 98,76% untuk DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, akan dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100%	333 perkara perdata yang diselesaikan
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100%	168 perkara pidana yang diselesaikan
		3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100%	62 perkara pidana khusus yang diselesaikan
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;	51%	49%	96%	277 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari 563 perkara putus
		5. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	90,5	93,92	104%	Dari 42 Responden
Rata-rata capaian kinerja fisik			88,30%	88,58	100%	
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 01			24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%	
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 03			216.444.000	213.765.731	98,76%	

Pada tabel di atas bahwa capaian kinerja fisik 100% > dari capaian kinerja keuangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Banten pada Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dinyatakan **Efisien**.

Tabel 3. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;	100%	100%	100%	333 salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;	100%	100%	100%	168 salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;	100%	100%	100%	62 salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Rata-rata capaian kinerja fisik			100%	100%	100%	
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 01			24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%	
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 03			216.444.000	213.765.731	98,76%	

Pada tabel di atas bahwa capaian kinerja fisik 100% > dari capaian kinerja keuangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Banten pada Sasara 2 “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dinyatakan ***Efisien***.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH REVIU.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	2
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
C. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	27
C. Kinerja Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	61
BAB IV PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	73
B. REKOMENDASI	78
LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 -----	iii
Tabel 2	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 1-----	iv
Tabel 3	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 2-----	v
Tabel 4	Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten-----	3
Tabel 5	Uraian dan Tugas Struktur Organisasi -----	5
Tabel 6	Potensi dan Permasalahan dengan Analisis SWOT -----	9
Tabel 7	Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja -----	13
Tabel 8	Rencana Strategis Tahun 2020 s.d 2024 -----	16
Tabel 9	Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 -----	20
Tabel 10	Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 -----	21
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023-----	22
Tabel 12	Sasaran Strategis dan Anggaran -----	24
Tabel 13	Capaian Kinerja Organisasi -----	26
Tabel 14	Persentase Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 -----	28
Tabel 15	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023-----	29
Tabel 16	Persentase Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 -----	31
Tabel 17	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023-----	32
Tabel 18	Keadaan Perkara Pidana Khusus Tahun 2023 -----	34
Tabel 19	Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 -----	35
Tabel 20	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	36
Tabel 21	Data Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten per jenis Perkara Tahun 2023 -----	38
Tabel 22	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023-----	39
Tabel 23	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	40

Tabel 24	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	43
Tabel 25	Hasil Survei IKM Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023----	44
Tabel 26	Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Banten pada Sasaran Strategis 1 -----	46
Tabel 27	Data Rata-rata Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi lingkup Peradilan Umum Tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 1 -----	46
Tabel 28	Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi dengan Kategori 301 – 1000 perkara untuk Sasaran Strategis 1 -----	47
Tabel 29	Data Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 -----	49
Tabel 30	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 -----	50
Tabel 31	Data Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 -----	52
Tabel 32	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 -----	54
Tabel 33	Data Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 -----	56
Tabel 34	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 -----	57
Tabel 35	Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Banten pada Sasaran Strategis 2 -----	58
Tabel 36	Data Rata-rata Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi lingkup Peradilan Umum Tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 2 -----	59
Tabel 37	Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi dengan Kategori 301 – 1000 perkara untuk Sasaran Strategis 2 -----	60
Tabel 38	Perubahan Anggaran Dipa 01 Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023-----	61
Tabel 39	Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2023 -----	62
Tabel 40	Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	62
Tabel 41	Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2023-----	64
Tabel 42	Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	64
Tabel 43	Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 dalam Mendukung Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 -----	66
Tabel 44	Daftar Rincian Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Banten -----	67
Tabel 45	Rincian Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023-----	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	30
Grafik 2	Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	33
Grafik 3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s.d Tahun 2023 -----	40
Grafik 4	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Banten -----	44
Grafik 5	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten -----	50
Grafik 6	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten -----	53
Grafik 7	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten -----	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten -----	4
Gambar 2	Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi -----	6
Gambar 3	Fungsi Pengadilan Tinggi Banten -----	7
Gambar 4	Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banten-----	12
Gambar 5	Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten-----	15
Gambar 6	Proses Capaian Sasaran Strategis -----	19
Gambar 7	Dukungan Anggaran Tahun 2023-----	23
Gambar 8	Tambahan Dukungan Anggaran Tahun 2023-----	23
Gambar 9	Hasil IKM di Aplikasi SKM Online -----	45
Gambar 10	Capaian Kinerja Anggaran Dipa 01 (BUA) Tahun 2023 -----	71
Gambar 11	Capaian Kinerja Anggaran Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) Tahun 2023 --	71



BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**
- C. STRUKTUR ORGANISASI**
- D. ISU ORGANISASI**
- E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Banten merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Banten selaku kawal depan Mahkamah Agung RI yang membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Banten berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Banten merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh pengadilan Tinggi Banten
2. Mendorong Pengadilan Tinggi Banten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Banten di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan layanan peradilan bagi masyarakat.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG dan FUNGSI

Pengadilan Tinggi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, dan resmi beroperasi pada tanggal 24 Februari 2005. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun oleh Kanwil Departemen kehakiman dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banten untuk digunakan pada tahun 2005, berdiri di atas tanah sertifikat milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI, yang terletak di Jalan Raya Pandeglang - Serang Km. 6,6 Kode Pos 42126.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawah beserta wilayah hukumnya berikut ini :

Tabel 4 . Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

NO	SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

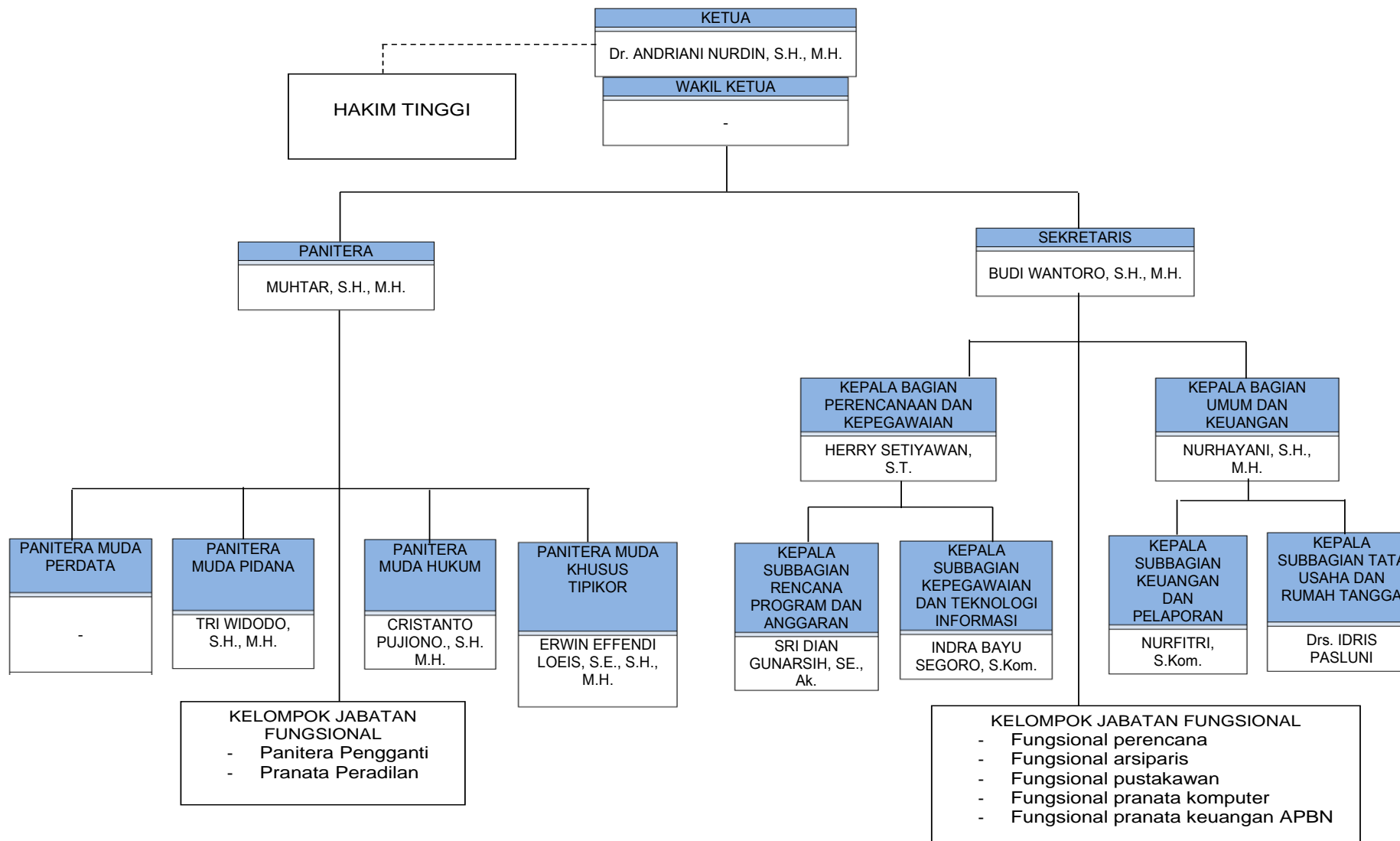
Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Banten akan digambarkan dibawah ini :

Gambar 1 . Struktur Pengadilan Tinggi Banten

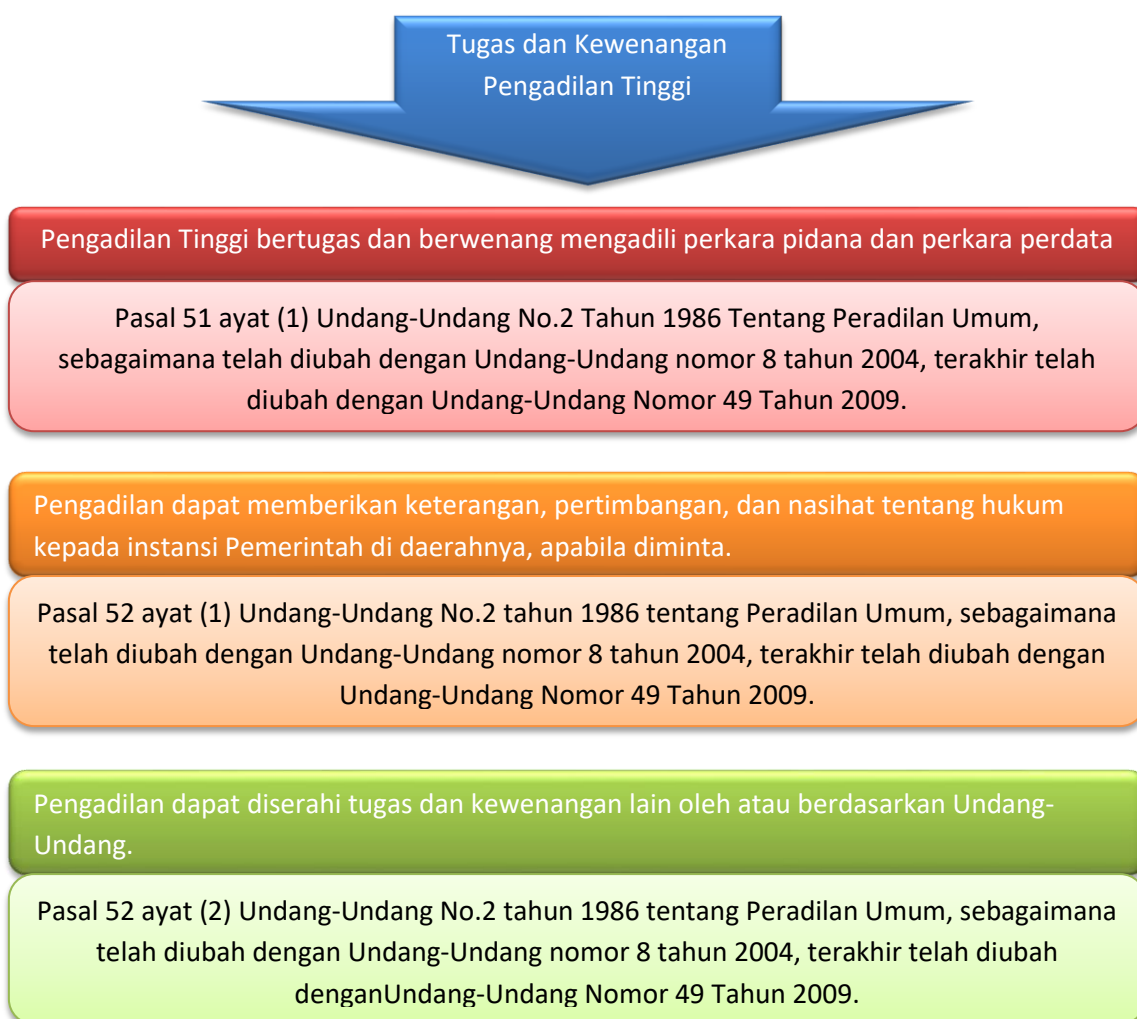


Tabel 5 . Uraian dan Tugas Struktur Organisasi

<p>KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan sebagai supporting unit Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan</p>		
<p>WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p> <p>HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya</p>		
<p>PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara</p>	<p>SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p>	
<p>PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata</p>	<p>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</p>	<p>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</p>
<p>PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bu</p>		
<p>PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.</p>	<p>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan persiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam persiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>
<p>PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>		
<p>PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahan</p>	<p>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan persiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam persiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>


Pengadilan Tinggi Banten selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Gambar 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi



Gambar 3 . Fungsi Pengadilan Tinggi Banten





Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banten masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Banten.

1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Upaya mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

2. Aspek meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Banten telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Banten dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan selain memiliki kelemahan dari faktor internal, namun juga memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan kompleksitas ancaman/ permasalahan yang dihadapi juga diimbangi dengan kekuatan dan kesempatan yang ada. Potensi dan permasalahan yang ada dapat digambarkan pada analisis SWOT berikut :

Tabel 6. Potensi dan Permasalahan dengan Analisis SWOT

	Membantu dalam mencapai tujuan	Menghambat dalam mencapai tujuan
Dari dalam (sifat organisasi, layanan)	<p>STRENGTHS (kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Banten. - Adanya tunjangan kinerja pegawai. - Sistem pengawasan internal. - Pencanaan zona integritas. - Penerapan PTSP, penyediaan ruang tamu terbuka dan pembangunan zona merah. - Optimalisasi teknologi informasi. 	<p>WEAKNESSES (kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi. - Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan. - Terbatasnya SDM pelaksana. - Terbatasnya sarana pendukung TI. - Standar Biaya Proses Pengadilan Tinggi.
Dari luar (sifat lingkungan sekitar)	<p>OPPORTUNITIES (kesempatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti seleksi WBK - Mekanisme pengawasan melalui teknologi informasi - Mengikuti seleksi Peradilan Unggul 	<p>THREATS (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit. - Adanya intervensi dari luar. - Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi terkait latar belakang penyusunan laporan dan kedudukan, wewenang dan fungsi organisasi, serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ikhtisar rencana strategis tahun 2020-2024, rencana kinerja tahun 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan data capaian kinerja 3 tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Serta analisis atas efisiensi penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan rekomendasi/ saran atas capaian organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Pengadilan Tinggi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RenstraK/L) 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Hubungan visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Banten digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4 . Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banten



Dalam mencapai visi dan tujuannya tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang dapat diukur oleh 8 (delapan) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (Core Business)

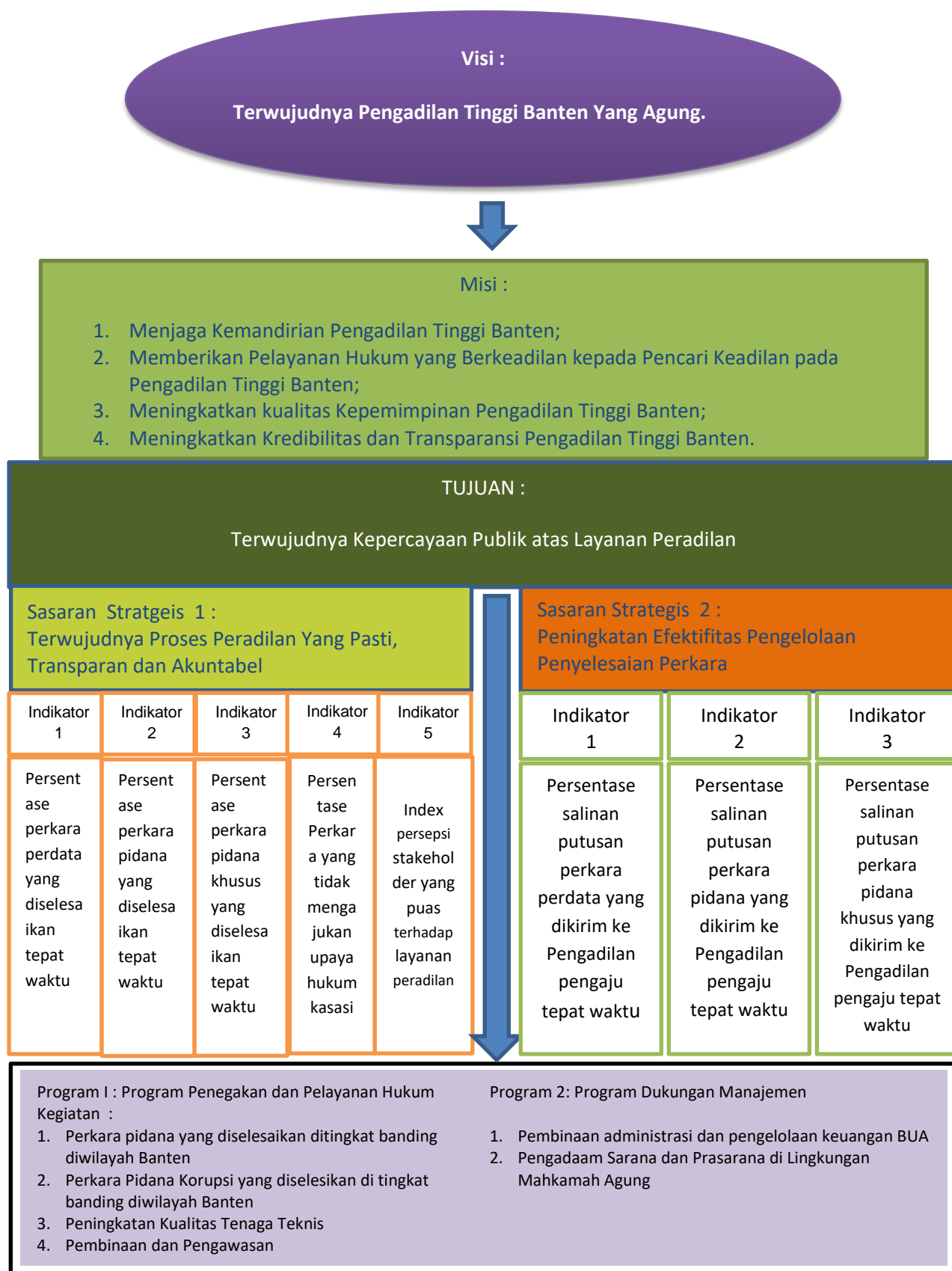
Tabel 7. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <p>e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan.</p> <p>Perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan.</p> <p>Perbandingan jumlah perkara pidana khusus (tipikor + pidana anak) yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan.</p> <p>Perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.</p> <p>Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan survei.</p>

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
		2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim.
			a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim.
			b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor dan pidana anak) yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim.

Penyusunan Renstra 2020 – 2024 dilaksanakan melalui rapat bersama unsur Pimpinan dan Pejabat Struktural. Pada saat penyusunan renstra ini ditetapkan target kinerja selama lima tahun, yaitu tahun 2020 s.d tahun 2024 pada masing-masing indikator kinerja, kemudian dilakukan reuiu renstra untuk menilai masih layak atau tidaknya indikator kinerja yang digunakan dan perbaikan target kinerja sesuai perkembangan. Penetapan target didasarkan pada realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 5 : Framework
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten



Tabel 8. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya keperayaan publik atas layanan peradilan.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biaya penyelesaian perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding.									
			100%		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	134	perkara	114.720	93.120	75.620	74.504	104.804
			100%		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	23	perkara	5.380	9.825	23.425	16.940	18.410
			52%		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41%	50%	51%	52%										

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
			90,5		e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89,34	90,12	90,9	90,5	90,5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis	1	kegiatan	55.000	77.00	55.000	85.000	97.630	
														Terlaksananya Bimtek Tenaga Teknis	-	-	42.790	77.900	73.800	-	141.650-
															Terlaksananya Bimtek PNB	-	-	-	2.870	14.400	-
											Program Dukungan Manajemen	(1). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terlaksananya layanan umum berupa Bimtek dan pengadaan ekstrakomptabel	1	layanan	124.186	36.046	104.345	65.149	474.600	
														Terlaksananya layanan perkantoran (gaji, tunjangan dan operasional)	1	layanan	25.166.693	23.426.791	24.462.333	24.876.367	27.757.664
													(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	-	-	623.001	44.000	249.000	-	10.066.511-



NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
			100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biaya pengiriman salinan putusan perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding.										
			100%		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum									
			100%		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											

Hubungan Kausalitas antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran strategis yang akan dicapai digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6. Proses capaian sasaran strategis



2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 dibuat pada tanggal 3 Januari 2022 dengan penyesuaian terhadap matriks Reviu Renstra 2020-2024 yang disusun dengan mempertimbangkan SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, dan indikator kinerja yang terdapat pada aplikasi E-Sakip Komdanas Mahkamah Agung.

Pada Rencana Kinerja Tahun 2023 telah direvisi pada tanggal 29 Agustus 2022 dimana yang semula 6 (enam) sasaran strategis dengan total 20 (dua puluh) indikator dan direvisi menjadi 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator.

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan rencana kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2020-2024, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten. Dalam RKT Tahun 2023 semula terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja, di mana

12 (dua belas) indikator kinerja urutan pertama merupakan IKU, sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja berikutnya merupakan IKU Tambahan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 sebelum dan sesudah revisi tercantum dalam tabel 9 dan tabel 10 dibawah ini :

Tabel 9. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%		
		b. Persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu	100%		
		c. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan tepat waktu	100%		
		d. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu	100%		
		e. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%		
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%		
		g. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Banten	91,68		
		2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
				b. Persentase salinan putusan perkara pidana biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
c. Persentase salinan putusan perkara pidana anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%				
d. Persentase salinan putusan perkara tindak pidana korupsi yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%				
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%				
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/ bimtek teknis yudisial	100%		

4.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur Pengadilan	b. Persentase pegawai yang lulus diklat/ bimtek non teknis	100%
		a. Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%
5.	Meningkatnya pengelolaan keuangan	b. Persentase temuan LHP Bidang di PT Banten yang ditindaklanjuti	100%
		c. Nilai akuntabilitas kinerja	78,04
6.	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Nilai IKPA DIPA 01	94
		b. Nilai IKPA DIPA 03	94
		a. Persentase realisasi output pengadaan BMN	100%

Tabel 10. Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	90,5
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen Pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten dibuat pada 19 Januari 2023 yang disesuaikan dengan SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

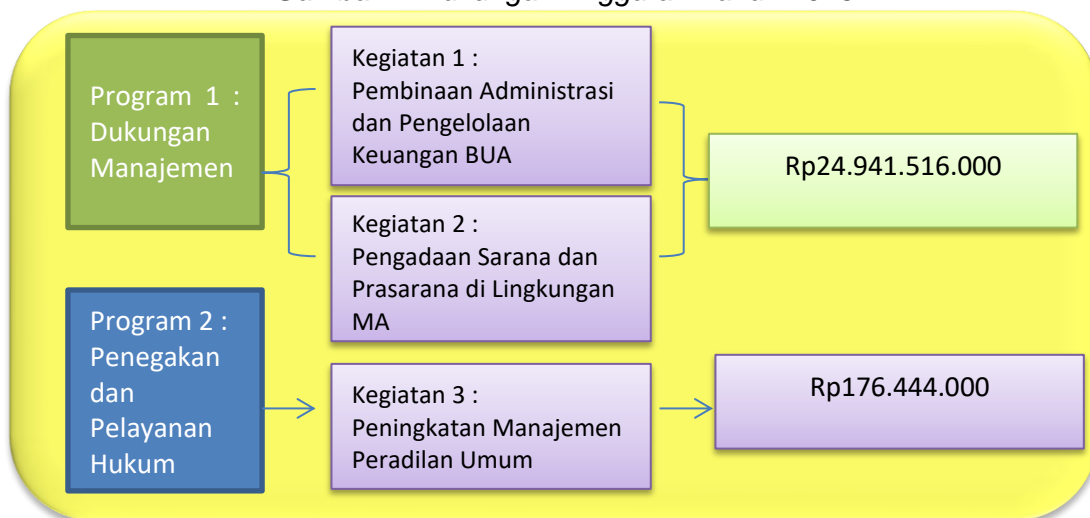
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dibuat sesuai dengan target pada matriks reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun keempat dari Renstra 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Banten yang memuat 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%
		j. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	90,5
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		e. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		f. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

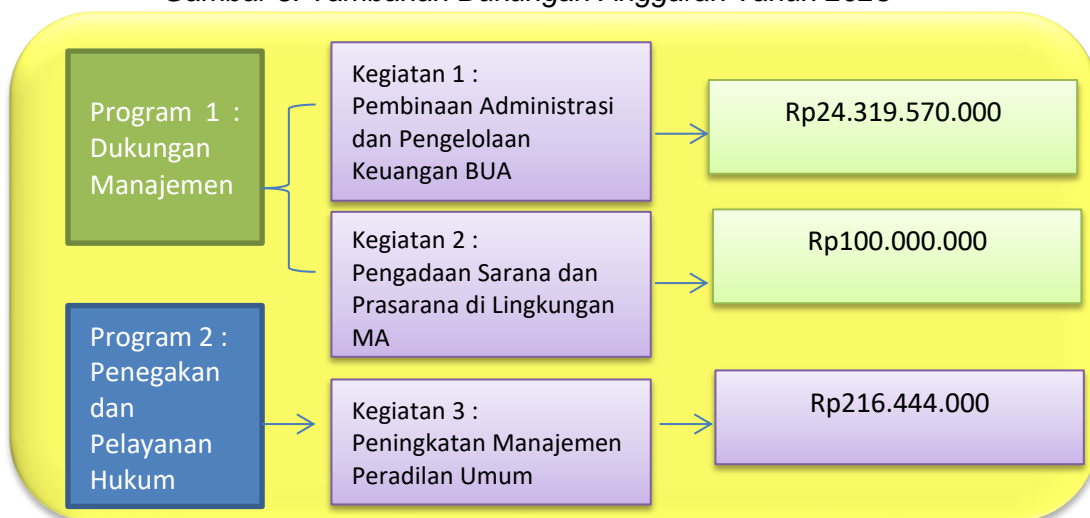
Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi Banten mendapat dukungan anggaran dari APBN dengan total Rp25.117.960.000 yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

Gambar 7. Dukungan Anggaran Tahun 2023



Pada periode berjalan tahun 2023, Pengadilan Tinggi Banten mendapat tambahan anggaran berupa anggaran untuk kegiatan belanja modal (pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung), pengurangan serta penambahan anggaran pada kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan BUA (Belanja Pegawai dan Barang) dan penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum, sehingga total dukungan anggaran untuk Pengadilan Tinggi Banten dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 menjadi Rp24.636.014.000 seperti gambar dibawah ini :

Gambar 8. Tambahan Dukungan Anggaran Tahun 2023



Selanjutnya dari anggaran tahun 2023 yang didasarkan pada data revisi anggaran terakhir tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) sasaran strategis tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 12. Sasaran Strategis dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN
1	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Rp24.636.014.000
2	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	

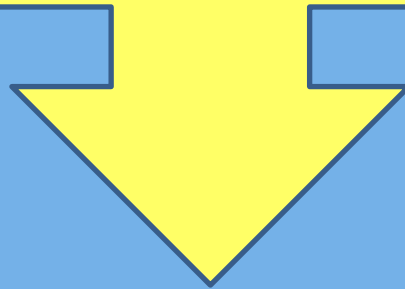
Untuk penyelesaian perkara perdata tidak ada anggaran dari APBN, biaya penyelesaian perkara perdata berasal dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan upaya banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp150.000 / perkara.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN**
- C. KINERJA REALISASI ANGGARAN**



A. CAPAIAN KINERJA ORGANSIASI

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke empat dari Renstra Pengadilan Tinggi Banten tahun 2020 – 2024, Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran strategis yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

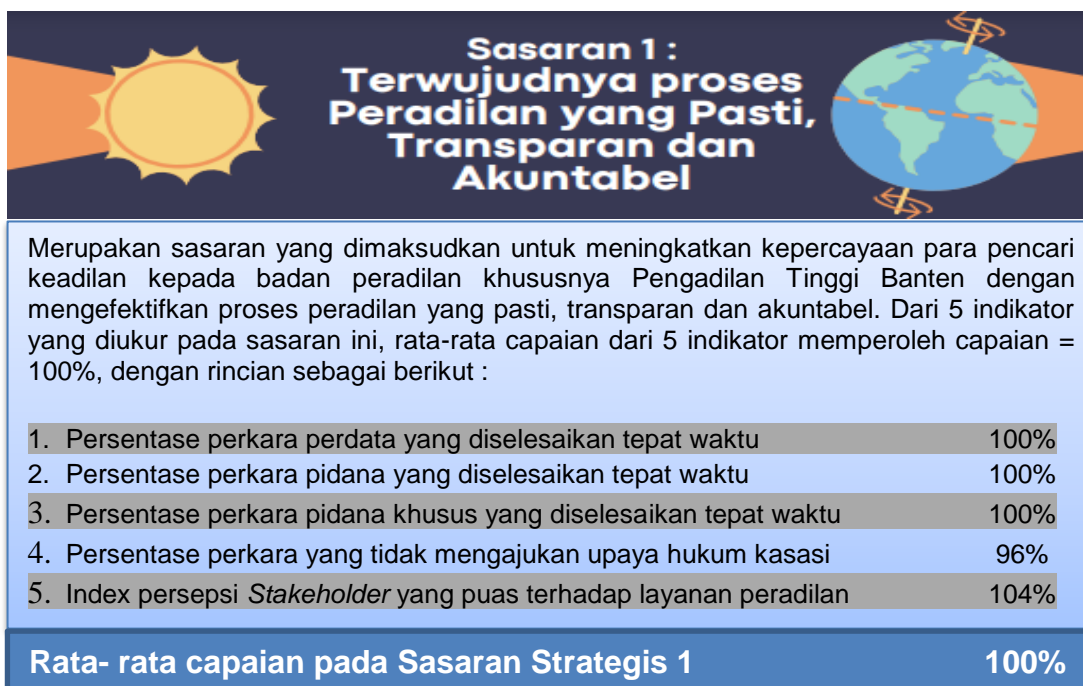
Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 dikatakan “Berhasil”, karena pada 2 (dua) sasaran kinerja berhasil memenuhi rata-rata capaian 100%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 13. Capaian Kinerja Organisasi

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%	49%	96%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	93,93	104%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata – rata capaian kinerja pada sasaran Strategis 2					100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategi 2					100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan, diuraikan dalam evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1	Indikator 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
----------------------------	--

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan (diputus) pada tahun berjalan. Indikator kinerja ini untuk menggambarkan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2023 ini.
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Penyelesaian minutasi dilihat dari tanggal minutasi (tanggal pengiriman berkas dari Panitera Pengganti ke kepaniteraan muda perdata).
- Penyelesaian perkara perdata juga berdasarkan pada SOP Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 354/DJU/OT.01.3/3/2022 (*terlampir*), dimana penyelesaian perkara tidak melebihi 3 (tiga) bulan

- Dimana formulasi perhitungan pada indikator ini adalah
$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$
- Jika semakin tinggi persentase realisasi pada indikator ini berarti semakin baik capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten
- Data yang diambil dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten untuk melakukan pemantauan dan dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada Pimpinan
- Perhitungan realisasi ini dilakukan secara manual melalui aplikasi excel dengan menginput data dari aplikasi SIPP dan kemudian menginput dalam aplikasi e_sakip pada aplikasi Komdanas.
- Pada tahun 2023 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% sehingga capaian 100% ini dikatakan Baik, dimana jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 333 perkara diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan.

Tabel 14. Persentase penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang di Putus	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan (s.d selesai minutasi)				Jumlah Perkara Perdata Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	Jumlah Perkara Perdata Diselesaikan Tidak Tepat Waktu Tahun 2023	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
		0-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	≥ 90 hari			
Januari	23	21	2	-	-	23	-	100%
Februari	31	26	5	-	-	31	-	100%
Maret	55	47	8	-	-	55	-	100%
April	22	16	6	-	-	22	-	100%
Mei	27	13	14	-	-	27	-	100%
Juni	22	13	9	-	-	22	-	100%
Juli	24	16	8	-	-	24	-	100%
Agustus	33	27	6	-	-	33	-	100%
September	21	19	2	-	-	21	-	100%
Oktober	26	22	4	-	-	26	-	100%
November	25	20	5	-	-	25	-	100%
Desember	24	20	4	-	-	24	-	100%
	333	260	73	-	-	333	-	100%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Realisasi capaian kinerja penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 sebesar 100%. Dilihat dari tabel di atas semua penyelesaian perkara perdata tidak ada yang melewati 3 (tiga) bulan atau 90 hari. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Dari 333 perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 260 perkara

yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari dan 73 perkara diselesaikan dalam waktu 31-60 hari.

SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP nomor 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara perdata (terlampir).

Bahwa berdasarkan SOP tersebut penyelesaian perkara perdata tepat waktu adalah 85 hari (sejak menerima berkas perkara sampai dengan minutasi). Dan berdasarkan data SIPP untuk penyelesaian perkara perdata di tahun 2023 yaitu terdapat 260 perkara diselesaikan dalam jangka waktu 0-30 hari, dan 73 perkara diselesaikan dalam jangka waktuy 31-60 hari. Jangka waktu penyelesaian paling lama adalah 57 hari yaitu untuk perkara nomor 110/PDT/2023/PT BTN pada jenis perkara “perbuatan melawan hukum”.

Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa dengan total 333 perkara perdata yang diselesaikan di tahun 2023, semuanya tepat waktu karena diselesaikan paling lama hanya 57 hari. Sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. SOP penyelesaian perkara perdata ini sangat mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Keberhasilan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten komitmen untuk keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.

Tabel 15. Perbandingan persentase penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 sampai dengan 2023

TAHUN	Jumlah Perkara Perdata yang di selesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan (s.d selesai minutasi)				Jumlah Perkara Perdata Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata Diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
		0-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	IV 90 hari			
2023	333	260	73	-	-	333	-	100%
2022	317	302	15	-	-	317	-	100%
2021	271	200	68	3	-	271	-	100%
2020	164	102	59	3	-	164	-	100%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Dari tabel di atas selama tahun 2020 s.d tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten dalam proses penyelesaian perkara perdata tepat waktu sesuai dengan SOP yang ditetapkan tidak melebihi 3 bulan / 90 hari, hal ini menunjukkan kinerja yang baik sebab percepatan penyelesaian perkara tidak lepas dari unsur pimpinan dan ASN yang berkompeten dalam menangani perkara tersebut dan sebagai upaya

mencegah terjadinya indikasi KKN. Kinerja yang baik juga di dukung dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang rutin dilaksanakan Pimpinan juga pembinaan dan pengawasan secara periodik.

Grafik 1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu tahun 2020 s.d 2023



Grafik berikut ini merupakan perbandingan realisasi capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 s.d 2023. Sesuai dengan data bahwa capaian dari tahun ke tahun tetap sama 100% berarti kami Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen mewujudkan salah satu misi Pengadilan Tinggi Banten yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.

Pencapaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu pada Tahun 2023 telah mencapai realisasi 100% dikategorikan berkualitas sangat baik. Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan dalam proses penyelesaian perkara yaitu saat putusan di tandatangani, dihari yang sama pertimbangan dan putusannya langsung diinput pada SIPP, serta langsung diminutasi.

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan (diputus) pada tahun berjalan. Indikator kinerja ini untuk menggambarkan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2023 ini.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutas. Penyelesaian minutas dilihat dari tanggal minutas (tanggal pengiriman berkas dari Panitera Pengganti ke kepaniteraan muda pidana).

Adapun pada tahun 2023 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 100%. Capaian ini dikatakan Baik karena bisa mencapai target yang ditetapkan. Semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerja Pengadilan.

Realisasi penyelesaian perkara pidana tepat waktu ini diperoleh dari 168 perkara yang telah diselesaikan, dari keseluruhan perkara pidana tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu tidak melebihi 3 bulan sesuai SOP Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2024.

Data yang diambil dalam melakukan pemantauan dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan diinput capaian rutin ke aplikasi e_monev Bappenas dan dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada Pimpinan.

Tabel 16. Persentase penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang di Putus	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan (s.d selesai minutas)				Jumlah Perkara Pidana Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	Jumlah Perkara Pidana Diselesaikan Tidak Tepat Waktu Tahun 2023	Realisasi Persentase Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu
		0-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	≥ 90 hari			
Januari	12	12	-	-	-	12	-	100%
Februari	14	14	-	-	-	14	-	100%
Maret	14	13	1	-	-	14	-	100%
April	17	15	2	-	-	17	-	100%
Mei	16	13	3	-	-	16	-	100%
Juni	7	6	1	-	-	7	-	100%

Juli	15	15	-	-	-	15	-	100%
Agustus	15	12	3	-	-	15	-	100%
September	11	10	1	-	-	11	-	100%
Oktober	16	16	-	-	-	16	-	100%
November	13	13	-	-	-	13	-	100%
Desember	18	18	-	-	-	18	-	100%
	168	157	11	-	-	168	-	100%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP nomor 356/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana PT (terlampir).

Bahwa berdasarkan SOP tersebut penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah 87 hari (sejak menerima berkas perkara sampai dengan minutasasi). Dan berdasarkan data SIPP untuk penyelesaian perkara pidana di tahun 2023 yaitu terdapat 157 perkara diselesaikan dalam jangka waktu 0-30 hari, dan 11 perkara diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari. Jangka waktu penyelesaian paling lama adalah 43 hari yaitu untuk perkara nomor 50/PID.SUS/2023/PT BTN pada jenis perkara "narkotika".

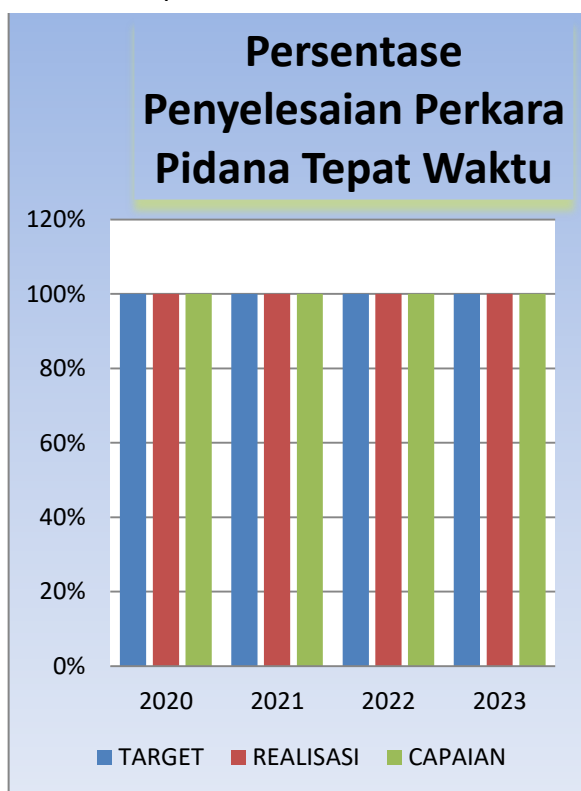
Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa dengan total 168 perkara perdata yang diselesaikan di tahun 2023, semuanya tepat waktu karena diselesaikan paling lama hanya 43 hari. Sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. SOP penyelesaian perkara pidana PT ini sangat mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Tabel 17. Perbandingan persentase penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 sampai dengan 2023

TAHUN	Jumlah Perkara pidana yang di selesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan (s.d selesai minutasasi)				Jumlah Perkara Pidana Diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
		0-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	≥ 90 hari				
2023	168	157	11	-	-	168	100%	100%	100%
2022	122	108	11	3	-	122	100%	100%	100%
2021	172	155	17	-	-	172	100%	100%	100%
2020	154	137	16	1	-	154	100%	100%	100%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu tahun 2020 s.d 2023



(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Dari Tabel dan Grafik terlihat jelas bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam menyelesaikan perkara pidana sepanjang tahun 2020 s.d 2023 berturut turut selalu 100%, hal ini bisa diperoleh karena selalu dilakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi secara berjenjang untuk memberikan motivasi agar menyelesaikan perkara sesuai SOP penyelesaian perkara pidana PT.

Ini juga menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah berhasil mencapai tujuan Pengadilan Tinggi Banten yaitu terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan khususnya sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Banten telah tercapai.

Pencapaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu pada Tahun 2023 telah mencapai realisasi 100% dikategorikan berkualitas sangat baik.

Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik.

Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan dalam proses penyelesaian perkara yaitu saat putusan ditandatangani, di hari yang sama pertimbangan dan putusnya langsung diinput pada SIPP, serta langsung diminutasi.

Pencapaian ini menunjukkan tercapainya sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Tinggi Banten.

**Sasaran
Strategis 1**

Indikator 3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan (putus) pada tahun berjalan. Perkara pidana khusus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Banten adalah perkara pidana tipikor dan perkara pidana anak. Untuk perkara tipikor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa waktu penyelesaian perkara tipikor adalah maksimal 60 hari. Sedangkan untuk perkara pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun untuk penyelesaian perkara pidana anak juga berdasarkan pada SOP Nomor 355/DJU/OT.01.3/3/2022. Dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan SOP Nomor 357/DJU/OT.01/3/3/2022 (*terlampir*).

Adapun keadaan perkara pidana khusus pada Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18. Keadaan Perkara Pidana Khusus Tahun 2023

No	Jenis Pidana Khusus	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun 2023
1	Perkara Pidana Anak	0	15	14	1
2	Perkara Tipikor	5	44	48	1
	Total	5	59	62	2

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Adapun pada tahun 2023 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 100%. Capaian ini dikatakan Baik karena bisa mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu ini diperoleh dari 62 perkara yang telah diselesaikan (14 perkara pidana anak dan 48 perkara tipikor) dari keseluruhan perkara pidana khusus tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu tidak melebihi 3 bulan sesuai SOP Penyelesaian Perkara dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2024.

Data penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 19. Persentase penyelesaian perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang di Putus	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan (s.d selesai minutasasi)		Jumlah Perkara Pidana Khusus Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	Jumlah Perkara Pidana Khusus Diselesaikan Tidak Tepat Waktu Tahun 2023	Realisasi Persentase Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023
		0-60 hari	> 60 hari			
Januari	9	9	-	9	-	100%
Februari	8	8	-	8	-	100%
Maret	13	13	-	13	-	100%
April	3	3	-	3	-	100%
Mei	2	2	-	2	-	100%
Juni	10	10	-	10	-	100%
Juli	-	-	-	-	-	100%
Agustus	3	3	-	3	-	100%
September	6	6	-	6	-	100%
Oktober	4	4	-	4	-	100%
November	2	2	-	2	-	100%
Desember	2	2	-	2	-	100%
	62	62		9		100%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Dari tabel 19, dari total 62 perkara pidana khusus diselesaikan tahun 2023 terdiri dari 62 perkara pidana khusus perkara diselesaikan hanya dalam waktu 0-60 hari. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen dalam melaksanakan SOP selain itu juga tetap konsisten dalam peningkatan kinerja sehingga setiap tahun mampu merealisasikan perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%.

SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP nomor 357/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara tipikor tingkat banding dan SOP nomor 355/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara anak tingkat banding (terlampir).

Bahwa berdasarkan SOP penyelesaian perkara tipikor tepat waktu adalah 67 hari (sejak menerima berkas perkara sampai dengan minutasasi). Dan berdasarkan data SIPP untuk penyelesaian perkara tipikor di tahun 2023 yaitu terdapat 44 perkara tipikor diselesaikan dalam jangka waktu 0-30 hari, dan 4 perkara diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari. Jangka waktu penyelesaian paling lama adalah 47 hari yaitu untuk perkara nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN pada jenis perkara "tindak pidana korupsi".

Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa dengan total 48 perkara tipikor yang diselesaikan di tahun 2023, semuanya tepat waktu karena diselesaikan paling lama

hanya 47 hari. Sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. SOP penyelesaian perkara tipikor tingkat banding ini sangat mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Sedangkan berdasarkan

SOP penyelesaian perkara pidana anak tepat waktu adalah 40 hari (sejak menerima berkas perkara sampai dengan minutas) berdasarkan data SIPP untuk penyelesaian perkara pidana anak di tahun 2023 yaitu terdapat 14 perkara pidana anak diselesaikan dalam jangka waktu 0-40 hari, dan 0 perkara diselesaikan dalam jangka waktu ≥ 40 hari. Jangka waktu penyelesaian paling lama adalah 11 hari yaitu untuk perkara nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN pada jenis perkara “tindak pidana anak”.

Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa dengan total 14 perkara pidana anak yang diselesaikan di tahun 2023, semuanya tepat waktu karena diselesaikan paling lama hanya 11 hari. Sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. SOP penyelesaian perkara pidana anak tingkat banding ini sangat mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Tabel 20. Perbandingan persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana Khusus Diselesaikan	Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	62	62	100%	100%	100%
	2022	33	33	100%	100%	100%
	2021	8	8	100%	100%	100%
	2020	12	12	100%	100%	100%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Capaian persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 berturut-turut selalu 100% ini berarti setiap tahun Pengadilan Tinggi Banten mampu mempertahankan realisasi penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu 100% tercapainya sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Banten.

Pencapaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu pada Tahun 2023 telah mencapai realisasi 100% dikategorikan berkualitas sangat baik. Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan dalam proses penyelesaian perkara yaitu saat putusan ditandatangani, di hari yang sama pertimbangan dan putusannya langsung diinput pada SIPP, serta langsung diminutasi.

Pencapaian ini menunjukkan tercapainya sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Tinggi Banten.

Pada sasaran strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan 3 indikator yang dijelaskan sebelumnya dimana semua indikator pada sasaran strategis 1 tercapai 100%. Adapun faktor yang mendukung akan capaian tersebut pada penyelesaian perkara perdata, pidana dan pidana khusus yang tepat waktu pada tahun 2023 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi Banten komitmen dalam mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu dijelaskan bahwa maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 60 (enam puluh) hari untuk perkara pidana khusus. Berdasarkan Surat Edaran tersebut maka Pimpinan yang didukung oleh Hakim, Panitera bertanggung jawab menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak melebihi 3 bulan.

2. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (triwulanan) oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan terhadap penyelesaian perkara melalui : rapat bidang, rapat koordinasi bulanan evaluasi pelaksanaan kinerja, monitoring melalui aplikasi emonev bappenas, Whatsapp group dan aplikasi SIPAPU serta SIPP

3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Panitera Muda dan tenaga teknis pendukung lainnya pada bagian kepaniteraan

4. Menerapkan Reward dan Punishment terhadap penyelesaian perkara yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

5. Adanya rasa tanggung jawab pada semua ASN di Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pimpinan baik kebijakan dari Pusat atau kebijakan internal.

Sasaran
Strategis 1

Indikator 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perdata, pidana dan pidana khusus) dibandingkan jumlah perkara yang diselesaikan/putus ditahun 2023.

Indikator kinerja ini untuk mengukur capaian kinerja hakim dalam memutus perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan.

Pada tahun 2023 realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 49% dimana terdapat 277 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari total 563 perkara banding yang putus ditingkat banding. Capaian ini diukur dengan menggunakan aplikasi excel dengan data diambil dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten. Adapun data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. Data Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten per Jenis Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi
1	Perdata	333	163	49%
2	Pidana	168	89	53%
3	Pidana Khusus	62	25	40%
	Jumlah	563	277	49%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Dari tabel 21 di atas untuk perkara perdata terdapat 163 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari 333 perkara putus dengan realisasi 49% dimana target yang ditetapkan untuk indikator ini ada 51% berarti pada indikator ini Pengadilan Tinggi Banten belum mencapai target, sedangkan untuk perkara pidana

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi sebanyak 89 perkara dari 168 perkara putus dengan realisasi 53% ini melebihi target yang ditetapkan 51% dan untuk perkara pidana khusus sebanyak 25 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari 62 perkara dengan capaian 40% berarti dibawah target yang ditetapkan 51%.

SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP Nomor 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara perdata, SOP Nomor 355/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana anak tingkat banding, SOP Nomor 356/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana PT dan SOP Nomor 357/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana korupsi tingkat banding, dan semua penyelesaian perkara diselesaikan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara tersebut diatas, serta majelis Hakim sudah memberikan putusan terbaik sesuai peraturan.

Tabel 22. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023

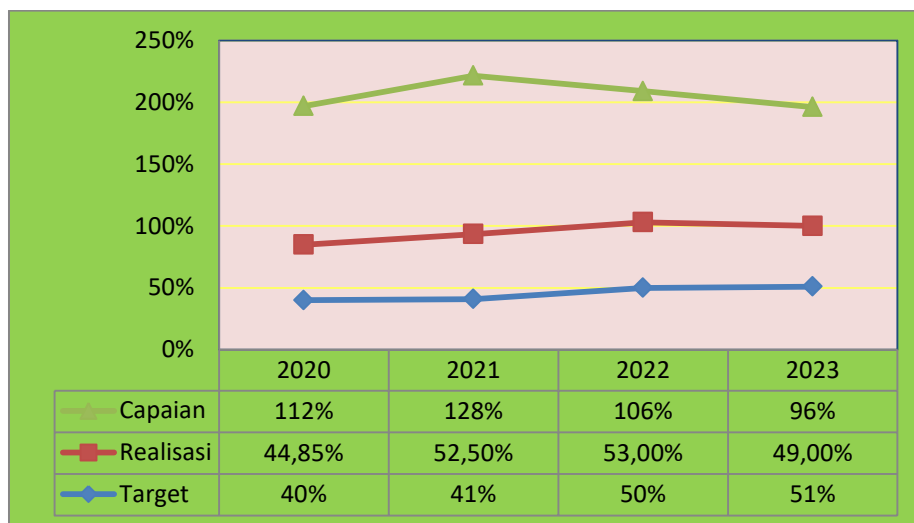
No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi Perakra yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/3)
1	Januari	44	18	26	59%
2	Februari	53	34	19	36%
3	Maret	82	40	42	51%
4	April	42	29	13	31%
5	Mei	45	27	18	40%
6	Juni	39	26	13	33%
7	Juli	39	22	17	44%
8	Agustus	51	32	19	37%
9	September	38	20	18	45%
10	Oktober	46	27	19	41%
11	November	40	9	31	78%
12	Desember	44	2	42	91%
	Jumlah	563	286	277	49%

(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Pada tabel 22 di atas, terlihat bahwa hanya pada bulan Januari, Maret, November dan Desember 2023 yang reliasasi perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi di atas target 51%. Monitoring dan evaluasi Pimpinan dari data di

atas akan dilakukan upaya lebih meningkatkan kualitas putusan agar semakin banyaknya perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi, para pencari keadilan sudah puas dengan hasil putusan ditingkat banding.

Grafik 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023



(Data diolah dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten)

Grafik di atas menjelaskan capaian kinerja pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten dimana pada tahun 2023 capaian tidak mencapai 100%. Pada 3 tahun sebelumnya berturut – turut capaian melebihi 100%, sehingga ditahun 2023 dilakukan reuiu target IKU dimana menaikkan target untuk indikator ini semula tahun 2022 sebesar 50% menjadi 51% di tahun 2023. Tetapi realisasi di tahun 2023 tidak tercapai. Pencapaian di tahun 2023 bukan berarti kami tidak komitmen dalam menjalankan target kinerja pada indikator ini, tetapi adanya ketidakpuasan para pihak pencari keadilan terhadap hasil putusan sehingga melakukan upaya hukum kasasi.

Tabel 23 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	2023	563	286	277	51%	49,00%	96%
2	2022	472	222	250	50%	53,00%	106%
3	2021	451	214	237	41%	52.50%	128%
4	2020	330	182	148	40%	44.85%	112%

Selain ketidakpuasan para pencari keadilan ada faktor lain yang menyebabkan banyaknya upaya hukum kasasi yaitu Penegak hukum lainnya (Kejaksaan) tidak puas terhadap vonis putusan pengadilan dimana putusan hakim jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya, sehingga mengharuskan jaksa melakukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan tidak bisa membatasi jumlah permohonan upaya hukum kasasi untuk perkara-perkara yang dimohonkan Jaksa atau Pihak Terdakwa, karena Upaya Hukum Kasasi merupakan hak dari para pencari keadilan.

Meskipun tahun 2023 capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 96% tidak mencapai target yang ditetapkan 51%, Pengadilan Tinggi Banten tetap berkomitmen untuk mencapai target pada sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pencapaian Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 sebesar 96%. Meskipun realisasi pada Indikator kinerja ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih dikategorikan berkualitas baik.

Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik.

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja indikator ini Pimpinan membuat kebijakan untuk menurunkan target menjadi 45% pada tahun 2024 berdasarkan pengalaman capaian kinerja triwulan I s.d Triwulan IV tahun 2023.

Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan memberikan pembinaan kepada Majelis Hakim agar meningkatkan kualitas putusan, memutus perkara dengan rasa keadilan dan kepastian hukum secara kasuitis.

**Sasaran
Strategis 1**

**Indikator 5 : Index persepsi *stakeholder* yang puas
terhadap layanan peradilan**

Indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan merupakan indeks yang diperoleh dari penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka.

Pengukuran indikator ini mengacu pada peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik selain itu juga indikator ini beracuan pada nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Indeks harus ≥ 80 . Pengadilan Tinggi Banten melaksanakan survey dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu SISUPER dengan alamat : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan1663398>. Adapun lingkup survey sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut antara lain :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banten, diantaranya :

1. Aparatur Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten
2. Advokat yang diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten
3. Jaksa, pengacara, mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari informasi pada Pengadilan Tinggi Banten
4. Masyarakat umum yang membuat/mengajukan pengaduan ke Pengadilan Tinggi Banten.

Jika semakin tinggi nilai indeks berarti semakin baik capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten. Adapun periode pengambilan data pemantauan dan pelaporan untuk indikator ini dilakukan setiap triwulanan / Semesteran.

Pada tahun 2023 nilai IKM sebesar 93,92 dapat dikatakan sangat baik sesuai dengan ambang yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Banten dimana nilai 88,31 – 100 berarti Mutu Layanan bernilai A dengan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.

Dimana target Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 yaitu 90,5 dengan realisasi 93,92 sehingga capaian tahun 2023 yaitu sebesar 104%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan perundangan-undangan yang mengaturnya

SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP Nomor 346/DJU/OT.01.03/3/2022 tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan Pengadilan Tinggi (terlampir).

Bahwa berdasarkan SOP terdapat Tim dalam menyusun konsep survey, menyusun program pelaksanaan SKM dan SPAK, memeriksa sarana dan prasarana survey, mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden, mengumpulkan hasil survey tersebut untuk menetapkan IKM dan IPAK, menyusun laporan hasil survey semesteran, mengirim hasil survey tersebut kepada Ditjen Badilum melalui aplikasi SISUPER, dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian atas indikator kinerja ini secara periodik.

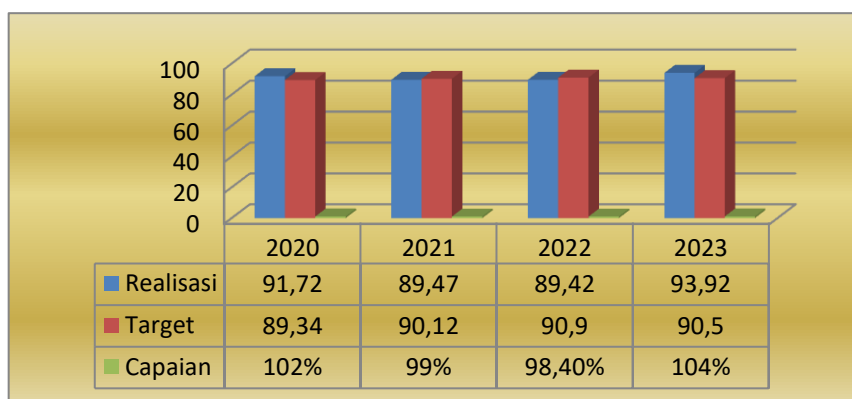
Adapun capaian Indikator Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 akan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 24. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 s.d 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
2023	93,92	90,5	104%
2022	89,42	90,9	98,4%
2021	89,47	90,12	99%
2020	91,72	80,34	102%

Source: Rekap data IKM dari aplikasi SIPAPU

Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banten



Data : Rekap data IKM dari aplikasi SIPAPUdan Laporan Kepaniteraan Hukum.

Dari tabel dan grafik di atas bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 sebesar 93,93 nilai ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 90,5 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 104%, dari tabel di atas juga terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat 2 tahun beruntun dibawah target yaitu tahun 2021 dan 2022 hal ini dijelaskan bahwa dalam tahun 2021 dalam masa pandemic covid 19.

Jika dilihat dari interval penilaian bahwa penilaian indek tahun 2021 dan 2022 tersebut meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan tapi masih kategori Sangat Baik (pada interval 81,26 – 100), hal ini mencerminkan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan TinggiBanten masuk kategori Sangat Baik.

Adapun secara rinci hasil survey IKM terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

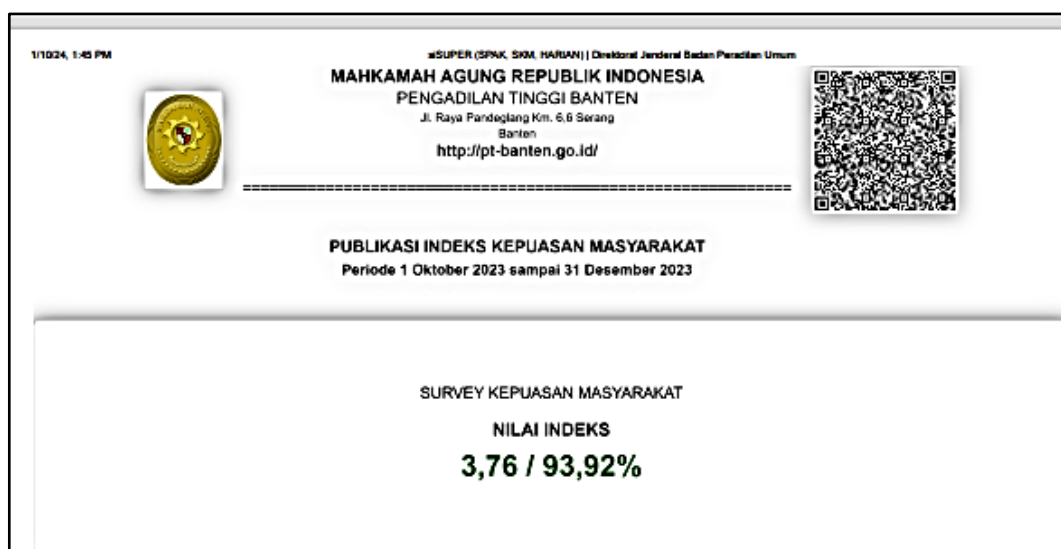
Tabel 25. Hasil Survei IKM Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023

Tahun	Ruang Lingkup	Skor (Skala 4)	Kategori
2023	1. Persyaratan	3,857	Sangat Baik
	2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,762	Sangat Baik
	3. Waktu Penyelesaian	3,738	Sangat Baik
	4. Biaya / Tarif	3,690	Sangat Baik
	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,714	Sangat Baik
	6. Kompetensi Pelaksana	3,690	Sangat Baik
	7. Perilaku Pelaksana	3,810	Sangat Baik
	8. Sarana dan Prasarana	3,690	Sangat Baik
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	3,857	Sangat Baik
Rata – Rata IKM Skala 4		3,857	Sangat Baik
IKM Skala 100 - Realisasi		93,92	Sangat Baik
Target		90,5	
Capaian		104%	Sangat Baik

Dari tabel di atas terdapat 9 ruang lingkup penilaian dalam survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Ada beberapa faktor mendukung capaian tersebut, antara lain :

- Adanya kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan tindak lanjut hasil monev tersebut.
- Kualitas dari petugas Pelayanan semakin meningkat dengan adanya kegiatan bimtek, training, pelatihan pelayanan dan briefing setiap hari Senin.

Gambar 9. Hasil IKM di aplikasi SKM online



Pencapaian Kinerja Index Persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 sebesar 104%, dikategorikan berkualitas sangat baik.

Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan dan kolaborasi yang baik antara Hakim Pengawas, Penanggung jawab dan Petugas PTSP, serta rutin melaksanakan *briefing* dan monev PTSP secara periodik.

Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan berupa sistem pemberian Reward dan Punishment kepada pemberi dan penerima layanan publik di Pengadilan Tinggi Banten.

Pencapaian ini menunjukkan tercapainya sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Tinggi Banten.

Tabel 26. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Banten pada Sasaran Strategis 1

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Jangka Menengah	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	52%	51%	49%	96%
		5. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	90,5	93,92	104%

Sumber data : Matrik Renstra dan Capaian Kinerja tahun 2023

Target jangka menengah pada tabel di atas merupakan target tahun terakhir (2024) pada rewiu matriks renstra 2020-2024 yang disusun pada bulan Januari 2023. Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara target tahun 2023, realisasi, capaian dengan target jangka menengah.

Terlihat bahwa realisasi 5 (lima) indikator pada sasaran strategis 1 (satu) tahun 2023 untuk Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 49% masih dibawah target jangka menengah yaitu 52% juga masih dibawah target tahun 2023. Sedangkan untuk realisasi dan capaian pada 4 (empat) indikator lainnya ada yang sama dan ada yang melebihi target jangka menengah.

Tabel 27. Data Rata-Rata Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi Lingkup Peradilan Umum Tahun 2023

NO	Sasaran strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian Per Indikator	Capaian Pengadilan Tinggi Banten
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	101,91 %	100%
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	101,88 %	100%
		3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	101,59%	100%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	114,36%	96%
		5. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	105,82%	104%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1			105.11%	100%

Sumber data dari Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum sebanyak 32 Satker dari 34 Satker yang ada setara dengan 94,12% (terlampir dalam laporan ini).

Dari tabel capaian kinerja nasional pada Pengadilan Tinggi lingkup Peradilan Umum tahun 2023 di atas bahwa Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 untuk sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel masih dibawah Capaian Rata-Rata Nasional.

Meskipun capaian Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 masih berada di bawah skala Nasional, Pengadilan Tinggi Banten tetap berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut dengan kategori Baik yaitu 100%.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi dengan kategori 301-1000 perkara untuk Sasaran Strategis 1

No	Satua Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel														
		Indikator :														
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PT Banda Aceh	98	100	102,04%	98	100	102,04%	98	100	102,04%	40	51,42	128,55%	90	94,38	104,87%
2	PT Mataram	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	38	38,51	101,34%	94	94,39	100,41%
3	PT Denpasar	95	99,8	105,05%	95	99,8	105,05%	95	99,8	105,05%	40	42,00	105,00%	90	98,67	109,63%
4	PT Riau	96	98,97	103,09%	96	100	104,17%	100	100	100,00%	40	42,50	106,25%	96	98,15	102,24%
5	PT Jambi	96	100	104,17%	98	100	102,04%	96	100	104,17%	40	37,82	94,55%	93	100,00	107,53%
6	PT Banjarmasin	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	40	41,10	102,75%	90	98,56	109,51%
7	PT Manado	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	35	90,29	257,97%	90	93,79	104,21%
8	PT Tanjung Karang	93	100	107,53%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	60	63,05	105,08%	90	95,00	105,56%
9	PT Kalimantan Timur	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	34	35,00	102,94%	85	96,87	113,96%
10	PT Pontianak	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	60	33,92	56,53%	93	104,86	112,75%
11	PT Maluku Utara	98	100	102,04%	98	100	102,04%	98	100	102,04%	37	37,30	100,81%	94	97,72	103,96%
12	PT Kupang	100	95,98	95,98%	100	100	100,00%	100	92,86	92,86%	42	37,61	89,55%	90	99,31	110,34%
13	PT Padang	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	76,18	152,36%	93	98,00	105,38%
Rata – Rata		97,4	99,6	102,34	97,5	99,98	102,57%	97,7	99,44	101,86	42,8	48,21	115,67%	91,4	97,67	106,95%
	PT Banten	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	51	49,00	96,08%	90,5	93,92	103,78%

Sumber data dari Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum sebanyak 32 Satker dari 34 Satker (terlampir dalam laporan ini).

Dari tabel 28 di atas untuk sasaran strategis 1 perbandingan dengan Satuan Kerja dengan kategori Pengadilan 301 – 1000 perkara, terlihat bahwa Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 masih dibawah rata-rata 13 Pengadilan di atas.

Meskipun capaian Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 masih berada di bawah, Pengadilan Tinggi Banten tetap berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut dengan kategori Baik yaitu 100%.

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.. Dari 3 (tiga) indikator yang diukur pada sasaran strategis ini, rata-rata capaian memperoleh 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	100%
2.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	100%
3.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	100%

Rata- rata capaian pada Sasaran Strategis 2 **100%**

Sasaran
Strategis 2

- Indikator 1 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim pada tahun berjalan.

Adapun pengiriman salinan putusan perkara perdata ke Pengadilan Pengadu mengacu pada :

1. Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara;
2. SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.
4. SOP Penyelesaian perkara pidana Pengadilan Tinggi nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang SOP Penyelesaian Perkara Perdata.

Adapun formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi persentase capaiannya berarti semakin baik kinerjanya, sebaliknya jika semakin rendah persentase capaiannya berarti semakin buruk kinerjanya.

Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara perdata sebanyak 333 perkara dan sebanyak 333 putusan tersebut dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara manual melalui aplikasi excel dengan data yang diambil dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten. Adapun data tersebut akan di jabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 29. Data Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Putusan Perkara Perdata	Jumlah Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu (Sejak tanggal putus banding)		Jumlah Putusan yang dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan yang dikirim Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
			0-14 hari	>14 hari			
1	Januari	23	23	-	23	-	100%
2	Februari	31	31	-	31	-	100%
3	Maret	55	55	-	55	-	100%
4	April	22	22	-	22	-	100%
5	Mei	27	27	-	27	-	100%
6	Juni	22	22	-	22	-	100%
7	Juli	24	24	-	24	-	100%
8	Agustus	33	33	-	33	-	100%
9	September	21	21	-	21	-	100%
10	Oktober	26	26	-	26	-	100%
11	November	25	25	-	25	-	100%
12	Desember	24	24	-	24	-	100%
	Total	333	333	-	333	-	100%

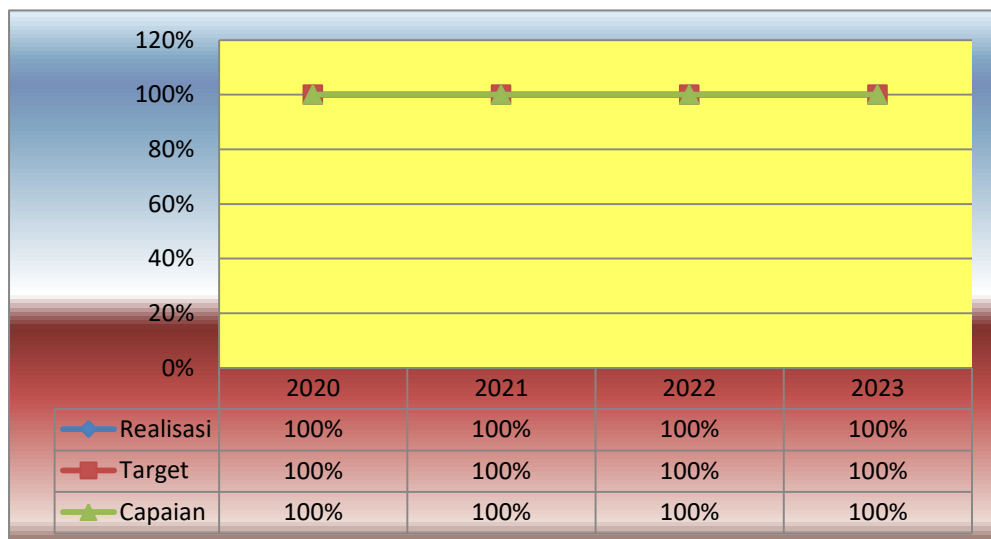
Sumber data : Dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banten diolah dalam aplikasi excel.

Pada tabel di atas terlihat bahwa Pengiriman Salinan Putusan perkara perdata dari bulan Januari s.d Desember 2023 ke Pengadilan Pengaju sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas waktu (14 hari).

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan. Berdasarkan data SIPP untuk pengiriman salinan putusan perkara perdata di tahun 2023 yaitu terdapat 333 salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa dengan total 333 salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tidak ada yang melebihi 14 hari, dan data salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju paling lama hanya 6 hari, yaitu pada perkara nomor 6/PDT/2023/PTBTN dan 271/PDT/2023/PTBTN.

Grafik 5. *Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2020 s.d 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten*



Sumber data dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten

Pengiriman salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Banten secara berturut – turut dari tahun 2020 s.d 2023 selalu 100% ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen dalam mendukung sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Tabel 30. *Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu*

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	333	333	100%	100%	100%
2022	317	317	100%	100%	100%
2021	271	271	100%	100%	100%
2020	164	164	100%	100%	100%

Sumber data dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten

Pencapaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 sebesar 100%, dikategorikan berkualitas sangat baik.

Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik.

Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan dalam proses penyelesaian perkara yaitu saat putusan di tandatangani, dihari yang sama pertimbangan dan putusnya langsung diinput pada SIPP, serta langsung diminutasi, selanjutnya bagian Kepaniteran Muda Perdata langsung menyiapkan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju dihari yang sama.

Pencapaian pada indikator ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Banten telah mencapai sasaran strategis 2 yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

**Sasaran
Strategis 2**

Indikator 2 : Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim pada tahun berjalan.

Adapun pengiriman salinan putusan perkara pidana ke Pengadilan Pengadu mengacu pada :

1. Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara;
2. SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan;
4. SOP Penyelesaian perkara pidana Pengadilan Tinggi nomor : 356/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang SOP Penyelesaian Perkara Pidana PT.

Adapun formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi persentase capaiannya berarti semakin baik kinerjanya, sebaliknya jika semakin rendah persentase capaiannya berarti semakin buruk kinerjanya.

Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara pidana sebanyak 168 perkara dan sebanyak 168 putusan perkara pidana tersebut dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara manual melalui aplikasi excel dengan data yang diambil dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten.

Pengukuran indikator ini juga dilakukan dengan pencatatan yang valid dan dapat dicek melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banten yaitu tanggal minutasasi dan tanggal pengiriman berkas yang waktunya tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan SEMA No 1 tahun 2011. Jika berdasarkan SOP 356/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang SOP Penyelesaian Perkara Pidana PT pengiriman salinan putusan perkara pidana tidak melebihi waktu 4 (empat) hari. Berikut rincian jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Tabel 31. Data Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Putusan Perkara Pidana	Jumlah Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu (Sejak tanggal putus banding)		Jumlah Putusan yang dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan yang dikirim Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
			0-4 hari	>4 hari			
1	Januari	12	12	-	12	-	100%
2	Februari	14	14	-	14	-	100%
3	Maret	14	14	-	14	-	100%
4	April	17	17	-	17	-	100%
5	Mei	16	16	-	16	-	100%
6	Juni	7	6	1	7	-	100%
7	Juli	15	15	-	15	-	100%
8	Agustus	15	15	-	15	-	100%
9	September	11	11	-	11	-	100%
10	Oktober	16	16	-	16	-	100%
11	November	13	13	-	13	-	100%
12	Desember	18	18	-	18	-	100%
	Total	168	167	1	168	-	100%

Sumber data : Dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banten diolah dalam aplikasi excel.

Pada tabel di atas terlihat bahwa pengiriman salinan putusan perkara pidana dari bulan Januari s.d Desember 2023 ke Pengadilan Pengaju sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas waktu, masih sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 (kurang dari 14 hari kerja).

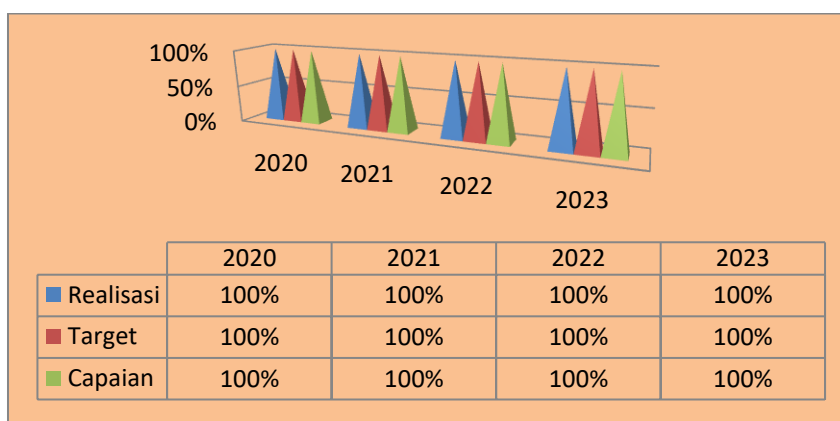
SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP nomor 356/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana PT.

Bahwa berdasarkan SOP tersebut bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana tidak melebihi waktu 4 hari (sejak sidang pengucapan putusan sampai dengan pengiriman berkas ke PN Pengaju). Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan data SIPP untuk pengiriman salinan putusan perkara pidana di tahun 2023 yaitu terdapat 168 salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa dengan total 168 salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju hanya terdapat 1 perkara pidana yang melebihi 4 hari (ketentuan berdasarkan SOP), yaitu pada perkara nomor 71/PID.SUS/2023/PTBTN dimana jangka waktu pengirimannya adalah 5 hari, namun masih dikatakan tepat waktu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. SOP penyelesaian perkara pidana PT ini sangat mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Grafik 6. *Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2020 s.d 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten*



Pengiriman salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Banten secara berturut – turut dari tahun 2020 s.d 2023 selalu 100% ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen dalam mendukung sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Tabel 32. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Pidana	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	168	168	100%	100%	100%
2022	122	122	100%	100%	100%
2021	172	172	100%	100%	100%
2020	154	154	100%	100%	100%

Pencapaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 sebesar 100%, dikategorikan berkualitas sangat baik.

Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik.

Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan dalam proses penyelesaian perkara yaitu saat putusan di tandatangani, dihari yang sama pertimbangan dan putusnya langsung diinput pada SIPP, serta langsung diminutasi, selanjutnya bagian Kepaniteraan Muda Pidana langsung menyiapkan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju dihari yang sama.

Pencapaian pada indikator ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Banten telah mencapai sasaran strategis 2 yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran Strategis 2

Indikator 3 : Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor dan perkara anak) yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim pada tahun berjalan.

Adapun pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus ke Pengadilan Pengadu mengacu pada :

1. Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara;
2. SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan;
4. SOP Penyelesaian perkara Nomor : 355/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tingkat Banding;
5. SOP Penyelesaian perkara Nomor 357/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding.

Adapun formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi persentase capaiannya berarti semakin baik kinerjanya, sebaliknya jika semakin rendah persentase capaiannya berarti semakin buruk kinerjanya.

Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara pidana sebanyak 62 perkara (terdiri dari 14 perkara anak dan 48 perkara tipikor) dan sebanyak 62 putusan perkara pidana khusus tersebut dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara manual melalui aplikasi excel dengan data yang diambil dari aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten.

Pengukuran indikator ini juga dilakukan dengan pencatatan yang valid dan dapat dicek melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banten yaitu tanggal minutasi dan tanggal pengiriman berkas yang waktunya tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2011, sedangkan berdasarkan SOP Penyelesaian perkara pidana anak tidak melebihi waktu 4 hari, dan SOP Penyelesaian perkara tipikor tidak melebihi 14 hari. Berikut rincian jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Tabel 33. Data Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus	Jumlah Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu (Sejak tanggal putus banding)		Jumlah Putusan yang dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan yang dikirim Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
			0-14 hari	>14 hari			
1	Januari	9	9	-	9	-	100%
2	Februari	8	8	-	8	-	100%
3	Maret	13	13	-	13	-	100%
4	April	3	3	-	3	-	100%
5	Mei	2	2	-	2	-	100%
6	Juni	10	10	-	10	-	100%
7	Juli	0	0	-	0	-	100%
8	Agustus	3	3	-	3	-	100%
9	September	6	6	-	6	-	100%
10	Oktober	4	4	-	4	-	100%
11	November	2	2	-	2	-	100%
12	Desember	2	2	-	2	-	100%
Total		62	62	-	62	-	100%

Sumber data : Dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banten diolah dalam aplikasi excel.

Pada tabel di atas terlihat bahwa pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus dari bulan Januari s.d Desember 2023 ke Pengadilan Pengaju sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas waktu sehingga capaian untuk indikator ini mencapai 100% artinya Pengadilan Tinggi Banten berkinerja Baik.

Pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Banten secara berturut – turut dari tahun 2020 s.d 2023 selalu 100% ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen dalam mendukung sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

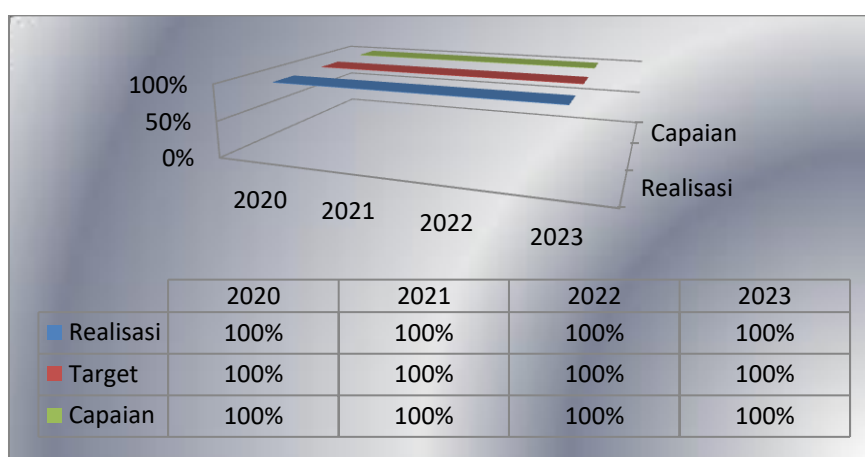
SOP yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah SOP nomor 357/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara tipikor tingkat banding dan SOP nomor 355/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara anak tingkat banding yaitu

tidak melebihi 4 hari untuk perkara pidana anak dan tidak melebihi 14 hari untuk perkara tipikor.

Berdasarkan data SIPP untuk pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus di tahun 2023 yaitu terdapat 62 salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, yaitu pengiriman salinan putusan tipikor sebanyak 48 berkas dikirim tidak melebihi 14 hari, dan pengiriman salinan putusan pidana anak sebanyak 14 berkas dikirim tidak melebihi 4 hari SOP nomor 357/DJU/OT.01.3/3/2022 dan SOP nomor 355/DJU/OT.01.3/3/2022 sangat mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Pencapaian kinerja baik ini juga didukung dengan adanya beberapa kegiatan seperti monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala juga selalu di bahas dalam pembinaan Pimpinan saat pembahasan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja bulanan.

Grafik 7. *Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2020 s.d 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten*



Tabel 34. *Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu*

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	62	62	100%	100%	100%
2022	33	33	100%	100%	100%
2021	8	8	100%	100%	100%
2020	12	12	100%	100%	100%

Data diolah dari Aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Banten

Pencapaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 sebesar 100%, dikategorikan berkualitas sangat baik.

Capaian ini didukung oleh adanya upaya : tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Staf pendukung dalam melaksanakan kebijakan, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik.

Selain upaya diatas untuk mengantisipasi hambatan dan mempertahankan capaian pada indikator kinerja ini Pimpinan membuat kebijakan dalam proses penyelesaian perkara yaitu saat putusan di tandatangani, dihari yang sama pertimbangan dan putusannya langsung diinput pada SIPP, serta langsung diminutasi, selanjutnya bagian Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Tipikor langsung menyiapkan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju dihari yang sama.

Pencapaian pada indikator ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Banten telah mencapai sasaran strategis 2 yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Tabel 35. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Banten pada Sasaran Strategis 2

NO	Sasaran	Indikator	Target Jangka Menengah	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Matrik Renstra dan Capaian Kinerja tahun 2023

Target jangka menengah pada tabel di atas merupakan target tahun terakhir (2024) pada reuiu matriks renstra 2020-2024 yang disusun pada bulan Januari 2023. Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara target tahun 2023, realisasi, capaian dengan target jangka menengah.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) Indikator pada sasaran strategis 2 yaitu Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dimana target dan capaian pada tahun 2023 mencapai 100% sama dengan target jangka menengah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Tabel 36. Data Rata-Rata Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi Lingkup Peradilan Umum Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian Per Indikator	Capaian Pengadilan Tinggi Banten
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100,79%	100%
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	101,72%	100%
		3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100,65%	100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 2			101,05%	100%

Sumber data dari Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum sebanyak 32 Satker dari 34 Satker yang ada setara dengan 94,12% (terlampir dalam laporan ini).

Dari tabel capaian kinerja nasional pada Pengadilan Tinggi lingkup Peradilan Umum tahun 2023 di atas bahwa Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 untuk sasaran strategis 2 yaitu Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara masih dibawah Capaian Rata-Rata Nasional.

Meskipun capaian Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 masih berada di bawah skala Nasional, Pengadilan Tinggi Banten tetap berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut dengan kategori Baik yaitu 100%.

Tabel 37. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi dengan kategori 301-1000 perkara untuk Sasaran strategis 2

No	Satua Kerja	Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara								
		Indikator								
		Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PT Banda Aceh	99	100	101,01%	99	100	101,01%	99	100	101,01%
2	PT Mataram	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
3	PT Denpasar	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
4	PT Riau	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
5	PT Jambi	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
6	PT Banjarmasin	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
7	PT Manado	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
8	PT Tanjung Karang	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
9	PT Kalimantan Timur	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
10	PT Pontianak	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
11	PT Maluku Utara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
12	PT Kupang	90	100	111,11%	90	95,98	106,64%	90	92,86	103,18%
13	PT Padang	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
Rata – Rata		99,2	99,69	100,59%	99,2	100	100,93%	99,2	99,45	100,32%
	PT Banten	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%

Sumber data dari Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum sebanyak 32 Satker dari 34 Satker (terlampir dalam laporan ini).

Dari tabel 37 di atas untuk sasaran strategis 2 perbandingan dengan Satuan Kerja dengan kategori Pengadilan 301 – 1000 perkara (berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Tinggi), terlihat bahwa Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 masih dibawah rata-rata 13 Pengadilan di atas.

Jika dianalisa pada data di atas, maka capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten untuk sasaran stragetis 2 ini sama 11 (sebelas) Pengadilan Tinggi dengan kategori yang sama dengan Pengadilan Tinggi Banten, yaitu 301-1000 perkara. Hanya 2 (dua) Pengadilan Tinggi yang memiliki capaian diatas 100% dikarenakan Pengadilan Tinggi Banten menetapkan target sebesar 100%, sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menetapkan target sebesar 99% dan Pengadilan Tinggi Kupang menetapkan target sebesar 90%.

Meskipun capaian untuk sasaran strategis 2 (dua) Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata 13 Pengadilan di atas, Pengadilan Tinggi Banten tetap berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut dengan kategori Baik yaitu 100%. Komitmen ini juga di ikuti oleh beberapa kebijakan pimpinan, kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara periodik.

C. KINERJA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai 2 pagu anggaran antara lain Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) dan Dipa 03 (Dirjen Badilum). Kinerja realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 akan di jabarkan dibawah ini :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2023 Nomor SP : DIPA-005-01.2.663398/2023 tanggal 30 November 2022 bahwa Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 sebesar Rp24.941.516.000 (*Dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah*). Dipa 01 ini mengalami perubahan sehingga pagu anggaran menjadi Rp24.419.570.000 (*dua puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang akan digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 38. Perubahan Anggaran Dipa 01 Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Awal	Penambahan	Pengurangan	Pagu Akhir 2023
Belanja Pegawai	21.915.732.000	300.000.000	1.000.000.000	21.215.732.000
Belanja Barang	3.025.784.000	107.770.000	29.716.000	3.103.838.000
Belanja Modal	0	100.000.000	0	100.000.000
Total	24.941.516.000	507.770.000	29.716.000	24.419.570.000

Data diolah dari aplikasi OM SPAN dan SAKTI

Perubahan pagu anggaran tersebut dikarenakan revisi kekurangan/kelebihan belanja pegawai, belanja barang berupa pengurangan anggaran Bimtek oleh Eselon 1 dan penambahan pagu sewa rumah dinas hakim serta belanja barang lainnya serta penambahan belanja sarana dan prasarana kantor.

Penyesuaian anggaran diatas mempengaruhi pencapaian kinerja pada sasaran strategis 1 dan strategis 2, karena Dipa 01 (Dukungan Manajemen) merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten yang dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dari pagu Dipa (01) Badan Urusan Admiistrasi sebesar Rp24.419.570.000 tersebut telah terealisasi sebesar Rp23.928.238.307 atau sebesar 97,99%. Realisasi

ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten secara optimal dalam penyerapan anggaran dan berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran yang di tetapkan. Adapun realisasi pagu Dipa (01) Badan Urusan Administrasi ini meliputi :

1. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp21.215.732.000 (*Dua puluh satu miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) meliputi biaya gaji dan tunjangan dan uang makan.

2. Belanja Barang

Pagu belanja barang tahun 2023 sebesar Rp3.103.838.000 (*Tiga miliar seratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang digunakan untuk pembelian atau pengeluaran barang atau jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

3. Belanja Modal

Pagu belanja modal tahun 2023 sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah), digunakan untuk pengeluaran atau pembelian untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal tahun 2023 ini diperuntukan untuk pembelian peralatan dan mesin (*Meubelair kantor*).

Tabel 39. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REAL	SISA PAGU (Rp)	% SISA
1.	Belanja Pegawai	21.215.732.000	20.767.022.851	97,89%	448.709.149	1,11%
2.	Belanja Barang	3.103.838.000	3.061.215.456	98,63%	42.622.544	1,37%
3.	Belanja Modal	100.000.000	100.000.000	100%	0	100%
TOTALSISA PAGU		24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%	491.331.693	2,01 %

Sumber data : dari aplikasi Om SPAN SAKTI

Adapun gambaran perbandingan realisasi anggaran Dipa 01 dari tahun 2020 sampai dengan 2023 akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 40. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2020 s.d 2023

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	
1	2023	24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%	491.331.693	2,01%	
2	2022	24.815.678.000	24.620.084.826	99,21%	195.593.174	0,79%	
3	2021	23.506.837.000	23.272.059.677	99,00%	234.777.323	1,00%	
4	2020	25.913.880.000	25.438.833.288	98,17%	475.046.712	1,83%	

Sumber data : dari aplikasi Om SPAN SAKTI

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Banten dari tahun 2020 s.d 2023 berturut-sebesar 98.17%,99%,99.21% dan 97.99%,% ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan anggaran secara optimal.

Penyerapan anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 adalah sebesar 97,99% dimana penggunaannya sebagai dukungan manajemen peradilan dalam mencapai sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Banten.

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2023 Nomor SP : DIPA-005-01.2.663399/2023 tanggal 30 November 2022 bahwa Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran DIPA 03 sebesar Rp176.444.000 (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada bulan November 2023 mendapatkan anggaran tambahan menjadi Rp216.444.000 (*Dua ratus enam belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), anggaran ini meliputi belanja barang pada DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional proses penyelesaian perkara.

Penyesuaian pagu anggaran dilakukan karena adanya kekurangan pagu anggaran untuk pengiriman surat penahanan, pencatatan register banding (penggandaan dan penjilidan berkas perkara serta ATK), minutasi, pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Pengaju.

Penyesuaian anggaran tersebut mendukung pencapaian beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Sasaran Kinerja 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator :
 - a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.
2. Sasaran strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator :
 - a. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
 - b. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Penyerapan anggaran Dipa 03 Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 adalah sebesar 98,76% dimana penggunaannya untuk mencapai sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Banten.

Tabel 41. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2023

No	Jenis Belanja (Rincian Output)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa
1	Percepatan Penyelesaian Perkara	85.000.000	84.670.000	99,61%	330.000	0,39%
2	Perkara Pidana yang Diselesaikan di tingkat Banding di wilayah Barat	104.504.000	102.480.746	98,06%	2.023.254	1,94%
3	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di tingkat Banding di wilayah Barat	26.940.000	26.614.985	98,79%	325.015	36,77%
	Jumlah	216.444.000	213.765.731	98,76%	2.678.269	1,24%

Sumber data : dari aplikasi Om SPAN SAKTI

Adapun gambaran perbandingan realisasi anggaran Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) Pengadilan Tinggi Banten dari tahun 2020 sampai dengan 2023 akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 42. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2020 s.d 2023

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2023	216.444.000	213.765.731	98,76%	2.678.269	1,23%
2	2022	242.245.000	239.460.385	98,85%	2.784.615	1,15%
3	2021	260.715.000	256.346.940	98,32%	4.368.069	1,68%
4	2020	217.890.000	191.388.170	87,84%	26.501.830	12,16%

Sumber data : dari aplikasi Om SPAN SAKTI

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Banten dari tahun 2020 s.d 2023 berturut-sebesar 87.84%,98.32%,98.85% dan 98.76%,% ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan anggaran secara optimal, hanya pada tahun 2020 realisasi anggaran dibawah 90% tetapi masih kategori Baik.

Penyerapan anggaran Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 adalah sebesar 98,76% dimana penggunaannya sebagai program

penegakan dan pelayanan hukum dalam mencapai sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Banten.

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Anggaran Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 yang terdiri dari Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) dan Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) dimana kedua anggaran tersebut digunakan dalam rangka mendukung tercapainya masing-masing indikator pada sasaran strategis dengan penjelasan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen (Dipa 01) sebesar Rp24.419.570.000 (*Dua puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dengan kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional kantor.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Dipa 03) dengan pagu sebesar Rp216.444.000 dengan kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum.
3. Adapun 2 (dua) program dan kegiatan ini mendukung tercapainya indikator pada:
 - Sasaran strategis 1 “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan 5 (lima) indikator yaitu:
 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 5. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.
 - Sasaran strategis 2 “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, dengan 3 (tiga) indikator yaitu :
 1. Persentase pengiriman salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
 2. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
 3. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;

Tabel 43. Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 Dalam Mendukung Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi			Sasaran strategis 1					Sasaran strategis 2		
			Rp	Rp	%	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 1	Ind 2	Ind 3	
1	Program Dukunga Manajemen (Dipa 01)	Belanja Gaji dan Tunjangan	21.215.732.000	20.767.022.851	97,89%	√	√	√	√		√	√	√	
		Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.068.405.000	3.026.142.031	98,67%	√	√	√	√		√	√	√	
		Belanja Dukungan Manajemen Non Operasional Satker	35.433.000	35.073.425	98,99%	√	√	√	√		√	√	√	
		Belanja Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100.000.000	100.000.000	100%					√	√	√	√	
Jumlah Realisasi Dipa 01			24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%									
Rata-Rata Realisasi Sasaran strategis 1					100%									
Analisis Efisiensi					EFISIEN									
Rata-Rata Realisasi Sasaran strategis 2					100%									
Analisis Efisiensi					EFISIEN									
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Dipa 03)	Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Adm Tingkat BandIng	85.000.000	84.670.000	99,61%	√	√	√	√	√				
		Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat banding	104.504.000	102.480.746	98,21%		√	√				√	√	
		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat banding	26.940.000	26.614.985	98,79%			√					√	
Jumlah Realisasi Dipa 03			216.444.000	213.765.731	98,76%									
Rata-Rata Realisasi Sasaran Strategis 1					100%									
Analisis Efisiensi					Efisien									
Rata-Rata Realisasi Sasaran Strategis 2					100%									
Analisis Efisiensi					Efisien									

KETERKAITAN ANGGARAN DAN PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI BANTEN

1. PERKARA PERDATA

Dalam rangka penyelesaian perkara perdata, biaya yang digunakan berasal dari biaya proses yang disetorkan oleh pihak yang berperkara sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yaitu pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding adalah sebesar Rp150.000,00/perkara. Untuk rinciannya disebutkan dalam pasal 5.

Bahwa kebijakan mengenai biaya proses di Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023, terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/78/KPT/SK/KP.01/5/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan pengelola biaya proses dan rincian besaran biaya proses pada Pengadilan Tinggi Banten. Pengelola biaya proses di Pengadilan Tinggi Banten adalah Panitera. Ada pun rincian biaya proses di Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut :

Tabel 44. Daftar Rincian Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Banten

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	Biaya proses ditetapkan Ketua MA RI	150.000	
1.	Meterai		10.000
2.	Redaksi		10.000
3	ATK		26.000
4..	Pengadaan salinan putusan		4500
5.	Pengiriman pemberitahuan nomor registrasi ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu.		60.000
6.	Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara pengarsipan biaya penyelesaian perkara		22.500
7.	Insentif tim pengelola biaya proses		13.000
8.	Monitoring dan evaluasi		4.000
	Total	150.000	150.000

Terkait penetapan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), nilai tersebut dianggap terlalu kecil. Sebab banyak kendala yang dihadapi diantaranya, yaitu:

- 1) Terdapat beberapa berkas perkara perdata yang diajukan banding oleh Pengadilan Negeri Pengaju (sudah dikirim ke tingkat banding) ternyata tidak lengkap sehingga harus dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Pengaju untuk dilengkapi terlebih dahulu sebelum mendapatkan nomor register banding. Pengiriman kembali berkas yang tidak lengkap tersebut ke Pengadilan Pengaju menggunakan jasa pengiriman surat berbayar yang besarnya tergantung dari tebal tipisnya berkas perkara.
- 2) Terdapat pula perkara perdata banding yang telah putus dan berkasnya harus dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengiriman tersebut lebih besar dari standar/ ketentuan yang telah disebutkan di atas (tabel 44 poin 5).

Adapun rincian biaya proses perkara tingkat banding pada buku kas umum tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45. Rincian Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Saldo awal tahun 2023 (1 Januari 2023) sisa perkara tahun 2022 sebanyak 13 perkara.	2.613.500	-
Perkara perdata masuk tahun 2023 (332 x @Rp150.000,00)	49.800.000	-
Perkara perdata putus tahun 2023 (333 perkara)	-	51.487.000
Saldo akhir tahun 2023 (31 Desember 2023) 12 perkara belum putus	926.000	

Berdasarkan tabel 45 di atas, bahwa saldo awal tahun 2023 sebesar Rp2.613.500 merupakan uang panjar perkara untuk berkas yang sudah diregister dan uang panjar perkara yang sudah disetor oleh Pengadilan Negeri Pengaju tetapi berkasnya belum lengkap.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 bahwa data keadaan perkara perdata banding sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun lalu (tahun 2022) : 13 perkara
- Perkara masuk : 332 perkara
- Perkara yang diputus : 333 perkara
- Sisa perkara tahun 2023 : 12 perkara

Saldo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp926.000 dialokasikan untuk penyelesaian perkara perdata yang belum diputus ditahun 2023 sebanyak 12 perkara.

2. PERKARA PIDANA BIASA DAN ANAK

Anggaran dalam penyelesaian perkara pidana biasa dan anak tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten mendapat anggaran dari Dipa 03 Dirjen Badan Peradilan Umum sebesar Rp74.004.000 dengan target penyelesaian perkara pidana biasa dan anak sebanyak 134 perkara dan pada bulan November tahun 2023 mendapat tambahan anggaran menjadi Rp105.504.000 dengan banyaknya target 190 perkara yang diselesaikan tahun 2023.

Data dari aplikasi SIPP bahwa sampai tanggal 01 November 2023 perkara pidana biasa dan anak yang diselesaikan sebanyak 151 perkara, jumlah ini sudah melebihi target perkara yang ditetapkan dalam anggaran penyelesaian perkara pidana dan anak sebanyak 134 perkara, selain realisasi perkara putus sudah melebihi target perkara, penambahan anggaran ini disebabkan karena pembelian box arsip perkara dan akun lainnya yang mendukung penyelesaian perkara pidana biasa dan anak di tahun 2023. Adapun keadaan perkara dijelaskan dibawah ini :

Keadaan Perkara Pidana pada bulan Tahun 2023 sbb :

- Sisa perkara tahun lalu 2022 = 6 perkara (6 perkara pidana biasa + 0 anak)
- Perkara Masuk tahun 2023 = 193 perkara (178 perkara pidana biasa + 15 Anak)
- Perkara Putus tahun 2023 = 182 perkara (168 perkara pidana biasa + 14 Anak)
- **Sisa perkara tahun 2023 sebanyak = 17 perkara (16 perkara biasa dan 1 perkara anak)**

Persentase Capaian Penyelesaian Perkara = $\frac{\text{perkara putus}}{\text{target perkara}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{182 \text{ perkara}}{157 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 116 \% \end{aligned}$$

Presentasi Capaian Penyelesaian Perkara 116% > Presentase Realisasi Anggaran Perkara Pidana 98,06% sehingga disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Banten dinyatakan EFISIEN

3. PERKARA PIDANA TIPIKOR

Anggaran dalam penyelesaian perkara pidana tipikor tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten mendapat anggaran dari Dipa 03 Dirjen Badan Peradilan Umum sebesar Rp17.440.000 dengan banyaknya target perkara 23 perkara tipikor dan pada bulan November 2023 mendapat tambahan anggaran menjadi Rp26.940.000 dengan banyaknya target 40 perkara yang diselesaikan tahun 2023.

Data dari aplikasi SIPP bahwa sampai tanggal 01 November 2023 perkara pidana korupsi yang diselesaikan sebanyak 44 perkara, jumlah ini sudah melebihi target perkara yang ditetapkan dalam anggaran penyelesaian perkara tipikor sebanyak 40 perkara, selain realisasi perkara putus sudah melebihi target perkara, penambahan anggaran ini disebabkan karena pembelian ATK dan akun lainnya yang mendukung penyelesaian perkara pidana biasa dan anak di tahun 2023.

Keadaan Perkara Korupsi Tahun 2023 sbb :

- Sisa perkara tahun lalu (2022) = 5 perkara
- Perkara Masuk tahun 2023 = 44 perkara
- Perkara Putus tahun 2023 = 48 perkara
- **Sisa perkara tahun 2023 = 1 perkara**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Penyelesaian Perkara} &= \frac{\text{perkara putus}}{\text{target perkara}} \times 100\% \\ &= \frac{48 \text{ perkara}}{40 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{120\%}\end{aligned}$$

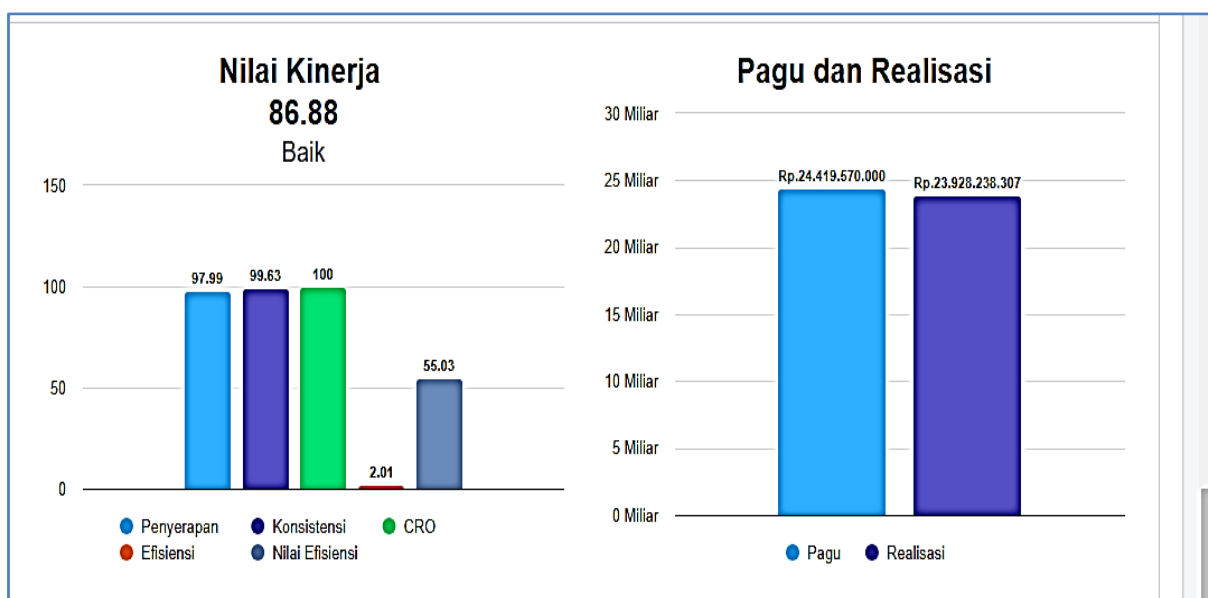
Presentasi Capaian Penyelesaian Perkara Tipikor 120% > Presentase Realisasi Anggaran Perkara Pidana Tipikor 98,79 % sehingga disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Banten dinyatakan EFISIEN

Demikianlah dijelaskan keterkaitan pelaksanaan anggaran dengan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Banten diluar anggaran lain dari Program Dukungan Manajemen (Dipa 01).

Dari kedua anggaran yang terima oleh Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2023, bisa memberikan dukungan dalam proses tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dan terlaksananya sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Banten.

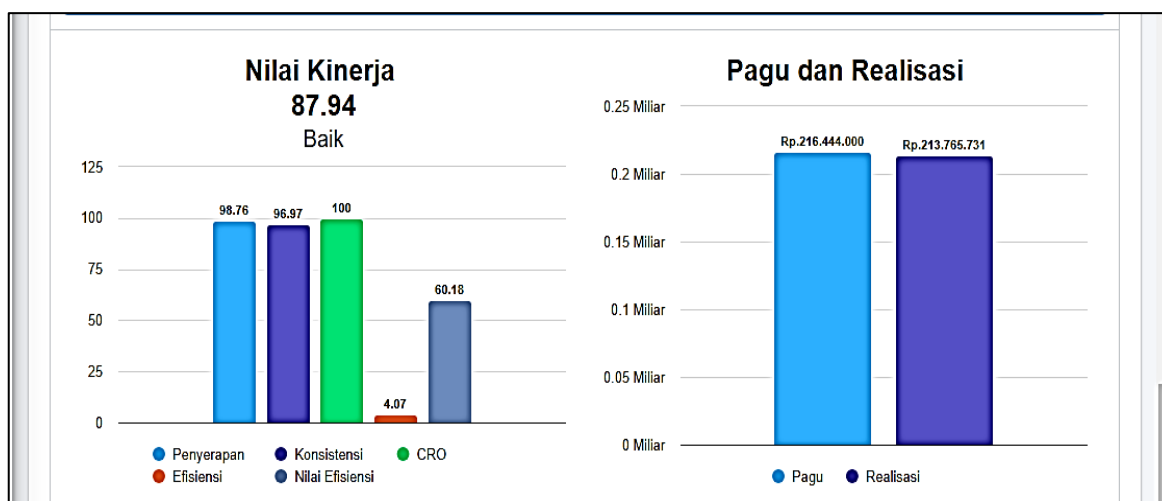
Dari penjelasan – penjelasan di atas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten baik Capaian Kinerja Fisik (Penanganan Penyelesaian Perkara)/ *Core Bussines* dan capaian kinerja anggaran semua dikategorikan **BAIK**.

Gambar 10. Capaian Kinerja Anggaran Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)



Data diolah dari aplikasi Smart Kemenku

Gambar 11. Capaian Kinerja Anggaran Dipa 03 (Badan Peradilan Umum)



Data diolah dari aplikasi Smart Kemenku



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI

KESIMPULAN

Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana dan perdata (sesuai prosedur).

Pengadilan Tinggi Banten melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja secara berkala selama tahun 2023. Dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut Pengadilan Tinggi Banten memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi e-SAKIP pada Komdanas Mahkamah Agung RI dan pengumpulan data / informasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Banten berpedoman pada SOP Nomor : 11/KPT.W29-U/OT1.2/IX/2023 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023 menyajikan capaian dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran 5 (lima) indikator pada sasaran strategis 1 “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” dan 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis 2 “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”.

Pencapaian rata-rata dari kesemua indikator pada setiap sasaran strategis dinyatakan berhasil/baik, karena memperoleh rata-rata capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” sebesar 100% dan capaian rata-rata pada sasaran strategis 2 “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” sebesar 100%. Pencapaian kedua sasaran strategis didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan pimpinan, pengawasan berjenjang, kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik, peningkatan sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana lainnya.

Selain faktor pendukung di atas, terdapat faktor pendukung berupa anggaran yang disediakan berupa Anggaran Program Dukungan Manajemen Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp24.419.570.000 (*Dua puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar 97,99%. Selain itu juga didukung dengan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp216.444.000 (*Dua ratus enam belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar 98,76%.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023, terdapat beberapa penyesuaian strategi yang telah dilakukan (yang dipengaruhi oleh hasil pengukuran kinerja baik hasil pengukuran bulanan maupun satu tahun) sebagai berikut :

No.	Penyesuaian strategi yang telah dilakukan	IKU yang capaiannya didukung oleh penyesuaian strategi
1.	Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan dan menghindari praktik KKN, pungutan liar dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan. Dilakukan briefing PTSP setiap hari Senin pagi untuk memonev pelaksanaan PTSP. Serta dilakukan pembaruan/ renovasi ruang tunggu bagi pencari keadilan sehingga menjadi lebih nyaman.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu Hal ini dilakukan dengan penerapan SOP penyelesaian perkara secara optimal. Adapun SOP yang digunakan yaitu SOP Nomor 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara perdata, SOP Nomor 355/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana anak tingkat banding, SOP Nomor 356/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana PT dan SOP Nomor 357/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang penyelesaian perkara pidana korupsi tingkat banding.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
3.	Pembatasan perkara kasasi kasasi melalui upaya memberikan kualitas putusan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Dengan demikian diharapkan	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

	<p>mereka menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi.</p> <p>Dan penyesuaian target kinerja IKU Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk tahun 2024 pada matriks Reviu Renstra, yaitu dari sebelumnya 52% menjadi 45%.</p>	
4.	<p>Proses berperkara yang sederhana dan murah untuk perkara pidana dan tipikor. Bahwa untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dibiayai dari anggaran DIPA 03, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Bahwa untuk DIPA 03 ini telah dilakukan beberapa kali revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara pidana dan tipikor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
5.	<p>Proses berperkara yang sederhana dan murah untuk perkara perdata. Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata dibiayai dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp150.000 per perkara. Dengan biaya yang minim ini, Pengadilan Tinggi Banten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penanganan perkara perdata. Diantaranya memberikan pelayanan pengiriman salinan putusan tepat waktu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

6.	Keberlanjutan e-Court Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
7.	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan Yaitu dengan pelaksanaan pembinaan oleh pimpinan, juga pembinaan melalui bimtek tenaga teknis.	Seluruh IKU
8.	Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang dan penerapan rapat berjenjang. Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten maksimal 2 (dua) kali setahun	Seluruh IKU
9.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. Transparansi pengelolaan SDM dengan adanya berbagai kesempatan bagi aparatur pengadilan yang ingin mengikuti diklat online, baik teknis maupun nonteknis. Transparansi keuangan dengan menampilkan data DIPA Pengadilan Tinggi Banten di website. Dan	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

transparansi pengelolaan aset melalui pengelolaan hibah BMN jika ada hibah BMN untuk Pengadilan Tinggi Banten	
---	--

Selain penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja, Pengadilan Tinggi Banten juga melakukan penyesuaian kebijakan (peraturan internal) antara lain sbb:

No.	Penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan	IKU yang capaiannya didukung oleh penyesuaian kebijakan
1.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/120/KPT/SK/KP.03.1/11/2022 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Banten.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. ➤ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. ➤ Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.
2.	SOP Nomor : 11/KPT.W29-U/OT1.2/IX/2023 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. ➤ Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan. ➤ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. ➤ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. ➤ Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

REKOMENDASI

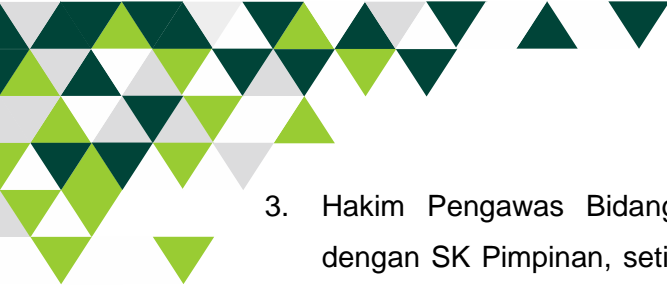
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2023 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya salah satu indikator pada sasaran strategis 1 “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” yaitu indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan ini ditahun mendatang, maka Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan melakukan beberapa upaya rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses menghasilkan putusan yang baik dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penguatan pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal.
3. Penguatan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik.
4. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik antar seluruh ASN Peradilan di Pengadilan Tinggi Banten, masyarakat maupun instansi penegak hukum lainnya yang ada di wilayah Provinsi Banten.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

Dari beberapa rekomendasi disebutkan diatas, maka akan dilaksanakan beberapa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebagai berikut ;

1. Memberikan pembinaan, bimtek, sosialisasi, seminar atau pelatihan dalam proses penyelesaian perkara kepada Sumber Daya Manusia yang berkaitan dalam menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Pimpinan Membuat SK Hakim Pengawas Bidang (internal), SK Hakim Pengawas Daerah (eksternal), membuat perencanaan pengawasan, melaksanakan pembinaan sebanyak 2 kali dalam satu tahun yang telah dianggarkan dalam DIPA Pengadilan Tinggi Banten.

- 
3. Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan SK Pimpinan, setiap bulan melaksanakan pengawasan bulanan ke setiap bagian dalam rangka monitoring dan evaluasi tupoksi dari setiap bagian.
 4. Hakim Pengawas Daerah sesuai SK yang dibuat Pimpinan melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten sebanyak 2 kali dalam satu tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tupoksi dari setiap bagian di Pengadilan Negeri tersebut.
 5. Melaksanakan rapat koordinasi bulanan antara Pimpinan, Hakim Tinggi dan seluruh pegawai, serta rapat koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Banten dengan unsur Pimpinan Pengadilan Negeri sewilayah Banten (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris).
 6. Mengusulkan belanja modal sarana dan prasarana kantor Pengadilan Tinggi Banten dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Akhirnya, semoga LKJIP Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya dan Pengadilan Tinggi Banten pada khususnya



LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023
Lampiran 2	Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama
Lampiran 3	Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Lampiran 4	Revisi Rencana Kinerja Tahun 2023
Lampiran 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 6	SOP Penyelesaian Perkara Perdata
Lampiran 7	SOP Penyelesaian Perkara Pidana
Lampiran 8	SOP Penyelesaian Perkara Tipikor
Lampiran 9	SOP Penyelesaian Perkara Anak
Lampiran 10	SOP Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi
Lampiran 11	SOP Pengumpulan Data Kinerja
Lampiran 12	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 13	Pengukuran Capaian Kinerja Secara Berkala Tahun 2023
Lampiran 14	Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi PKT Tahun 2023
Lampiran 15	Data Perkara Perdata yang diputus tahun 2023
Lampiran 16	Data Perkara Pidana Biasa yang diputus tahun 2023
Lampiran 17	Data Perkara Pidana Anak yang diputus tahun 2023
Lampiran 18	Data Perkara Tipikor yang diputus tahun 2023
Lampiran 19	Analisis Efisiensi Sasaran Stategis 1 dan Sasaran Stategis 2
Lampiran 20	Ceklist Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023
Lampiran 21	Rekapan Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023
Lampiran 22	Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Banten
Lampiran 23	Hasil Inventarisir LKjIP Tahun 2023 Wilayah Pengadilan Tinggi Banten



LAMPIRAN 1

SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2023



PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR 8/KPT.W29-U/SK.RA1.3/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Promosi dan Mutasinya Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten menjadi Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin maka dipandang perlu menunjuk kembali Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pegadilan Tinggi Banten.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun Tahun 2005 tentang Kepaniteran Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatab Peradilan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024;

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/35/KPT/SK/KP.01.04/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan kepentingan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 8 Januari 2024



TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H.
2	Koordinasi Validasi Data	Muhtar, S.H.,M.H.
3	Ketua	Budi Wantoro, S.H., M.H.
4	Sekretariat	1. Sri Dian Gunarsih, S.H.,Ak 2. Yeni Yuliyani, S.E. 3. Akhmad Fadilah Robiullani,S.E.
5	Anggota	1. Tri Widodo, S.H.,M.H. (Panitera Muda Pidana Pidana)
		2. Christanto Pudjiono, S.H.,M.H. (Panitera Muda Hukum)
		3. Erwin Effendi Loeis, S.E.,S.H.,M.H. (Panitera Muda Tipikor)
		4. Drs. Idris Pasluni (Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga)
		5. Indra Bayu Segoro, S.Kom. (Kasubbag Kepegawaian & TI)
		6. Nurfitri, S.Kom (Kasubbag Keuangan & Pelaporan)
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Ahmad Rivai, S.H.,M.H. (Hakim Pengawas Sub Bagian RPA) 2. Irdalinda, S.H.,M.H. (Hakim Pengawas Sub Bagian RPA) 3. Herry Setiyawan, S.T. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian)

 Ditandatangani Secara Elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

ANDRIANI NURDIN



TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan data Kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinir pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinir Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Banten
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

 Ditandatangani Secara Elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,
ANDRIANI NURDIN 





LAMPIRAN 2

Matriks Reviu
Indikator Kinerja Utama

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Khusus untuk perkara anak di tingkat banding penyelesaian tepat waktu adalah 42 hari sesuai Keputusan Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Index persepsi kepuasan <i>stakeholder</i> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Hasil Survey IKM

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua,



ANDRIANI NURDIN



Lampiran 1

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
(Januari 2023)**

- Instansi** : **Pengadilan Tinggi Banten**
- Visi** : Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten
- Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biaya penyelesaian perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding.									
					b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%								Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
					c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	23	perkara	5.380	9.825	23.425	16.940	18.410

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN (Januari 2023)**

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
					d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41%	50%	51%	52%											
					e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89,34	90,12	90,9	90,5	90,5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis	1	kegiatan	55.000	77.00	55.000	85.000	97.630	
										Terlaksananya Bimtek Tenaga Teknis			-	-	42.790	77.900	73.800	-	141.650		
										Terlaksananya Bimtek PNBPN			-	-	-	2.870	14.400	-	-		
										Program Dukungan Manajemen	(1). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terlaksananya layanan umum berupa Bimtek dan pengadaan ekstrakomptabel	1	layanan	124.186	36.046	104.345	65.149	474.600		
												Terlaksananya layanan perkantoran (gaji, tunjangan dan operasional)	1	layanan	25.166.693	23.426.791	24.462.333	24.876.367	27.757.664		
										(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	-	-	623.001	44.000	249.000	-	10.066.511		



REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Serang, 29 Agustus 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 19 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak Pertama,



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Kegiatan:

Anggaran :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 24.941.516.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | - |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 176.444.000,- |

Serang, 19 Januari 2023

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI,

Ketua Pengadilan Tinggi Banten


H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.


Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.



LAMPIRAN 6

SOP PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	354/DJU/OT.01.3/3/2022
TGL. PEMBUATAN	12 Desember 2018
TGL. REVISI	11 November 2021
TGL. EFEKTIF	31 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

DASAR HUKUM :

1. *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).*
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
7. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
11. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S-3
2. S-2
3. S-1
4. SLTA

KETERKAITAN :

1. SOP PTSP
2. SOP Kesekretariatan (Umum)
3. SOP Banding Elektronik (eCourt)
4. SOP Arsip Perkara

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer, Printer dan Scanner
3. Register Perkara Perdata
4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata
5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata
6. SIPP
7. Akun Aplikasi E-Court
8. Jaringan Internet

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Buku Kegiatan
2. Buku Eskpedisi
3. Register Perkara Perdata
4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Petugas PTSP	Kasir	Meja II	Panmud Perdata	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/WKPT	Persyaratan / Perengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima berkas perkara								- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Checklist - ATK	1 jam	Tanda terima berkas perkara banding dari bagian umum		
2.	Meneliti kelengkapan berkas perkara									- Berkas Perkara - Check List - ATK	2 hari	Berkas lengkap	
3.	Menginput kelengkapan berkas perkara ke SIPP dan Memberikan nomor perkara									- Berkas Perkara - Bukti pengiriman biaya perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama - ATK - SIPP	1 jam	Berkas perkara sudah mendapatkan nomor perkara	
4.	Mencatat biaya perkara pada Buku Jurnal Keuangan Perkara									- Berkas perkara - ATK - Bukti pengiriman biaya perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama	1 jam	Biaya perkara tercatat pada jurnal keuangan perkara	
5.	Mencatat ke dalam Register									- Berkas Perkara - Formulir lainnya - SIPP - Register Induk Perkara Perdata	1 hari	data perkara tercatat dalam register	
6.	Penetapan Majelis Hakim melalui SIPP									- Berkas perkara - Formulir –formulir SIPP - ATK	3 hari	Penetapan majelis hakim	*1
7.	Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP									- Berkas perkara - Formulir –formulir SIPP - ATK	3 hari	Penunjukan panitera pengganti	*2
8.	Mencatat penetapan Majelis dan Penunjukan Panitera Pengganti Pada Register									- Register - SIPP - ATK	1 jam	Tercatat dalam Register	
9.	Menerima Berkas Perkara dan menetapkan hari sidang serta courtcalendar									Berkas perkara Penetapan majelis Penetapan PP Buku Ekspedisi Blanko penetapan	3 hari	- Tanda terima berkas perkara - Penetapan hari sidang dan courtcalendar terinput ke SIPP	*3
10.	Mempelajari berkas perkara, Musyawarah dan Menyusun Konsep Putusan.									- Berkas perkara - Buku ekspedisi antar majelis - ATK	50 hari	Konsep Putusan	
11.	Pengetikan konsep putusan dan Pengetikan Perbaikan									- Berkas perkara - ATK - Komputer	5 hari	Konsep putusan	
12.	Mengoreksi Konsep Putusan									- Berkas perkara - Pendapat majelis hakim	2 hari	Konsep putusan	
13.	Sidang pengucapan Putusan									- Berkas perkara - Ruang sidang - Konsep putusan - ATK	2 jam	Putusan	
14.	Melaporkan Perkara Putus dan Permintaan Materai Ke Kepaniteraan									- ATK	1 jam	Pencatatan Perkara Putus di Register dan Tanda Terima Pengambilan Materai	*4

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.		
		Petugas PTSP	Kasir	Meja II	Panmud Perdata	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/WKPT	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output			
15.	Mengeluarkan biaya materai dan redaksi (PNBP) kepada Bendahara Penerima serta menutup buku jurnal											- ATK - Buku Jurnal - Materai - Buku Induk Keuangan Perdata Perdata	1 jam	Buku jurnal ditutup	*5
16.	Penandatanganan Putusan dan Berita Acara Sidang											- Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK	3 jam	Putusan dan Berita acara sidang yang sudah ditandatangani	
17.	Penandatanganan Putusan dan Berita Acara Sidang											- Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK	1 jam	Putusan dan Berita acara sidang yang sudah ditandatangani	
18.	Menginput pertimbangan hukum dan amar putusan											- Pertimbangan Hukum - Putusan PT - SIPP	2 jam	Jadwal sidang, Pertimbangan Hukum, Amar putusan sudah terinput	
19.	Menginput jadwal sidang, tanggal putusan, Mengunggah e-doc berita acara dan putusan ke dalam SIPP											- Soft Copy berita acara, Putusan - SIPP	1 jam	e-doc berita acara dan putusan lengkap	
20.	Meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan pengisian SIPP dan menginput tanggal minutas											- Berkas perkara - ATK	14 hari	Tanggal Minutasi terinput di sipp	*6
21.	Menandatangani Salinan putusan dan Surat Pengantar											- Berkas perkara - Buku ekspedisi - ATK - Salinan putusan - Konsep surat pengantar	2 jam	Salinan putusan dan surat pengantar sudah ditandatangani	
22.	Menjilid dan mengirim berkas bundel A ke pengadilan pengaju											- Berkas perkara - Buku Ekspedisi - Salinan putusan - Surat Pengantar - ATK	1 hari	Berkas perkara terjilid	
23.	Menyerahkan berkas bundel B ke Panitera Muda Hukum											- Bundel B - Checklist - Berita acara	3 hari	Berita Acara Penyerahan berkas ditandatangani	*7

Penjelasan pada kolom keterangan :

- *1 Paling lambat 3 hari setelah mendapatkan nomor perkara
- *2 Paling lambat 3 hari setelah penunjukan majelis hakim
- *3 Penetapan hari sidang paling lambat 3 hari setelah penunjukan Panitera Pengganti
- *4 Harus dilaporkan pada hari pengucapan putusan
- *5 Penutupan buku jurnal keuangan pada hari diucapkan putusan
- *6 Minutasi paling lambat 14 hari kelender sejak pengucapan putusan
- *7 7 hari sejak tanggal minutas





MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	356/DJU/OT.01.3/3/2022
TGL. PEMBUATAN	11 November 2021
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	31 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	 PRIM HARYADI
NAMA SOP	PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PT

DASAR HUKUM :	KETERKAITAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Kepaniteraan Pidana2. SOP Kesekretariatan (Umum)
	PERINGATAN/CATATAN :
	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi
	KUALIFIKASI PELAKSANA :
	<ol style="list-style-type: none">1. S-32. S-23. S-14. D-35. SMU Sederajat
	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. Register Perkara Pidana
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. SIPP2. Buku Eskpedisi3. Register Perkara Pidana

<p>12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/ 12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>	
--	--

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baru			Ket
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Pidana	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/ WKPT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas perkara							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Buku ekspedisi - Checklist - ATK 	1 Jam	Tanda terima berkas perkara banding dari bagian umum	
2.	Meneliti kelengkapan berkas perkara										
3.	Memberikan nomor perkara						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - ATK 	1 Jam	Berkas perkara sudah mendapatkan nomor perkara		
4.	Menginput kedalam SIPP dan mencatat dalam buku register induk perkara serta formulir-formulir yang diperlukan						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Formulir lainnya - SIPP - Register Induk Perkara Pidana 	1 hari	nomor dan data perkara terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register induk perkara		
5.	Penetapan Majelis Hakim melalui SIPP						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Formulir – formulir SIPP - ATK 	3 hari	Penetapan majelis hakim		
6.	Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Formulir – formulir SIPP - ATK 	3 hari	Penunjukan panitera pengganti		
7.	Menerima berkas perkara dari kepaniteraan pidana						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Penetapan majelis - Penetapan PP - Buku Ekspedisi 	1 hari	Tanda terima berkas perkara		
8.	Menetapkan hari sidang pertama dan menginput court calendar						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Blanko Penetapan 	1 hari	penetapan hari sidang pertama dan court calendar terinput dalam SIPP		
9.	Mempelajari berkas perkara, Musyawarah dan Menyusun Konsep Putusan.						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Buku ekspedisi antar majelis - ATK 	63 Hari	- Tanda terima berkas - Konsep putusan	*!	
10.	Menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti untuk Persiapan Pengucapan Putusan						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Perkara - Buku Expedisi 	1 hari	Tanda Terima Penyerahan Berkas		
11.	Pengetikan konsep putusan dan Pengetikan Perbaikan						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - ATK 	7 hari	Konsep putusan		
12.	Mengoreksi Konsep Putusan						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara - Perndapat majelis hakim 	3 hari	Rumusan hasil musyawarah yang sudah diparaf		

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baru			Ket	
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Pidana	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/ WKPT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
13.	Sidang pengucapan Putusan									- Berkas perkara - Ruang sidang - Konsep putusan - ATK	2 Jam	Putusan	
14.	Melaporkan Perkara Putus Ke Kepaniteraan									ATK	1 hari	Pencatatan Perkara Putus di Register	
15.	Penandatanganan Putusan dan Berita Acara Sidang									Berkas perkara Konsep berita acara sidang ATK	1 Jam	Putusan dan Berita acara sidang	
16.	Penandatanganan Putusan dan Berita Acara Sidang									Berkas perkara Konsep berita acara sidang ATK	1 Jam	Putusan dan Berita acara sidang	
17.	Menginput pertimbangan hukum, amar putusan kedalam SIPP									Pertimbangan Hukum Putusan PT SIPP	2 Jam		
18.	Menginput tanggal putusan dan mengunggah e-doc putusan kedalam SIPP									Soft Copy Putusan SIPP	2 Jam	tanggal putusan dan e-doc putusan lengkap	
19.	Menerima Minutasi perkara, meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan pengisian SIPP dan menginput tanggal minutas									Berkas perkara ATK	1 Hari	Tgl Minutasi terinput di sipp	
20.	Menandatangani Salinan putusan dan Salinan petikan putusan									Berkas perkara Buku ekspedisi Berita acara penyerahan minutas	1 hari	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara	
21.	Meminta nomor surat keluar di PTSP									Surat pengantar ATK Agenda surat keluar Buku ekspedisi	1 Jam	- Nomor surat	
22.	mengirim ke PN Pengaju berkas bundle A, Salinan putusan dan softcopy									Berkas perkara Buku ekspedisi Berita acara penyerahan minutas	1 hari	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara	
23.	Penjilidan berkas perkara bundle B									Berkas perkara ATK	1 hari	Berkas perkara terjilid	
24.	Penyerahan berkas bundel B ke Panmud Hukum untuk diarsipkan									Berkas perkara ATK	3 hari	Berita Acara Penyerahan	

Penjelasan pada kolom keterangan :

*1 Masing-masing Hakim selama 21 hari




LAMPIRAN 8

SOP PENYELESAIAN PERKARA TIPIKOR



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

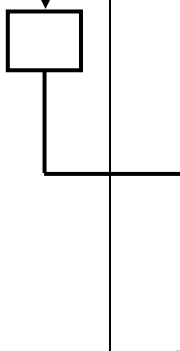
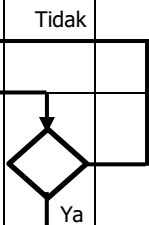
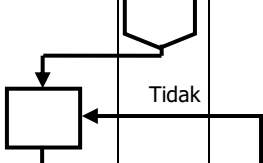
NOMOR SOP	357/DJU/OT.01.3/3/2022
TGL. PEMBUATAN	11 November 2021
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	31 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	<p>Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum</p>  <p>PRIM HARYADI</p>
NAMA SOP	PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING

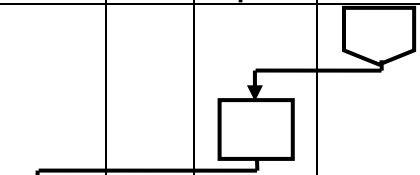
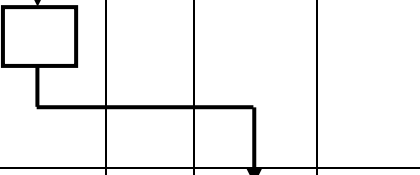


DASAR HUKUM :	KETERKAITAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Kepaniteraan Pidana2. SOP Kesekretariatan (Umum)
	PERINGATAN/CATATAN :
	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi
	KUALIFIKASI PELAKSANA :
	<ol style="list-style-type: none">1. S-3 Hukum2. S-2 Hukum3. S-1 Hukum4. D-III5. SMU Sederajat
	/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer3. Printer4. Register Perkara Pidana
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. SIPP2. Buku Eskpedisi Register Perkara Pidana

14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
19. Persekma Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monev terhadap SOP di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya
20. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya
21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/ 12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
23. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baru			Ket	
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Tipikor	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/WKPT	Persyaratan/Perengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima berkas perkara			Tidak					- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Checklist - ATK	1 Jam	Tanda terima berkas perkara banding dari bagian umum	
2.	Meneliti kelengkapan berkas perkara								- Berkas Perkara - Check List - ATK	1 hari	Berkas lengkap	
3.	Memberikan nomor perkara			Ya					- Berkas Perkara - ATK	1 Jam	Berkas perkara sudah mendapatkan nomor perkara	
4.	Menginput kedalam SIPP dan mencatat dalam buku register induk perkara serta formulir-formulir yang diperlukan								- Berkas Perkara - Formulir lainnya - SIPP - Register Induk Perkara Pidana	1 hari	nomor dan data perkara terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register induk perkara	
5.	Penetapan Majelis Hakim melalui SIPP								- Berkas perkara - Formulir – formulir - SIPP - ATK	3 hari	Penetapan majelis hakim	
6.	Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP								- Berkas perkara - Formulir – formulir - SIPP - ATK	3 hari	Penunjukan panitera pengganti	
7.	Menerima berkas perkara dari kepaniteraan pidana								- Berkas perkara - Penetapan majelis - Penetapan PP - Buku Ekspedisi	1 hari	Tanda terima berkas perkara	
8.	Menetapkan hari sidang pertama dan menginput court calendar								- Berkas perkara - Blanko Penetapan	1 hari	penetapan hari sidang pertama dan court calendar terinput dalam SIPP	
9.	Mempelajari berkas perkara, Musyawarah dan Menyusun Konsep Putusan.								- Berkas perkara - Buku ekspedisi antar majelis - ATK	45 hari	-Tanda terima berkas -Konsep putusan	*1
10.	Menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti untuk Persiapan Pengucapan Putusan								- Berkas Perkara - Buku Expedisi	1 hari	-Tanda Terima Penyerahan Berkas	

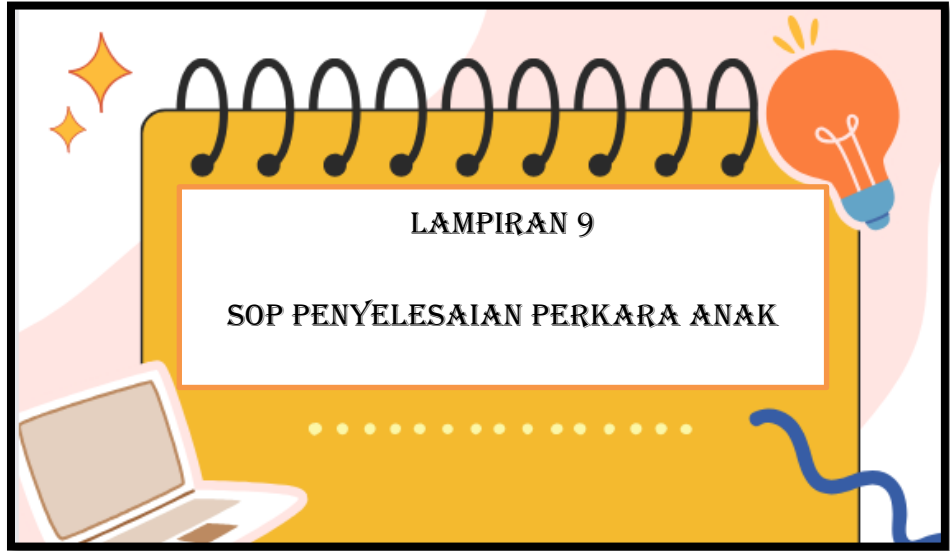
No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baru			Ket	
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Tipikor	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/WKPT	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output		
11.	Pengetikan konsep putusan dan Pengetikan Perbaikan									- Berkas perkara - ATK	7 hari	Konsep putusan	
12.	Mengoreksi Konsep Putusan									- Berkas perkara - Pendapat majelis hakim	3 hari	Rumusan hasil musyawarah yang sudah diparaf	
13.	Sidang pengucapan Putusan									- Berkas perkara - Ruang sidang - Konsep putusan - ATK	3 Jam	Putusan	
14.	Melaporkan Perkara Putus Ke Kepaniteraan									ATK	1 Jam	Pencatatan Perkara Putus di Register	
15.	Penandatanganan Putusan dan Berita Acara Sidang									- Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK	1 Jam	Putusan dan Berita acara sidang	
16.	Penandatanganan Berita Acara Sidang									- Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK	1 Jam	Berita acara sidang	
17.	Menginput pertimbangan hukum, amar putusan kedalam SIPP									- Pertimbangan Hukum - Putusan PT SIPP	1 hari		
18.	Menginput tanggal putusan dan mengunggah e-doc putusan kedalam SIPP									- Soft Copy Putusan SIPP	1 hari	tanggal putusan dan e-doc putusan lengkap	
19.	Menerima Minutasi perkara, meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan pengisian SIPP dan menginput tanggal minutasi									- Berkas perkara - ATK	2 hari	Tgl Minutasi terinput di sipp	
20.	Menandatangani Salinan putusan dan Salinan petikan putusan									- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Berita acara penyerahan minutasi	7 hari	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara	



No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baru			Ket
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Tipikor	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/WKPT	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
21.	Meminta nomor surat keluar di PTSP								- Surat pengantar - ATK - Agenda surat keluar - Buku ekspedisi	1 Jam	- Nomor surat	
22.	mengirim ke PN Pengaju berkas bundle A, Salinan putusan dan softcopy							- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Berita acara penyerahan minutasi	1 hari	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara		
23.	Penjilidan berkas perkara bundle B							- Berkas perkara - ATK	1 hari	Berkas perkara terjilid		
24.	Penyerahan berkas bundel B ke Panmud Hukum untuk diarsipkan							- Berkas perkara - ATK	1 hari	Berita Acara Penyerahan		

Penjelasan pada kolom keterangan :

*1 Masing-masing Hakim selama 15 hari





LAMPIRAN 9

SOP PENYELESAIAN PERKARA ANAK



MAHKAMAH AGUNG R.I.
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat

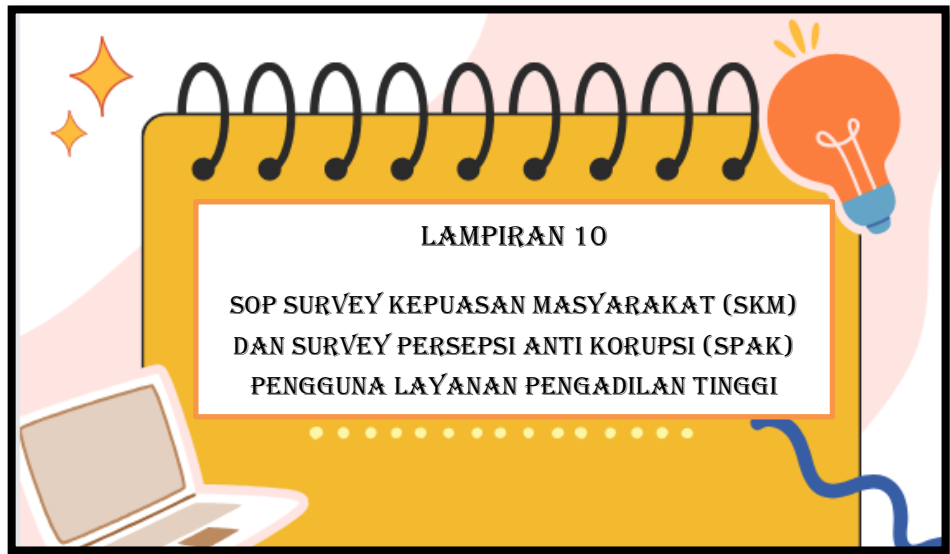
 MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NOMOR SOP	355/DJU/OT.01.3/3/2022	
	TGL. PEMBUATAN	11 November 2021	
	TGL. REVISI	-	
	TGL. EFEKTIF	31 Maret 2022	
	DISAHKAN OLEH	 PRIM HARYADI	
NAMA SOP	PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK TINGKAT BANDING		
DASAR HUKUM :	KETERKAITAN :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 		
	PERINGATAN/CATATAN :		
	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi		
	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. D-3 5. SMU Sederajat 		
	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. Register Perkara Pidana 		
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIPP 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Pidana 		

<p>Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/ 12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>	
---	--

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baru			Ket
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Pidana	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT/ WKPT	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara								- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Checklist - ATK	1 Jam	Tanda terima berkas perkara banding dari bagian umum	
2.	Meneliti kelengkapan berkas perkara								- Berkas Perkara - Check List - ATK	1 hari	Berkas lengkap	
3.	Memberikan nomor perkara								- Berkas Perkara - ATK	1 Jam	Berkas perkara sudah mendapatkan nomor perkara	
4.	Menginput kedalam SIPP dan mencatat dalam buku register induk perkara serta formulir-formulir yang diperlukan								- Berkas Perkara - Formulir lainnya - SIPP - Register Induk Perkara Pidana	1 hari	nomor dan data perkara terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register induk perkara	
5.	Penetapan Majelis Hakim melalui SIPP								- Berkas perkara - Formulir – formulir - SIPP - ATK	1 hari	Penetapan majelis hakim	
6.	Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP								- Berkas perkara - Formulir – formulir - SIPP - ATK	1 hari	Penunjukan panitera pengganti	
7.	Menerima berkas perkara dari kepaniteraan pidana								- Berkas perkara - Penetapan majelis - Penetapan PP - Buku Ekspedisi	1 hari	Tanda terima berkas perkara	
8.	Menetapkan hari sidang pertama dan menginput court calendar								- Berkas perkara - Blanko Penetapan	1 hari	penetapan hari sidang pertama dan court calendar terinput dalam SIPP	
9.	Mempelajari berkas perkara/ Musyawarah (jika Majelis) dan Menyusun Konsep Putusan.								- Berkas perkara - Buku ekspedisi antar majelis - ATK	28 hari	- Tanda terima berkas - Konsep putusan	
10.	Menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti untuk Persiapan Pengucapan Putusan								- Berkas Perkara - Buku Expedisi	1 hari	Tanda Terima Penyerahan Berkas	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Pidana	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT / WKPT	Perengkapan / Persyaratan	Waktu	Output	
11.	Pengetikan konsep putusan dan Pengetikan Perbaikan								- Berkas perkara - ATK	1 hari	Konsep putusan	
12.	Mengoreksi Konsep Putusan								- Berkas perkara - Perndapat majelis hakim	3 hari	putusan	
13.	Sidang pengucapan Putusan								- Berkas perkara - Ruang sidang - Konsep putusan - ATK	1 Jam	Putusan	
14.	Melaporkan Perkara Putus Ke Kepaniteraan								ATK	1 Jam	Pencatatan Perkara Putus di Register	
15.	Penandatanganan Putusan dan Berita Acara Sidang								- Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK	2 Jam	Putusan dan Berita acara sidang	
16.	Penandatanganan Berita Acara Sidang								- Berkas perkara - Konsep berita acara sidang - ATK	2 Jam	Berita acara sidang	
17.	Menginput pertimbangan hukum, amar putusan kedalam SIPP								- Pertimbangan Hukum - Putusan PT - SIPP	1 Jam		
18.	Menginput tanggal putusan dan mengunggah e-doc putusan kedalam SIPP								- Soft Copy Putusan - SIPP	2 Jam	- tanggal putusan - e-doc putusan lengkap - e-doc putusan anonimisasi	
19.	Menerima Minutasi perkara, meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan pengisian SIPP dan menginput tanggal minutasi								- Berkas perkara - ATK	1 hari	Tgl Minutasi terinput di sipp	
20.	Menandatangani Salinan putusan dan Salinan petikan putusan								- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Berita acara penyerahan minutasi	1 hari	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara	
21.	Meminta nomor surat keluar di PTSP								- Surat pengantar - ATK - Agenda surat keluar - Buku ekspedisi	1 Jam	Nomor surat	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Perdata	Panitera	Panitera Pengganti	Hakim	KPT / WKPT	Perlengkapan / Persyaratan	Waktu	Output	
22.	mengirim ke PN Pengaju berkas bundle A, Salinan putusan dan softcopy								- Berkas perkara - Buku ekspedisi - Berita acara penyerahan minutas	1 hari	Tanda terima penyerahan berkas dan berita acara	
23.	Penjilidan berkas perkara bundle B								- Berkas perkara - ATK	1 hari	Berkas perkara terjilid	
24.	Penyerahan berkas bundel B ke Panmud Hukum untuk diarsipkan								- Berkas perkara - ATK	1 hari	Berita Acara Penyerahan	




LAMPIRAN 10

SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN TINGGI



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	346/DJU/OT.01.3/3/2022
TGL. PEMBUATAN	12 Desember 2018
TGL. REVISI	11 November 2021
TGL. EFEKTIF	31 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	 PRIZ M HARYADI
NAMA SOP	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN TINGGI

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S2
2. S1
3. D3
4. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

SOP Kepaniteraan Hukum

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

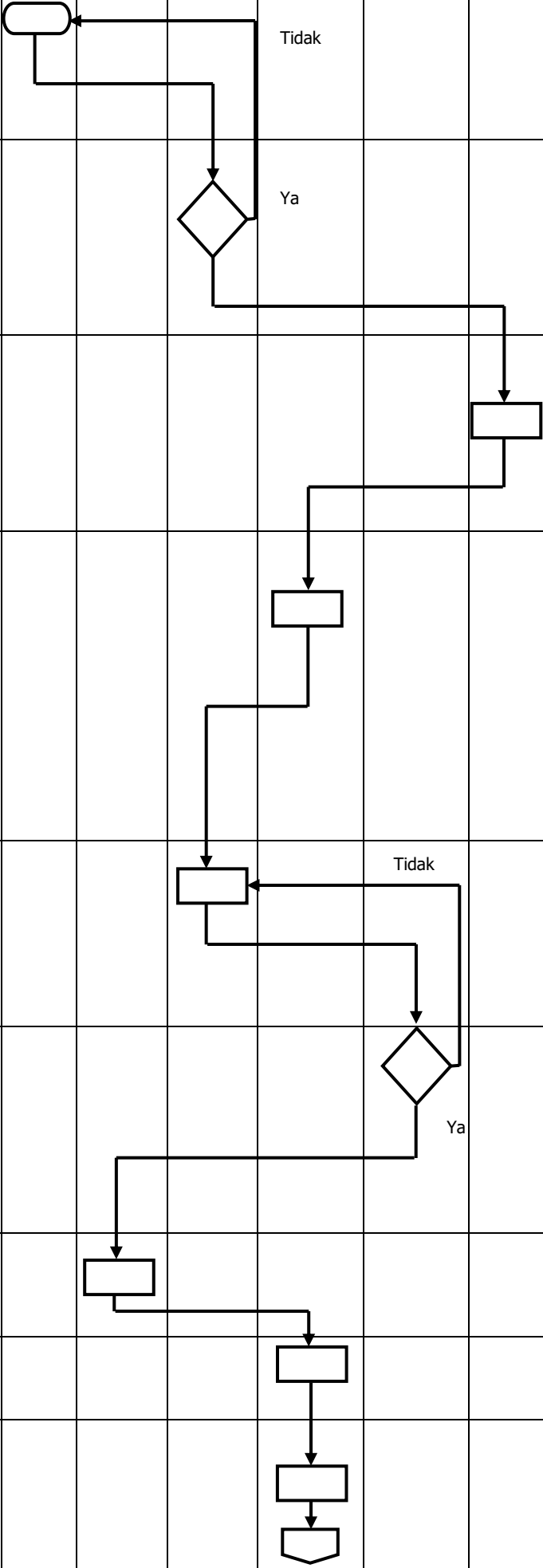
PERINGATAN/CATATAN :

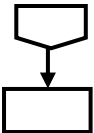




Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diukur

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Questioner Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Panmud Hukum	Sekretaris	Panitera	Tim Survey Kepuasan Masyarakat	WKPT	KPT	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu		Output
1	Menyusun konsep Tim Survey							- ATK	1 Jam	Konsep Tim Survey	
2	Meneliti dan memberikan paraf pada konsep tim survey							Konsep Tim Survey - ATK	1 Jam	Konsep Tim Survey sudah di paraf	
3	Penandatanganan SK Tim Survey							Konsep Tim Survey yang sudah di paraf - ATK	1 Jam	SK Tim Survey	
4	Menyusun rencana program Pelaksanaan SKM dan SPAK							SK Tim Survey Aplikasi SISUPER Proposal Survey Data pendukung Hasil survey sebelumnya Konsep jadwal pelaksanaan <i>Customer Base</i> - ATK	1 Hari	Jadwal Pelaksanaan Survey dan biaya	*1
5	Memeriksa rencana program pengukuran SKM dan SPAK serta memberikan paraf							Aplikasi SISUPER Rencana program pengukuran SKM dan SPAK - ATK	1 jam	Rencana program pengukuran SKM dan SPAK yang telah diparaf	
6	Memberikan persetujuan pelaksanaan SKM dan SPAK							Aplikasi SISUPER Data pendukung yang diperlukan untuk melakukan survey - ATK	1 jam	Persetujuan pelaksanaan SKM dan SPAK	
7	Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan survey							Aplikasi SISUPER - Layar monitor - ATK	2 Jam	Tersedianya aplikasi beserta layar monitor	
8	Mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden							- Link aplikasi SISUPER - ATK	3 Bulan	Link aplikasi sudah terdistribusi	
9	Mengumpulkan hasil pelaksanaan survey dan menetapkan IKM dan IPAK							Link aplikasi sudah terisi - ATK	5 Hari	Laporan	



No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Panmud Hukum	Sekretaris	Panitera	Tim Survey Kepuasan Masyarakat	WKPT	KPT	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu		Output
10	Menyusun laporan pelaksanaan hasil survey							- Aplikasi SISUPER - Link aplikasi SISUPER - Data Hasil survey	1 Bulan	Laporan	
11	Menerima laporan pelaksanaan survey							- Laporan pelaksanaan hasil survey	1 Jam	Laporan sudah diterima dan ditandatangani	
12	Mempublikasikan hasil survey dan menindaklanjuti 3 unsur terendah dari hasil survey							- Laporan hasil survey - Website dan media pengadilan - Data pendukung	1 Jam	Laporan Hasil Analisa IKM dan IPAK sudah terpublikasi dan ditindaklanjuti	
13	Mengirimkan hasil survey ke Ditjen Badilum melalui aplikasi SISUPER							- Surat pengantar Hasil survey dan analisisnya - Data pendukung - Checklist data survey - ATK	1 Jam	Tanda Pengiriman dan publikasi hasil survey	
14	Mengarsipkan hasil IKM dan IPAK							- Surat pengantar Laporan hasil pelaksanaan survey - ATK	1 Jam	Laporan survey tersimpan dalam arsip	

Penjelasan Pada Kolom Keterangan :

*1 Pengukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali .






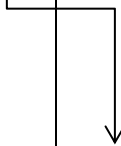

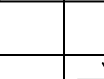

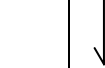
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembung, Kec. Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126

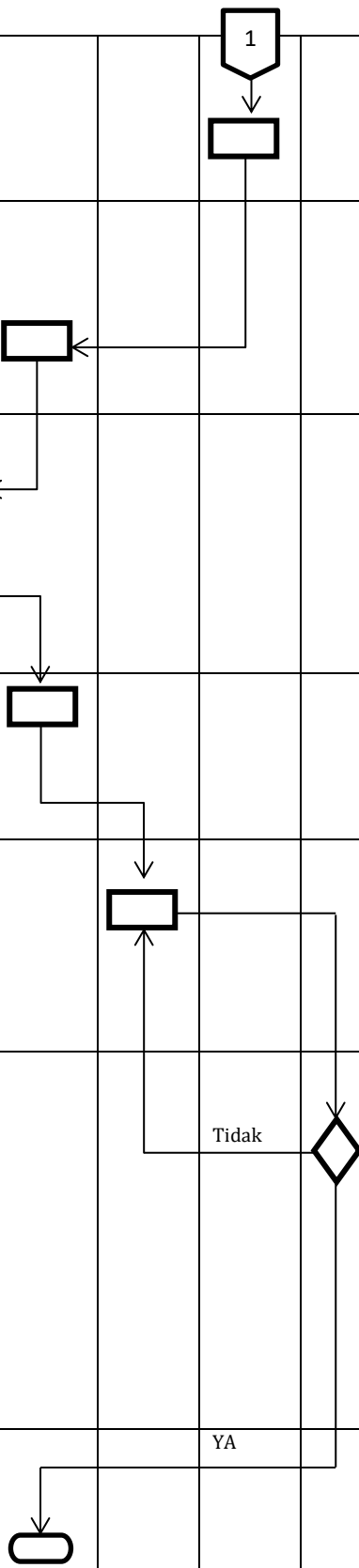
SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

NOMOR SOP	11/KPT.W29-U/OT1.2/IX/2023
TGL. PEMBUATAN	31 Januari 2023
TGL. REVISI	1 September 2023
TGL. EFEKTIF	1 September 2023
DISAHKAN OLEH	 Ketua Pengadilan Tinggi Banten ANDRIANI NURDIN
NAMA SOP	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan SEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf (SLTA, D3 atau S1 segala jurusan, dapat mengoperasikan ms. word) 2. Kasubag RPA. 3. Panitera Muda Hukum 4. Kasubag Kepegiti. 5. Panitera. 6. Ketua.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Penyusunan Laporan Bulanan Pidana SOP Penyusunan Laproan Bulanan Tipikor	- Laptop - ATK
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak dilaksanakan, maka pimpinan sulit melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja.	

NO	KEGIATAN	Pelaksana					MUTU BUKU			KET
		Subbag RPA	Kasubbag RPA	Panitera	Panmud Hukum	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta data Laporan Keadaan Perkara ke Kepaniteraan Muda Hukum • Mengolah data perkara yang diputus tepat waktu dan dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu berdasarkan data dari SIPP ke dalam file excel setiap bulan 	 					Laporan Keadaan Perkara bulanan	1 hari	Data Perkara yang diputus tepat waktu,	
2.	Memberi data file excel perkara yang diputus banding dan meminta data perkara putus banding yang diajukan kasasi ke Panitera setiap bulan		 				Data Perkara yang diputus tepat waktu,	1 hari	Perjanjian Hibah yang sudah ditandatangani	
3.	Panitera memerintahkan Panmud Hukum untuk mengumpulkan data perkara putus banding yang diajukan kasasi setiap bulan.			 			Data Perkara yang diputus tepat waktu, mengajukan kasasi, dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	60 menit	Formulir yang sudah di TTD	

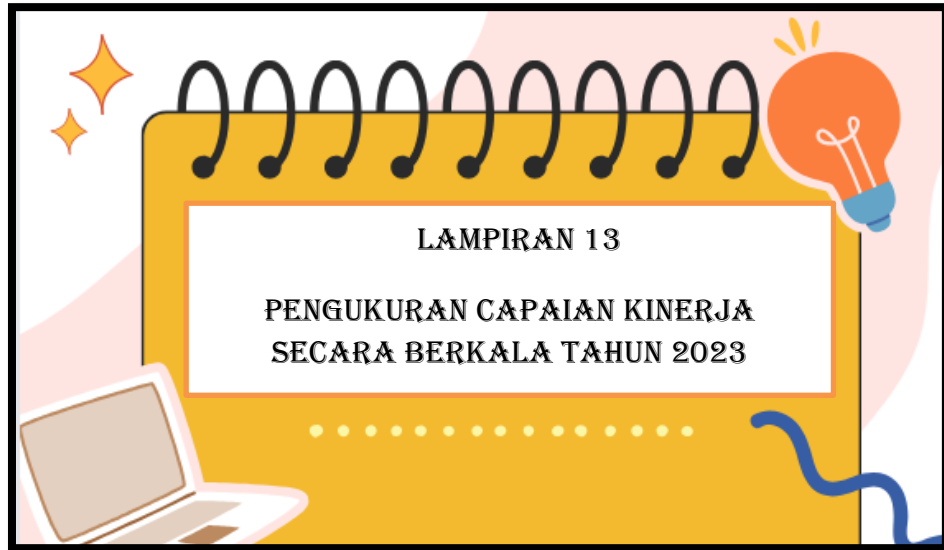
4.	Menyerahkan data perkara putus banding yang diajukan kasasi ke subbag RPA setiap bulan				1				
5	Membuat Konsep Laporan Pengukuran Kinerja perbulan dan laporan monev rencana aksi atas PKT Ketua					Konsep Laporan Kinerja	1 Jam	Konsep Laporan Kinerja	
6	Membuat Konsep Laporan Pengukuran Kinerja perbulan dan laporan monev rencana aksi atas PKT Ketua					Konsep Laporan Kinerja	1 Jam	Konsep Laporan Kinerja	
7	Memeriksa dan memaraf konsep laporan kinerja perbulan dan laporan monev rencana aksi atas PKT Ketua sesuai hasil rapat kinerja.					Konsep dokumen Laporan Kinerja	1 Jam	Konsep Laporan Kinerja	
8	Memeriksa dan memaraf Laporan Kinerja perbulan dan laporan monev rencana aksi atas PKT Ketua serta melaporkan kepada Ketua sesuai hasil rapat.					Konsep dokumen Laporan Kinerja	1 Jam	Konsep Laporan Kinerja	
9	Menandatangani laporan kinerja perbulan dan laporan monev rencana aksi atas PKT Ketua sesuai hasil rapat untuk pengendalian dan pemantauan kinerja jika menyetujui diarsipkan oleh Kasubbag RPA, Jika tidak menyetujui dikembalikan kepada Panitera sebagai Ketua Tim Satgas SAKIP					Konsep Laporan Kinerja Triwulanan yang sudah di TTD oleh Panitera	1 Jam	Dokumen Laporan Kinerja Triwulanan	
10	Mengarsipkan dokumen				YA	Dokumen Laporan Kinerja Triwulanan	30 menit	Dokumen Laporan Kinerja Triwulanan	





PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%	49%	96%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	93,93	104
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata – rata capaian kinerja pada sasaran Strategis 2					100%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategi 2					100%



LAMPIRAN 13

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
SECARA BERKALA TAHUN 2023**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2023**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan												Realisasi Tahunan		
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Tahun 2023		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	109	109	100,00	71	71	100,00	78	78	100,00	75	75	100,00	333	333	100%
					100,00%		100,00%			100,00%		100,00%			100,00%		100,00%	
2.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	30	30	100,00	15	15	100,00	9	9	100,00	8	8	100,00	62	62	100%
					100,00%		100,00%			100,00%		100,00%			100,00%		100,00%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
 Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

3.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	40	40 100,00%	100,00	40	40 100,00%	100,00	41	41 100,00%	100,00	47	47 100,00%	100,00	168	168 100,00%	100%
4.	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90,5	0	0 0,00%	0,00	0	95 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	93,92 0,00%	0,00	93,92	93,93 0,00%	104%
5.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51	0	0 0,00%	0,00	305	131 42,95%	82,35	0	0 0,00%	0,00	258	146 56,59%	109,80	277	277 49,20%	96%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	40	40 100,00%	100,00	40	40 100,00%	100,00	41	41 100,00%	100,00	45	45 100,00%	100,00	166	166 100,00%	100%
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	109	109 100,00%	100,00	71	71 100,00%	100,00	78	78 100,00%	100,00	75	75 100,00%	100,00	333	333 100,00%	100%
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	30	30 100,00%	100,00	15	15 100,00%	100,00	9	9 100,00%	100,00	8	8 100,00%	100,00	62	62 100,00%	100%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

KEGIATAN DAN ANGGARAN

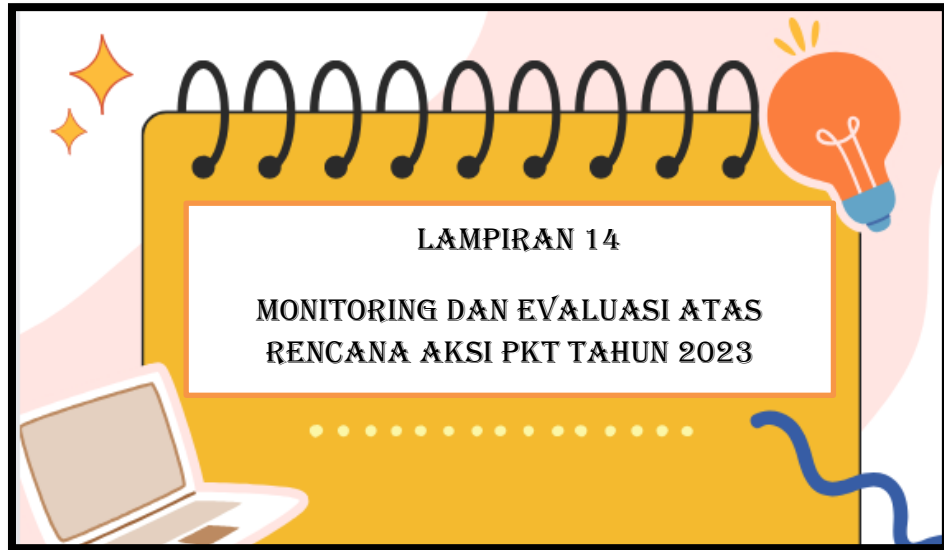
No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran					Tahun 2023 (Rp)	
			Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)			
1	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Dipa 01)</i>	<i>Rp24.419.000.000</i>	<i>4.946.646.826</i>	<i>7.955.192.675</i>	<i>5.249.141.145</i>	<i>778.257.661</i>	<i>23.928.238.307</i>	<i>97,99%</i>	
2	<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Dipa 03)</i>	<i>Rp216.444.000</i>	<i>41.935.420</i>	<i>53.090.407</i>	<i>20.027.555</i>	<i>98.712.349</i>	<i>213.765.731</i>	<i>98,76%</i>	
<i>Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran 1</i>								<i>100%</i>	
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2</i>								<i>100%</i>	

Keterangan : Pengukuran Kinerja Triwulanan menggunakan aplikasi Komdanas Mahkamah Agung



Ketua,

Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H.



LAMPIRAN 14

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS
RENCANA AKSI PKT TAHUN 2023**

**Laporan Triwulan I
(Januari – Maret)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



Pengadilan Tinggi Banten
Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002
Website: www.pt-banten.go.id
Banten

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan I Tahun 2023 disajikan dalam uraian pencapaian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
Perdata	109	109	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua perkara perdata yang diputus pada triwulan I tahun 2023 diputus tepat waktu (tidak melebihi 3 bulan/ 90 hari kalender) sehingga capaiannya 100%.

b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana Biasa	40	40	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua perkara pidana yang diputus pada triwulan I tahun 2023 diputus tepat waktu (tidak melebihi 3 bulan/ 90 hari kalender) sehingga capaiannya 100%.

c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana Khusus (Tipikor dan Anak)	30	30	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua perkara pidana khusus yang diputus pada triwulan I tahun 2023 diputus tepat waktu (tidak melebihi 3 bulan/ 90 hari kalender) sehingga capaiannya 100%.

- d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi
 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada Triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Putusan Perkara	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi**	Target	Capaian
179	67	112	62,57%	51%	122,7%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah melebihi dari target yang ditentukan yaitu 51% dengan nilai capaian 122,7%.

Bahwa data masih belum didapatkan dari Kepaniteraan Muda Hukum.

- e. Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan
 Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan berdasarkan pada Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Banten Triwulan I (Januari – Maret tahun 2023) dengan nilai indeks sebesar 94,98. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah 90,5.

Capaian Target Indeks Responden adalah = $\frac{94,98}{90,5} \times 100\% = 104,95\%$

“Persentase Capaian Target = perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder dengan target yang ditetapkan”.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
 Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah putusan	Realisasi**	Target	Capaian
Perdata	109	109	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari tabel di atas, berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SIPP dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan perkara perdata dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah putusan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana	40	40	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari tabel di atas, berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SIPP dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan perkara pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

- c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

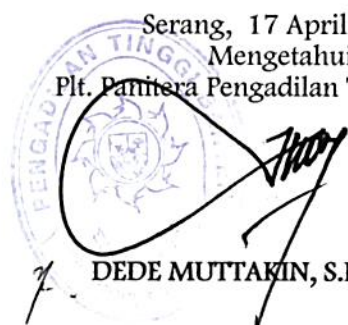
Tabel 7. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah putusan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana Khusus (Tipikor dan Anak)	30	30	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari tabel di atas, berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SIPP dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan perkara pidana khusus dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

Serang, 17 April 2023
Mengetahui,
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten



DEDE MUTTAKIN, S.H.,M.Hum.

Laporan Triwulan II
(Januari – Juni)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023



Pengadilan Tinggi Banten
Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002
Website: www.pt-banten.go.id
Banten

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam uraian pencapaian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
Perdata	180	180	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua perkara perdata yang diputus pada triwulan II tahun 2023 diputus tepat waktu (tidak melebihi 3 bulan/ 90 hari kalender) sehingga capaiannya 100%.

b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana Biasa	80	80	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua perkara pidana yang diputus pada triwulan II tahun 2023 diputus tepat waktu (tidak melebihi 3 bulan/ 90 hari kalender) sehingga capaiannya 100%.

c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana Khusus (Tipikor dan Anak)	45	45	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua perkara pidana khusus yang diputus pada triwulan II tahun 2023 diputus tepat waktu, yaitu tidak melebihi 2 bulan (60 hari kalender) untuk perkara tipikor dan tidak melebihi 40 hari untuk perkara anak (berdasarkan SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tingkat Banding, Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 pada link <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/3694-sop-kepaniteraan-tahun-2022.html>) sehingga capaiannya 100%.

- d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada Triwulan II tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Putusan Perkara	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi**	Target	Capaian
305	67	149	49%	51%	96%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada triwulan II belum mencapai target yang ditentukan yaitu 51% dengan nilai capaian 96%.

Berdasarkan rekapitulasi data perkara diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah Putusan Perkara berdasarkan jenis perkara	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi**	Target	Capaian
Perdata	180	90	50%	51%	98%
Pidana biasa	80	38	52%	51%	102%
Pidana anak	9	4	55%	51%	107%
Tipikor	36	24	33%	51%	65%

Berdasarkan data di atas bahwa jenis perkara yang tidak bisa mencapai target yang ditetapkan adalah perkara tipikor dengan capaian hanya 65% dan perkara perdata dengan capaian 98%.

- e. Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan
Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan berdasarkan pada Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Banten Triwulan II (April-Juni tahun 2023) dengan nilai indeks sebesar 95,64. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah 90,5.

Capaian Target Indeks Responden adalah $= \frac{95,64}{90,5} \times 100\% = 105\%$

“Persentase Capaian Target = perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder dengan target yang ditetapkan”.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah putusan	Realisasi**	Target	Capaian
Perdata	180	180	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari tabel di atas, berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SIPP dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan perkara perdata dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah putusan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana	80	80	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari tabel di atas, berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SIPP dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan perkara pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah putusan	Realisasi**	Target	Capaian
Pidana Khusus (Tipikor dan Anak)	45	45	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari tabel di atas, berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SIPP dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan perkara pidana khusus dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu (tidak melebihi 14 hari).

Serang, 10 Juli 2023
Mengetahui,
Panitera Pengadilan Tinggi Banten



MUHTAR, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III
PENGADILAN TINGGI BANTEN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%	46%	90%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	95,99	106%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu				
1).	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun sebelumnya	Sisa perkara perdata tahun lalu 13 perkara sudah diselesaikan tepat waktu.	-	-
2).	Menyelesaikan perkara perdata sampai dengan minutasasi tidak melebihi 3 bulan	Perkara masuk 1 Januari s.d. 30 September 2023 sebanyak 267 perkara. Perkara diminutasasi 1 Januari s.d. 30 September 2023 sebanyak 258 perkara. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu s.d. 30 September 2023 adalah 258 perkara.	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu				
3).	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara perdata	Dari 258 perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 198 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dan terdapat 60 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari.	-	-
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu				
1).	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun sebelumnya	Sisa perkara pidana tahun lalu 6 perkara sudah diselesaikan tepat waktu.	-	-
2).	Menyelesaikan perkara pidana sampai dengan minutasasi tidak melebihi 3 bulan	Perkara masuk 1 Januari s.d. 30 September 2023 sebanyak 125 perkara. Perkara diminutasasi 1 Januari s.d. 30 September 2023 sebanyak 121 perkara. Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 1 Januari s.d. 30 September 2023 adalah 121 perkara.	-	-
3).	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana	Dari 121 perkara pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 110 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dan terdapat 11 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari.	-	-
4).	Pengiriman surat penahanan	Pengiriman surat penahanan perkara pidana biasa selama 1 Januari s.d. 30 september sebanyak 569 surat.	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu				
1).	Menyelesaikan sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya	Sisa perkara pidana anak tahun lalu 0 perkara dan sisa perkara tipikor tahun lalu 5 perkara sudah diselesaikan tepat waktu.	-	-
2).	Menyelesaikan perkara pidana khusus sampai dengan minutasasi tidak melebihi 3 bulan	Perkara masuk 1 Januari s.d. 30 September 2023 adalah 10 perkara anak dan 39 perkara tipikor. Perkara diminutasi 1 Januari s.d. 30 September 2023 adalah 10 pidana anak dan 44 tipikor. Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 1 Januari s.d. 30 September 2023 adalah 54 perkara.	-	-
3).	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana khusus	Dari 54 perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 10 perkara pidana anak yang diselesaikan tidak melebihi SOP (40 hari), dan terdapat 40 perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari, serta terdapat 4 perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari.	-	-
4).	Pengiriman surat penahanan	Pengiriman surat penahanan perkara pidana khusus selama 1 Januari s.d. 30 september, yaitu sebanyak 10 surat untuk perkara pidana anak dan 144 surat untuk perkara tipikor.	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
1).	Meningkatkan kualitas putusan	Dengan mengikuti pembinaan/ sosialisasi .	-	-
2).	Mendata perkara banding yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	Merekapitulasi data dari SIPP Pengadilan Negeri.	Sulit pengumpulan data perkara banding yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	Subbag RPA akan memberikan format excel ke bagian Kepaniteraan Muda Hukum.
e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan				
1).	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	SK KPT Nomor : 1. W29-U/29/KPT/SK/KP.04.6/2/2023 2. W29-U/87/KPT/SK/KP.04.6/6/2023 3. W29/63/KPT/S/KP.04.6/VII/ 2022	-	-
2).	Menyusun jadwal pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Setiap ada pengguna layanan diarahkan untuk mengisi survey di aplikasi sisuper. Penghitungan survey dilaksanakan setiap triwulan (April, Juli, Okt, Januari).	-	-
3).	Melaksanakan survey	Jumlah responden triwulan 1 sebanyak 83 orang. Jumlah responden triwulan 2 sebanyak 44 orang. Jumlah responden triwulan 3 sebanyak 99 orang.	-	-
4).	Menyusun laporan survey	Laporan survey : 1. Triwulan 1 tanggal 3 April 2023 dengan nilai 94,98 2. Triwulan 2 tanggal 5 Juli 2023 dengan nilai 95,64 3. Triwulan 3 tanggal 5 Okt 2023 dengan nilai 95,99	-	-
5).	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey	Telah dilakukan evaluasi hasil survey triwulan 3 berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Atas Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tertanggal 12 Oktober 2023	-	-

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
1).	Memeriksa upload e-doc putusan	Terdapat 258 pengiriman salinan putusan perkara perdata dari 1 Januari s.d. 30 September 2023.	-	-
2).	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Berdasarkan data dari SIPP banding, bahwa 258 pengiriman salinan putusan perkara perdata tidak melebihi 14 hari.	-	-
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
1).	Memeriksa upload e-doc putusan	Terdapat 121 pengiriman salinan putusan perkara pidana dari 1 Januari s.d. 30 September 2023.		
		Berdasarkan data dari SIPP banding, bahwa 121 pengiriman salinan putusan perkara pidana tidak melebihi 14 hari.		

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
1).	Memeriksa upload e-doc putusan	Terdapat 54 pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus dari 1 Januari s.d. 30 September 2023.	-	-
2).	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Berdasarkan data dari SIPP banding, bahwa 54 pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus tidak melebihi 14 hari.	-	-



Cefang, 22 November 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Banten,

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. ✓



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN IV
PENGADILAN TINGGI BANTEN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%	49%	96%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	93,92	104%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu				
1).	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun sebelumnya	Sisa perkara perdata tahun lalu 13 perkara sudah diselesaikan tepat waktu.	-	-
2).	Menyelesaikan perkara perdata sampai dengan minutasasi tidak melebihi 3 bulan	Perkara masuk 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 332 perkara. Perkara diminutasasi 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 333 perkara. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu s.d. 31 Desember 2023 adalah 333 perkara.	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu				
3).	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara perdata	Dari 333 perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 260 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dan terdapat 73 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari.	-	-
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu				
1).	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun sebelumnya	Sisa perkara pidana tahun lalu 6 perkara sudah diselesaikan tepat waktu.	-	-
2).	Menyelesaikan perkara pidana sampai dengan minutasasi tidak melebihi 3 bulan	Perkara masuk 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 178 perkara. Perkara diminutasasi 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 168 perkara. Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 adalah 168 perkara.	-	-
3).	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana	Dari 168 perkara pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 157 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dan terdapat 11 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari.	-	-
4).	Pengiriman surat penahanan	Pengiriman surat penahanan perkara pidana biasa selama 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 843 surat.	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu				
1).	Menyelesaikan sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya	Sisa perkara pidana anak tahun lalu 0 perkara dan sisa perkara tipikor tahun lalu 5 perkara sudah diselesaikan tepat waktu.	-	-
2).	Menyelesaikan perkara pidana khusus sampai dengan minutasasi tidak melebihi 3 bulan	Perkara masuk 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 adalah 15 perkara anak dan 44 perkara tipikor. Perkara diminutasi 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 adalah 14 pidana anak dan 48 tipikor. Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 adalah 62 perkara.	-	-
3).	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana khusus	Dari 62 perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tersebut, terdapat 14 perkara pidana anak yang diselesaikan tidak melebihi SOP (40 hari), dan terdapat 44 perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari, serta terdapat 4 perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu 31-60 hari.	-	-
4).	Pengiriman surat penahanan	Pengiriman surat penahanan perkara pidana khusus selama 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, yaitu sebanyak 27 surat untuk perkara pidana anak dan 144 surat untuk perkara tipikor.	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
1).	Meningkatkan kualitas putusan	Dengan mengikuti pembinaan/ sosialisasi .	-	-
2).	Mendata perkara banding yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	Merekapitulasi data dari SIPP Pengadilan Negeri. Tahun 2023 sebanyak 277 perkara tidak diajukan kasasi dari total 563 perkara banding yang dimutasi/diselesaikan s.d 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 tidak tercapai, karena yang tidak mengajukan kasasi kurang dari target yang ditetapkan ($51\% \times 563$ perkara mutasi = 287 perkara) dimana selama tahun 2023 sebanyak 277 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi (49%). <p>Dalam hal ini Majelis hakim sudah memberikan putusan sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum, namun karena perkara kasasi merupakan hak setiap pencari keadilan, sehingga Pengadilan tidak bisa menolak para pencari keadilan mengajukan kasasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas putusan Menurunkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2024 menjadi 45%
e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan				
1).	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	SK KPT Nomor : 1. W29-U/29/KPT/SK/KP.04.6/2/2023 2. W29-U/87/KPT/SK/KP.04.6/6/2023 3. W29/63/KPT/S/KP.04.6/VII/ 2022	-	-
2).	Menyusun jadwal pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Setiap ada pengguna layanan diarahkan untuk mengisi survey di aplikasi sisuper. Penghitungan survey dilaksanakan setiap triwulan (April, Juli, Okt, Januari).	-	-

3).	Melaksanakan survey	<p>Jumlah responden triwulan 1 sebanyak 83 orang.</p> <p>Jumlah responden triwulan 2 sebanyak 44 orang.</p> <p>Jumlah responden triwulan 3 sebanyak 99 orang.</p> <p>Jumlah responden triwulan 4 sebanyak 42 orang.</p>	-	-
4).	Menyusun laporan survey	<p>Laporan survey :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan 1 tanggal 3 April 2023 dengan nilai 94,98 2. Triwulan 2 tanggal 5 Juli 2023 dengan nilai 95,64 3. Triwulan 3 tanggal 5 Okt 2023 dengan nilai 95,99 4. Triwulan 4 tanggal 5 Jan 2024 dengan nilai 93,92 	-	-
5).	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey	<p>Telah dilakukan evaluasi hasil survey triwulan 4 berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Atas Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tertanggal 05 Januari 2024</p>	-	-

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
1).	Memeriksa upload e-doc putusan	Terdapat 333 pengiriman salinan putusan perkara perdata dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.	-	-
2).	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Berdasarkan data dari SIPP banding, bahwa 333 pengiriman salinan putusan perkara perdata tidak melebihi 14 hari.	-	-
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
1).	Memeriksa upload e-doc putusan	Terdapat 168 pengiriman salinan putusan perkara pidana dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2023		
		Berdasarkan data dari SIPP banding, bahwa 168 pengiriman salinan putusan perkara pidana tidak melebihi 14 hari.		

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
1).	Memeriksa upload e-doc putusan	Terdapat 62 pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 (14 perkara pidana anak dan 48 perkara tipikor).	-	-
2).	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Berdasarkan data dari SIPP banding, bahwa 62 pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus tidak melebihi 14 hari.	-	-



Serang, 22 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Banten,

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.



LAMPIRAN 15

DATA PERKARA PERDATA YANG
DIPUTUS TAHUN 2023

**DATA PERKARA PERDATA BANDING UNTUK LAPORAN KINERJA (SAKIP) BULAN DESEMBER TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

I. DATA PERKARA PERDATA YANG DIPUTUS PADA BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
1	298/PDT/2022/PT BTN	1156/Pdt.G/2021/PN Tng	24 Nov. 2022	11 Jan. 2023	12 Jan. 2023	49 hari	13 Jan. 2023	-
2	305/PDT/2022/PT BTN	281/Pdt.Bth/2022/PN Tng	09 Des. 2022	11 Jan. 2023	11 Jan. 2023	33 hari	11 Jan. 2023	-
3	306/PDT/2022/PT BTN	10/Pdt.G/2022/PN Rkb	09 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	26 hari	05 Jan. 2023	-
4	307/PDT/2022/PT BTN	750/Pdt.G/2022/PN Tng	16 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	19 hari	05 Jan. 2023	15 Feb. 2023
5	308/PDT/2022/PT BTN	935/Pdt.G/2020/PN Tng	16 Des. 2022	12 Jan. 2023	12 Jan. 2023	27 hari	13 Jan. 2023	09 Feb. 2023
6	309/PDT/2022/PT BTN	521/Pdt.G/2021/PN Tng	16 Des. 2022	11 Jan. 2023	12 Jan. 2023	27 hari	12 Jan. 2023	17 Apr. 2023
7	310/PDT/2022/PT BTN	367/Pdt.Bth/2022/PN Tng	16 Des. 2022	11 Jan. 2023	11 Jan. 2023	26 hari	12 Jan. 2023	-
8	311/PDT/2022/PT BTN	1292/Pdt.G/2021/PN Tng	16 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	19 hari	05 Jan. 2023	25 Jan. 2023
9	312/PDT/2022/PT BTN	401/Pdt.G/2022/PN Tng	16 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	19 hari	05 Jan. 2023	03 Feb. 2023
10	315/PDT/2022/PT BTN	939/Pdt.G/2021/PN Tng	19 Des. 2022	10 Jan. 2023	10 Jan. 2023	22 hari	10 Jan. 2023	17 Mar. 2023
11	316/PDT/2022/PT BTN	454/Pdt.G/2020/PN Tng	19 Des. 2022	12 Jan. 2023	12 Jan. 2023	24 hari	13 Jan. 2023	-
12	317/PDT/2022/PT BTN	1341/Pdt.G/2021/PN Tng	19 Des. 2022	18 Jan. 2023	18 Jan. 2023	30 hari	18 Jan. 2023	-
13	1/PDT/2023/PT BTN	142/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Jan. 2023	18 Jan. 2023	18 Jan. 2023	16 hari	19 Jan. 2023	-
14	2/PDT/2023/PT BTN	935/Pdt.Bth/2021/PN Tng	02 Jan. 2023	18 Jan. 2023	18 Jan. 2023	16 hari	18 Jan. 2023	15 Mar. 2023
15	3/PDT/2023/PT BTN	331/Pdt.G/2021/PN Tng	02 Jan. 2023	24 Jan. 2023	24 Jan. 2023	22 hari	25 Jan. 2023	03 feb.2023
16	5/PDT/2023/PT BTN	1066/Pdt.G/2021/PN Tng	02 Jan. 2023	25 Jan. 2023	25 Jan. 2023	23 hari	25 Jan. 2023	-
17	6/PDT/2023/PT BTN	124/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Jan. 2023	19 Jan. 2023	20 Jan. 2023	18 hari	25 Jan. 2023	10 Mar. 2023
18	7/PDT/2023/PT BTN	134/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Jan. 2023	26 Jan. 2023	27 Jan. 2023	25 hari	27 Jan. 2023	-
19	8/PDT/2023/PT BTN	20/Pdt.G/2022/PN Srg	02 Jan. 2023	25 Jan. 2023	25 Jan. 2023	23 hari	27 Jan. 2023	20 Feb. 2023
20	12/PDT/2023/PT BTN	217/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Jan. 2023	31 Jan. 2023	31 Jan. 2023	25 hari	01 Feb. 2023	-
21	14/PDT/2023/PT BTN	849/Pdt.G/2020/PN Tng	06 Jan. 2023	25 Jan. 2023	25 Jan. 2023	19 hari	25 Jan. 2023	21 Feb. 2023
22	15/PDT/2023/PT BTN	690/Pdt.G/2021/PN Tng	09 Jan. 2023	31 Jan. 2023	31 Jan. 2023	22 hari	01 Feb. 2023	07 Mar. 2023
23	21/PDT/2023/PT BTN	76/Pdt.G/2022/PN Srg	11 Jan. 2023	25 Jan. 2023	25 Jan. 2023	14 hari	25 Jan. 2023	15 Feb. 2023
24	313/PDT/2022/PT BTN	76/Pdt.G/2022/PN Tng	19 Des. 2022	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	44 hari	02 Feb. 2023	10 Mar. 2023
25	4/PDT/2023/PT BTN	912/Pdt.G/2021/PN Tng	02 Jan. 2023	07 Feb. 2023	07 Feb. 2023	36 hari	07 Feb. 2023	-
26	9/PDT/2023/PT BTN	759/Pdt.G/2021/PN Tng	06 Jan. 2023	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	26 hari	02 Feb. 2023	06 Mar. 2023
27	10/PDT/2023/PT BTN	44/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Jan. 2023	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	26 hari	01 Feb. 2023	20 Feb. 2023
28	11/PDT/2023/PT BTN	251/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Jan. 2023	15 Feb. 2023	15 Feb. 2023	40 hari	15 Feb. 2023	22 Jun. 2023
29	13/PDT/2023/PT BTN	858/Pdt.G/2020/PN Tng	06 Jan. 2023	06 Feb. 2023	06 Feb. 2023	31 hari	06 Feb. 2023	06 Apr. 2023
30	16/PDT/2023/PT BTN	9/Pdt.G/2022/PN Rkb	09 Jan. 2023	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	23 hari	02 Feb. 2023	-
31	17/PDT/2023/PT BTN	357/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jan. 2023	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	22 hari	02 Feb. 2023	-
32	18/PDT/2023/PT BTN	763/Pdt.G/2017/PN Tng	10 Jan. 2023	06 Feb. 2023	06 Feb. 2023	27 hari	06 Feb. 2023	-
33	19/PDT/2023/PT BTN	380/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jan. 2023	13 Feb. 2023	13 Feb. 2023	34 hari	14 Feb. 2023	29 Mar. 2023
34	20/PDT/2023/PT BTN	335/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jan. 2023	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	22 hari	02 Feb. 2023	13 Feb. 2023
35	22/PDT/2023/PT BTN	158/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Jan. 2023	07 Feb. 2023	07 Feb. 2023	27 hari	07 Feb. 2023	09 Mar. 2023
36	23/PDT/2023/PT BTN	1401/Pdt.G/2021/PN Tng	11 Jan. 2023	02 Feb. 2023	02 Feb. 2023	22 hari	02 Feb. 2023	15 Mar. 2023
37	24/PDT/2023/PT BTN	1146/Pdt.G/2021/PN Tng	17 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	30 hari	16 Feb. 2023	04 Apr. 2023
38	25/PDT/2023/PT BTN	897/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jan. 2023	08 Feb. 2023	08 Feb. 2023	22 hari	08 Feb. 2023	08 Mar. 2023
39	26/PDT/2023/PT BTN	757/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	30 hari	16 Feb. 2023	30 Mar. 2023
40	27/PDT/2023/PT BTN	399/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jan. 2023	08 Feb. 2023	08 Feb. 2023	22 hari	08 Feb. 2023	15 Mar. 2023
41	28/PDT/2023/PT BTN	120/Pdt.G/2021/PN Tng	20 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	27 hari	16 Feb. 2023	24 Mar. 2023
42	29/PDT/2023/PT BTN	145/Pdt.G/2021/PN Srg	20 Jan. 2023	09 Feb. 2023	09 Feb. 2023	20 hari	09 Feb. 2023	14 Mar. 2023
43	30/PDT/2023/PT BTN	74/Pdt.G/2022/PN Srg	20 Jan. 2023	15 Feb. 2023	15 Feb. 2023	26 hari	15 Feb. 2023	23 Mei 2023
44	33/PDT/2023/PT BTN	93/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Jan. 2023	15 Feb. 2023	15 Feb. 2023	19 hari	15 Feb. 2023	-
45	34/PDT/2023/PT BTN	100/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Jan. 2023	22 Feb. 2023	22 Feb. 2023	26 hari	23 Feb. 2023	06 Apr. 2023
46	35/PDT/2023/PT BTN	330/Pdt.G/2022/PN Tng	30 Jan. 2023	21 Feb. 2023	21 Feb. 2023	22 hari	23 Feb. 2023	-
47	36/PDT/2023/PT BTN	368/Pdt.G/2022/PN Tng	30 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	17 hari	16 Feb. 2023	-
48	37/PDT/2023/PT BTN	831/Pdt.G/2022/PN Tng	30 Jan. 2023	21 Feb. 2023	21 Feb. 2023	22 hari	21 Feb. 2023	-
49	40/PDT/2023/PT BTN	193/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Feb. 2023	20 Feb. 2023	20 Feb. 2023	18 hari	21 Feb. 2023	-
50	41/PDT/2023/PT BTN	801/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Feb. 2023	23 Feb. 2023	23 Feb. 2023	21 hari	24 Feb. 2023	21 Mar. 2023
51	43/PDT/2023/PT BTN	978/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Feb. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	14 hari	16 Feb. 2023	-
52	46/PDT/2023/PT BTN	516/Pdt.G/2022/PN Tng	07 Feb. 2023	22 Feb. 2023	22 Feb. 2023	15 hari	23 Feb. 2023	-
53	50/PDT/2023/PT BTN	1382/Pdt.G/2021/PN Tng	08 Feb. 2023	28 Feb. 2023	28 Feb. 2023	20 hari	28 Feb. 2023	27 Mar. 2023
54	60/PDT/2023/PT BTN	99/Pdt.G/2019/PN Tng	13 Feb. 2023	27 Feb. 2023	27 Feb. 2023	14 hari	27 Feb. 2023	28 Mar. 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
55	31/PDT/2023/PT BTN	278/Pdt.G/2021/PN Tng	27 Jan. 2023	09 Mar. 2023	09 Mar. 2023	41 hari	10 Mar. 2023	-
56	32/PDT/2023/PT BTN	215/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Jan. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	39 hari	07 Mar. 2023	17 Apr. 2023
57	38/PDT/2023/PT BTN	196/Pdt.G/2022/PN Tng	30 Jan. 2023	02 Mar. 2023	02 Mar. 2023	31 hari	03 Mar. 2023	20 Mar. 2023
58	39/PDT/2023/PT BTN	393/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Feb. 2023	08 Mar. 2023	08 Mar. 2023	34 hari	09 Mar. 2023	14 Apr. 2023
59	42/PDT/2023/PT BTN	14/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Feb. 2023	08 Mar. 2023	08 Mar. 2023	34 hari	09 Mar. 2023	-
60	44/PDT/2023/PT BTN	293/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Feb. 2023	02 Mar. 2023	02 Mar. 2023	28 hari	02 Mar. 2023	31 Mar. 2023
61	45/PDT/2023/PT BTN	109/Pdt.G/2022/PN Srg	02 Feb. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	33 hari	07 Mar. 2023	24 Mar. 2023
62	47/PDT/2023/PT BTN	358/Pdt.G/2020/PN Tng	07 Feb. 2023	01 Mar. 2023	01 Mar. 2023	22 hari	01 Mar. 2023	-
63	48/PDT/2023/PT BTN	733/Pdt.G/2022/PN Tng	07 Feb. 2023	01 Mar. 2023	01 Mar. 2023	22 hari	01 Mar. 2023	-
64	49/PDT/2023/PT BTN	52/Pdt.G/2022/PN Srg	07 Feb. 2023	01 Mar. 2023	01 Mar. 2023	22 hari	01 Mar. 2023	-
65	51/PDT/2023/PT BTN	53/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Feb. 2023	01 Mar. 2023	01 Mar. 2023	21 hari	01 Mar. 2023	-
66	52/PDT/2023/PT BTN	1028/Pdt.G/2021/PN Tng	09 Feb. 2023	13 Mar. 2023	13 Mar. 2023	32 hari	14 Mar. 2023	09 Mei 2023
67	53/PDT/2023/PT BTN	1102/Pdt.G/2020/PN Tng	09 Feb. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	26 hari	07 Mar. 2023	12 Apr. 2023
68	54/PDT/2023/PT BTN	204/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Feb. 2023	06 Mar. 2023	06 Mar. 2023	25 hari	07 Mar. 2023	10 Apr. 2023
69	55/PDT/2023/PT BTN	1197/Pdt.G/2020/PN Tng	13 Feb. 2023	14 Mar. 2023	14 Mar. 2023	29 hari	14 Mar. 2023	-
70	56/PDT/2023/PT BTN	787/Pdt.G/2020/PN Tng	13 Feb. 2023	14 Mar. 2023	14 Mar. 2023	29 hari	14 Mar. 2023	11 Mei 2023
71	57/PDT/2023/PT BTN	194/Pdt.G/2020/PN Tng	13 Feb. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	22 hari	07 Mar. 2023	-
72	58/PDT/2023/PT BTN	912/Pdt.G/2019/PN Tng	13 Feb. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	22 hari	07 Mar. 2023	-
73	59/PDT/2023/PT BTN	130/Pdt.G/2021/PN Tng	13 Feb. 2023	06 Mar. 2023	06 Mar. 2023	21 hari	06 Mar. 2023	-
74	61/PDT/2023/PT BTN	416/Pdt.G/2020/PN Tng	13 Feb. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	22 hari	07 Mar. 2023	-
75	62/PDT/2023/PT BTN	36/Pdt.G/2022/PN Srg	14 Feb. 2023	08 Mar. 2023	08 Mar. 2023	22 hari	09 Mar. 2023	-
76	63/PDT/2023/PT BTN	431/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Feb. 2023	08 Mar. 2023	08 Mar. 2023	22 hari	09 Mar. 2023	11 Apr. 2023
77	64/PDT/2023/PT BTN	1029/Pdt.Bth/2021/PN Tng	15 Feb. 2023	14 Mar. 2023	14 Mar. 2023	27 hari	14 Mar. 2023	-
78	65/PDT/2023/PT BTN	77/Pdt.G/2022/PN Srg	15 Feb. 2023	16 Mar. 2023	16 Mar. 2023	29 hari	16 Mar. 2023	12 Apr. 2023
79	66/PDT/2023/PT BTN	669/Pdt.G/2022/PN Tng	15 Feb. 2023	09 Mar. 2023	10 Mar. 2023	23 hari	13 Mar. 2023	11 Apr. 2023
80	67/PDT/2023/PT BTN	586/Pdt.G/2021/PN Tng	15 Feb. 2023	09 Mar. 2023	09 Mar. 2023	22 hari	10 Mar. 2023	26 Jun. 2023
81	68/PDT/2023/PT BTN	30/Pdt.G/2022/PN Srg	21 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	28 hari	21 Mar. 2023	-
82	69/PDT/2023/PT BTN	429/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	28 hari	21 Mar. 2023	-
83	70/PDT/2023/PT BTN	179/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	28 hari	21 Mar. 2023	-
84	71/PDT/2023/PT BTN	477/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Feb. 2023	20 Mar. 2023	20 Mar. 2023	27 hari	20 Mar. 2023	17 Mei 2023
85	72/PDT/2023/PT BTN	1210/Pdt.G/2021/PN Tng	21 Feb. 2023	15 Mar. 2023	15 Mar. 2023	22 hari	15 Mar. 2023	14 Apr. 2023
86	73/PDT/2023/PT BTN	813/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Feb. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	35 hari	28 Mar. 2023	15 Mei 2023
87	74/PDT/2023/PT BTN	440/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Feb. 2023	15 Mar. 2023	15 Mar. 2023	22 hari	15 Mar. 2023	05 Apr. 2023
88	75/PDT/2023/PT BTN	919/Pdt.G/2019/PN Tng	21 Feb. 2023	15 Mar. 2023	15 Mar. 2023	22 hari	15 Mar. 2023	17 Apr. 2023
89	76/PDT/2023/PT BTN	118/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	28 hari	21 Mar. 2023	11 Apr. 2023
90	77/PDT/2023/PT BTN	803/Pdt.G/2021/PN Tng	21 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	28 hari	21 Mar. 2023	14 apr.2023
91	78/PDT/2023/PT BTN	79/Pdt.G/2022/PN Srg	21 Feb. 2023	14 Mar. 2023	14 Mar. 2023	21 hari	14 Mar. 2023	-
92	79/PDT/2023/PT BTN	550/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Feb. 2023	10 Mar. 2023	10 Mar. 2023	11 hari	10 Mar. 2023	-
93	80/PDT/2023/PT BTN	535/Pdt.G/2021/PN Tng	27 Feb. 2023	09 Mar. 2023	09 Mar. 2023	10 hari	10 Mar. 2023	17 Apr. 2023
94	81/PDT/2023/PT BTN	9/Pdt.G/2022/PN Pdl	27 Feb. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	29 hari	29 Mar. 2023	18 Apr. 2023
95	82/PDT/2023/PT BTN	1045/Pdt.G/2021/PN Tng	27 Feb. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	29 hari	28 Mar. 2023	-
96	84/PDT/2023/PT BTN	603/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Feb. 2023	20 Mar. 2023	21 Mar. 2023	22 hari	21 Mar. 2023	17 Apr. 2023
97	85/PDT/2023/PT BTN	50/Pdt.G/2021/PN Tng	27 Feb. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	29 hari	28 Mar. 2023	31 Mei 2023
98	86/PDT/2023/PT BTN	860/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	22 hari	21 Mar. 2023	-
99	87/PDT/2023/PT BTN	28/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Feb. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	29 hari	28 Mar. 2023	06 Okt. 2023
100	88/PDT/2023/PT BTN	196/Pdt.G/2019/PN Tng	27 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	22 hari	21 Mar. 2023	15 Mei 2023
101	89/PDT/2023/PT BTN	933/Pdt.G/2022/PN Tng	03 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	27 hari	30 Mar. 2023	-
102	90/PDT/2023/PT BTN	843/Pdt.G/2022/PN Tng	03 Mar. 2023	29 Mar. 2023	29 Mar. 2023	26 hari	29 Mar. 2023	-
103	92/PDT/2023/PT BTN	418/Pdt.G/2022/PN Tng	03 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	27 hari	30 Mar. 2023	-
104	93/PDT/2023/PT BTN	51/Pdt.G/2022/PN Tng	03 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	27 hari	30 Mar. 2023	-
105	94/PDT/2023/PT BTN	1158/Pdt.G/2021/PN Tng	03 Mar. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	25 hari	29 Mar. 2023	16 Mei 2023
106	95/PDT/2023/PT BTN	305/Pdt.Bth/2022/PN Tng	03 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	27 hari	30 Mar. 2023	-
107	96/PDT/2023/PT BTN	339/Pdt.G/2021/PN Tng	03 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	27 hari	30 Mar. 2023	-
108	98/PDT/2023/PT BTN	134/Pdt.G/2022/PN Srg	03 Mar. 2023	29 Mar. 2023	29 Mar. 2023	26 hari	29 Mar. 2023	29 Mei 2023
109	99/PDT/2023/PT BTN	129/Pdt.G/2022/PN Srg	03 Mar. 2023	29 Mar. 2023	29 Mar. 2023	26 hari	29 Mar. 2023	-
110	83/PDT/2023/PT BTN	272/Pdt.G/2022/PN Tng	27 Feb. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	36 hari	05 Apr. 2023	24 Mei 2023
111	91/PDT/2023/PT BTN	582/Pdt.G/2022/PN Tng	03 Mar. 2023	05 Apr. 2023	05 Apr. 2023	33 hari	06 Apr. 2023	-
112	97/PDT/2023/PT BTN	1234/Pdt.G/2021/PN Tng	03 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	39 hari	11 Apr. 2023	23 Mei 2023
113	100/PDT/2023/PT BTN	538/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Mar. 2023	14 Apr. 2023	14 Apr. 2023	36 hari	14 Apr. 2023	20 jun.2023
114	101/PDT/2023/PT BTN	720/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	33 hari	11 Apr. 2023	-
115	102/PDT/2023/PT BTN	684/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Mar. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	26 hari	05 Apr. 2023	19 Mei 2023
116	103/PDT/2023/PT BTN	529/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Mar. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	26 hari	05 Apr. 2023	26 jun.2023
117	104/PDT/2023/PT BTN	443/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	29 hari	11 Apr. 2023	31 Mei 2023
118	105/PDT/2023/PT BTN	404/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	14 Apr. 2023	14 Apr. 2023	32 hari	14 Apr. 2023	29 mei 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
119	106/PDT/2023/PT BTN	32/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	06 Apr. 2023	06 Apr. 2023	24 hari	06 Apr. 2023	23 Mei 2023
120	107/PDT/2023/PT BTN	653/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	30 hari	12 Apr. 2023	15 Jun. 2023
121	108/PDT/2023/PT BTN	407/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	22 hari	05 Apr. 2023	19 Jun.2023
122	109/PDT/2023/PT BTN	805/Pdt.G/2021/PN Tng	13 Mar. 2023	05 Apr. 2023	05 Apr. 2023	23 hari	05 Apr. 2023	04 Jul. 2023
123	111/PDT/2023/PT BTN	1347/Pdt.G/2021/PN Tng	13 Mar. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	22 hari	05 Apr. 2023	-
124	112/PDT/2023/PT BTN	551/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Mar. 2023	10 Apr. 2023	10 Apr. 2023	27 hari	11 Apr. 2023	14 Jun. 2023
125	113/PDT/2023/PT BTN	138/Pdt.G/2020/PN Tng	14 Mar. 2023	05 Apr. 2023	05 Apr. 2023	22 hari	06 Apr. 2023	-
126	114/PDT/2023/PT BTN	17/Pdt.G/2022/PN Rkb	14 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	28 hari	11 Apr. 2023	16 Mei 2023
127	115/PDT/2023/PT BTN	716/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	29 hari	12 Apr. 2023	-
128	116/PDT/2023/PT BTN	210/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	29 hari	12 Apr. 2023	05 Jun. 2023
129	117/PDT/2023/PT BTN	174/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	29 hari	12 Apr. 2023	12 Jun. 2023
130	120/PDT/2023/PT BTN	521/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mar. 2023	10 Apr. 2023	10 Apr. 2023	17 hari	11 Apr. 2023	22 Mei 2023
131	121/PDT/2023/PT BTN	1080/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mar. 2023	10 Apr. 2023	10 Apr. 2023	17 hari	10 Apr. 2023	22 Mei 2023
132	110/PDT/2023/PT BTN	621/Pdt.G/2021/PN Tng	13 Mar. 2023	09 Mei. 2023	09 Mei. 2023	57 hari	09 Mei. 2023	-
133	118/PDT/2023/PT BTN	1017/Pdt.G/2021/PN Tng	24 Mar. 2023	03 Mei. 2023	03 Mei. 2023	40 hari	03 Mei. 2023	12 Jun. 2023
134	119/PDT/2023/PT BTN	565/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mar. 2023	04 Mei. 2023	04 Mei. 2023	41 hari	04 Mei. 2023	-
135	122/PDT/2023/PT BTN	98/Pdt.G/2022/PN Srg	24 Mar. 2023	05 Mei. 2023	05 Mei. 2023	42 hari	08 Mei. 2023	26 Jun. 2023
136	123/PDT/2023/PT BTN	831/Pdt.G/2020/PN Tng	24 Mar. 2023	09 Mei. 2023	09 Mei. 2023	46 hari	09 Mei. 2023	21 Jun. 2023
137	124/PDT/2023/PT BTN	385/Pdt.G/2022/PN Tng	03 Apr. 2023	10 Mei. 2023	10 Mei. 2023	37 hari	10 Mei. 2023	-
138	125/PDT/2023/PT BTN	1071/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	04 Mei. 2023	04 Mei. 2023	28 hari	04 Mei. 2023	-
139	126/PDT/2023/PT BTN	197/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	04 Mei. 2023	04 Mei. 2023	28 hari	04 Mei. 2023	-
140	127/PDT/2023/PT BTN	1413/Pdt.G/2021/PN Tng	06 Apr. 2023	04 Mei. 2023	04 Mei. 2023	28 hari	04 Mei. 2023	-
141	128/PDT/2023/PT BTN	845/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	04 Mei. 2023	04 Mei. 2023	28 hari	04 Mei. 2023	30 Mei 2023
142	129/PDT/2023/PT BTN	719/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	08 Mei. 2023	08 Mei. 2023	32 hari	09 Mei. 2023	-
143	130/PDT/2023/PT BTN	115/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	04 Mei. 2023	04 Mei. 2023	28 hari	05 Mei. 2023	22 Agu. 2023
144	131/PDT/2023/PT BTN	427/Pdt.Bth/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	15 Mei. 2023	15 Mei. 2023	39 hari	15 Mei. 2023	-
145	132/PDT/2023/PT BTN	847/Pdt.G/2022/PN Tng	06 Apr. 2023	15 Mei. 2023	15 Mei. 2023	39 hari	15 Mei. 2023	22 Jun. 2023
146	133/PDT/2023/PT BTN	888/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Apr. 2023	09 Mei. 2023	09 Mei. 2023	26 hari	09 Mei. 2023	-
147	134/PDT/2023/PT BTN	827/Pdt.G/2020/PN Tng	13 Apr. 2023	11 Mei. 2023	11 Mei. 2023	28 hari	11 Mei. 2023	-
148	135/PDT/2023/PT BTN	794/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Apr. 2023	16 Mei. 2023	16 Mei. 2023	33 hari	16 Mei. 2023	23 Jun. 2023
149	136/PDT/2023/PT BTN	818/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Apr. 2023	15 Mei. 2023	15 Mei. 2023	32 hari	15 Mei. 2023	27 Jun. 2023
150	137/PDT/2023/PT BTN	448/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Apr. 2023	26 Mei. 2023	26 Mei. 2023	42 hari	26 Mei. 2023	15 Jun. 2023
151	138/PDT/2023/PT BTN	16/Pdt.G/2022/PN Pdl	14 Apr. 2023	15 Mei. 2023	15 Mei. 2023	31 hari	15 Mei. 2023	23 Jun. 2023
152	139/PDT/2023/PT BTN	1295/Pdt.G/2021/PN Tng	17 Apr. 2023	30 Mei. 2023	30 Mei. 2023	43 hari	30 Mei. 2023	-
153	140/PDT/2023/PT BTN	164/Pdt.G/2022/PN Srg	18 Apr. 2023	17 Mei. 2023	17 Mei. 2023	29 hari	17 Mei. 2023	26 Jun. 2023
154	141/PDT/2023/PT BTN	104/Pdt.G/2022/PN Srg	03 Mei. 2023	29 Mei. 2023	29 Mei. 2023	26 hari	29 Mei. 2023	04 Jul. 2023
155	142/PDT/2023/PT BTN	1140/Pdt.G/2019/PN Tng	11 Mei. 2023	30 Mei. 2023	30 Mei. 2023	19 hari	30 Mei. 2023	03 Jul. 2023
156	143/PDT/2023/PT BTN	2/Pdt.G/2023/PN Tng	11 Mei. 2023	24 Mei. 2023	24 Mei. 2023	13 hari	24 Mei. 2023	-
157	145/PDT/2023/PT BTN	660/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Mei. 2023	31 Mei. 2023	31 Mei. 2023	20 hari	31 Mei. 2023	28 Jul. 2023
158	147/PDT/2023/PT BTN	707/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Mei. 2023	31 Mei. 2023	31 Mei. 2023	20 hari	31 Mei. 2023	14 Jul. 2023
159	144/PDT/2023/PT BTN	202/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Mei. 2023	16 Jun. 2023	16 Jun. 2023	36 hari	16 Jun. 2023	31 Jul. 2023
160	146/PDT/2023/PT BTN	1195/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Mei. 2023	27 Jun. 2023	27 Jun. 2023	47 hari	27 Jun. 2023	-
161	148/PDT/2023/PT BTN	169/Pdt.G/2022/PN Srg	11 Mei. 2023	06 Jun. 2023	06 Jun. 2023	26 hari	07 Jun. 2023	26 Jun. 2023
162	149/PDT/2023/PT BTN	2/Pdt.G/2022/PN Tng	19 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	33 hari	21 Jun. 2023	-
163	150/PDT/2023/PT BTN	826/Pdt.G/2022/PN Tng	19 Mei. 2023	12 Jun. 2023	12 Jun. 2023	24 hari	12 Jun. 2023	26 Jul. 2023
164	151/PDT/2023/PT BTN	1026/Pdt.G/2022/PN Tng	19 Mei. 2023	27 Jun. 2023	27 Jun. 2023	39 hari	27 Jun. 2023	-
165	152/PDT/2023/PT BTN	572/Pdt.G/2022/PN Tng	19 Mei. 2023	14 Jun. 2023	14 Jun. 2023	26 hari	14 Jun. 2023	21 Jul. 2023
166	153/PDT/2023/PT BTN	146/Pdt.G/2022/PN Srg	19 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	33 hari	22 Jun. 2023	27 Jul. 2023
167	154/PDT/2023/PT BTN	186/Pdt.G/2022/PN Srg	24 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	28 hari	22 Jun. 2023	-
168	155/PDT/2023/PT BTN	240/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	28 hari	21 Jun. 2023	20 Jul. 2023
169	156/PDT/2023/PT BTN	646/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	27 Jun. 2023	27 Jun. 2023	34 hari	27 Jun. 2023	-
170	157/PDT/2023/PT BTN	140/Pdt.G/2022/PN Srg	24 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	28 hari	21 Jun. 2023	-
171	158/PDT/2023/PT BTN	641/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	28 hari	21 Jun. 2023	26 Jul. 2023
172	159/PDT/2023/PT BTN	172/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	26 Jun. 2023	26 Jun. 2023	33 hari	26 Jun. 2023	08 Agu. 2023
173	160/PDT/2023/PT BTN	649/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	19 Jun. 2023	19 Jun. 2023	26 hari	19 Jun. 2023	20 Jul. 2023
174	161/PDT/2023/PT BTN	1000/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	27 Jun. 2023	27 Jun. 2023	34 hari	27 Jun. 2023	08 Agu. 2023
175	162/PDT/2023/PT BTN	1090/Pdt.G/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	19 Jun. 2023	19 Jun. 2023	26 hari	19 Jun. 2023	-
176	163/PDT/2023/PT BTN	1283/Pdt.G/2021/PN Tng	24 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	28 hari	21 Jun. 2023	-
177	164/PDT/2023/PT BTN	792/Pdt.Bth/2022/PN Tng	24 Mei. 2023	15 Jun. 2023	15 Jun. 2023	22 hari	15 Jun. 2023	-
178	165/PDT/2023/PT BTN	5/Pdt.G/2022/PN Rkb	26 Mei. 2023	27 Jun. 2023	27 Jun. 2023	32 hari	27 Jun. 2023	25 Jul. 2023
179	166/PDT/2023/PT BTN	305/Pdt.G/2019/PN Tng	26 Mei. 2023	19 Jun. 2023	19 Jun. 2023	24 hari	19 Jun. 2023	-
180	168/PDT/2023/PT BTN	111/Pdt.G/2022/PN Srg	05 Jun. 2023	26 Jun. 2023	26 Jun. 2023	21 hari	26 Jun. 2023	23 Agu. 2023
181	167/PDT/2023/PT BTN	863/Pdt.G/2022/PN Tng	05 Jun. 2023	06 Jul. 2023	06 Jul. 2023	31 hari	07 Jul. 2023	-
182	169/PDT/2023/PT BTN	122/Pdt.G/2022/PN Srg	05 Jun. 2023	06 Jul. 2023	07 Jul. 2023	32 hari	10 Jul. 2023	-

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
183	170/PDT/2023/PT BTN	171/Pdt.G/2022/PN Srg	12 Jun. 2023	10 Jul. 2023	10 Jul. 2023	28 hari	10 Jul. 2023	22 Agu. 2023
184	171/PDT/2023/PT BTN	1142/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	13 Jul. 2023	13 Jul. 2023	31 hari	13 Jul. 2023	16 Agu. 2023
185	172/PDT/2023/PT BTN	663/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	11 Jul. 2023	11 Jul. 2023	29 hari	11 Jul. 2023	-
186	173/PDT/2023/PT BTN	969/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	17 Jul. 2023	17 Jul. 2023	35 hari	17 Jul. 2023	03 Agu. 2023
187	174/PDT/2023/PT BTN	256/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	05 Jul. 2023	05 Jul. 2023	23 hari	05 Jul. 2023	27 Jul. 2023
188	175/PDT/2023/PT BTN	121/Pdt.G/2022/PN Srg	12 Jun. 2023	20 Jul. 2023	20 Jul. 2023	38 hari	20 Jul. 2023	15 Agu. 2023
189	176/PDT/2023/PT BTN	874/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	05 Jul. 2023	05 Jul. 2023	23 hari	05 Jul. 2023	22 Jun. 2023
190	177/PDT/2023/PT BTN	1022/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	10 Jul. 2023	10 Jul. 2023	28 hari	10 Jul. 2023	22 Agu. 2023
191	178/PDT/2023/PT BTN	916/Pdt.Bth/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	06 Jul. 2023	06 Jul. 2023	24 hari	07 Jul. 2023	-
192	179/PDT/2023/PT BTN	138/Pdt.G/2022/PN Tng	12 Jun. 2023	12 Jul. 2023	12 Jul. 2023	30 hari	12 Jul. 2023	-
193	180/PDT/2023/PT BTN	830/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Jun. 2023	25 Jul. 2023	25 Jul. 2023	41 hari	25 Jul. 2023	-
194	181/PDT/2023/PT BTN	705/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Jun. 2023	05 Jul. 2023	05 Jul. 2023	22 hari	06 Jul. 2023	-
195	182/PDT/2023/PT BTN	387/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Jun. 2023	12 Jul. 2023	12 Jul. 2023	21 hari	13 Jul. 2023	-
196	183/PDT/2023/PT BTN	740/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Jun. 2023	12 Jul. 2023	12 Jul. 2023	21 hari	12 Jul. 2023	-
197	184/PDT/2023/PT BTN	914/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Jun. 2023	25 Jul. 2023	25 Jul. 2023	34 hari	25 Jul. 2023	-
198	185/PDT/2023/PT BTN	1055/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Jun. 2023	25 Jul. 2023	25 Jul. 2023	34 hari	25 Jul. 2023	04 Sep. 2023
199	186/PDT/2023/PT BTN	163/Pdt.G/2022/PN Srg	21 Jun. 2023	18 Jul. 2023	18 Jul. 2023	27 hari	18 Jul. 2023	-
200	189/PDT/2023/PT BTN	1089/Pdt.G/2022/PN Tng	04 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	23 hari	27 Jul. 2023	-
201	190/PDT/2023/PT BTN	184/Pdt.G/2022/PN Srg	04 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	23 hari	31 Jul. 2023	25 Agu. 2023
202	192/PDT/2023/PT BTN	18/Pdt.G/2022/PN Tng	04 Jul. 2023	17 Jul. 2023	17 Jul. 2023	13 hari	18 Jul. 2023	18 Agu. 2023
203	193/PDT/2023/PT BTN	24/Pdt.G/2022/PN Pdl	04 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	23 hari	27 Jul. 2023	04 Agu. 2023
204	202/PDT/2023/PT BTN	311/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	16 hari	27 Jul. 2023	28 Agu. 2023
205	187/PDT/2023/PT BTN	490/Pdt.G/2022/PN Tng	04 Jul. 2023	03 Agu. 2023	03 Agu. 2023	30 hari	04 Agu. 2023	08 Sep. 2023
206	188/PDT/2023/PT BTN	110/Pdt.G/2021/PN Srg	04 Jul. 2023	01 Agu. 2023	01 Agu. 2023	28 hari	02 Agu. 2023	07 Sep. 2023
207	191/PDT/2023/PT BTN	5/Pdt.G/2023/PN Srg	04 Jul. 2023	15 Agu. 2023	15 Agu. 2023	42 hari	16 Agu. 2023	-
208	194/PDT/2023/PT BTN	780/Pdt.G/2022/PN Tng	05 Jul. 2023	02 Agu. 2023	02 Agu. 2023	28 hari	02 Agu. 2023	22 Sep. 2023
209	195/PDT/2023/PT BTN	815/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jul. 2023	02 Agu. 2023	02 Agu. 2023	23 hari	02 Agu. 2023	05 Sep. 2023
210	196/PDT/2023/PT BTN	265/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jul. 2023	02 Agu. 2023	02 Agu. 2023	23 hari	02 Agu. 2023	-
211	197/PDT/2023/PT BTN	1299/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jul. 2023	01 Agu. 2023	01 Agu. 2023	22 hari	02 Agu. 2023	-
212	198/PDT/2023/PT BTN	738/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jul. 2023	15 Agu. 2023	15 Agu. 2023	36 hari	15 Agu. 2023	-
213	199/PDT/2023/PT BTN	1072/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jul. 2023	02 Agu. 2023	02 Agu. 2023	23 hari	02 Agu. 2023	19 Sep. 2023
214	200/PDT/2023/PT BTN	1132/Pdt.G/2022/PN Tng	10 Jul. 2023	01 Agu. 2023	01 Agu. 2023	22 hari	01 Agu. 2023	-
215	201/PDT/2023/PT BTN	1338/Pdt.G/2021/PN Tng	11 Jul. 2023	15 Agu. 2023	15 Agu. 2023	35 hari	16 Agu. 2023	19 Sep. 2023
216	203/PDT/2023/PT BTN	960/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Jul. 2023	02 Agu. 2023	02 Agu. 2023	22 hari	03 Agu. 2023	13 Sep. 2023
217	204/PDT/2023/PT BTN	152/Pdt.G/2022/PN Srg	12 Jul. 2023	02 Agu. 2023	02 Agu. 2023	21 hari	02 Agu. 2023	-
218	205/PDT/2023/PT BTN	172/Pdt.G/2022/PN Srg	12 Jul. 2023	01 Agu. 2023	01 Agu. 2023	20 hari	01 Agu. 2023	-
219	206/PDT/2023/PT BTN	1107/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jul. 2023	24 Agu. 2023	24 Agu. 2023	38 hari	24 Agu. 2023	-
220	207/PDT/2023/PT BTN	389/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jul. 2023	09 Agu. 2023	09 Agu. 2023	23 hari	09 Agu. 2023	27 Sep. 2023
221	208/PDT/2023/PT BTN	932/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jul. 2023	09 Agu. 2023	09 Agu. 2023	23 hari	09 Agu. 2023	-
222	209/PDT/2023/PT BTN	967/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jul. 2023	09 Agu. 2023	09 Agu. 2023	23 hari	09 Agu. 2023	-
223	210/PDT/2023/PT BTN	1037/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Jul. 2023	22 Agu. 2023	22 Agu. 2023	36 hari	22 Agu. 2023	20 Sep. 2023
224	211/PDT/2023/PT BTN	1042/Pdt.G/2022/PN Tng	18 Jul. 2023	09 Agu. 2023	09 Agu. 2023	22 hari	09 Agu. 2023	18 Sep. 2023
225	212/PDT/2023/PT BTN	292/Pdt.G/2023/PN Tng	18 Jul. 2023	15 Agu. 2023	15 Agu. 2023	28 hari	15 Agu. 2023	-
226	213/PDT/2023/PT BTN	791/Pdt.G/2022/PN Tng	18 Jul. 2023	16 Agu. 2023	16 Agu. 2023	29 hari	16 Agu. 2023	25 Sep. 2023
227	214/PDT/2023/PT BTN	934/Pdt.G/2022/PN Tng	20 Jul. 2023	22 Agu. 2023	22 Agu. 2023	33 hari	22 Agu. 2023	26 Sep. 2023
228	215/PDT/2023/PT BTN	197/Pdt.G/2022/PN Srg	21 Jul. 2023	15 Agu. 2023	15 Agu. 2023	25 hari	15 Agu. 2023	31 Agu. 2023
229	216/PDT/2023/PT BTN	953/Pdt.G/2021/PN Tng	24 Jul. 2023	22 Agu. 2023	22 Agu. 2023	29 hari	23 Agu. 2023	22 Sep. 2023
230	217/PDT/2023/PT BTN	698/Pdt.G/2022/PN Tng	01 Agu. 2023	30 Agu. 2023	30 Agu. 2023	29 hari	30 Agu. 2023	-
231	218/PDT/2023/PT BTN	313/Pdt.G/2023/PN Tng	01 Agu. 2023	30 Agu. 2023	30 Agu. 2023	29 hari	30 Agu. 2023	27 Sep. 2023
232	219/PDT/2023/PT BTN	179/Pdt.G/2022/PN Srg	01 Agu. 2023	22 Agu. 2023	22 Agu. 2023	21 hari	22 Agu. 2023	18 Okt. 2023
233	220/PDT/2023/PT BTN	31/Pdt.G/2022/PN Rkb	01 Agu. 2023	22 Agu. 2023	22 Agu. 2023	21 hari	22 Agu. 2023	04 Sep. 2023
234	222/PDT/2023/PT BTN	1049/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Agu. 2023	31 Agu. 2023	31 Agu. 2023	20 hari	31 Agu. 2023	03 Okt. 2023
235	224/PDT/2023/PT BTN	100/Pdt.G/2023/PN Tng	11 Agu. 2023	30 Agu. 2023	30 Agu. 2023	19 hari	30 Agu. 2023	-
236	226/PDT/2023/PT BTN	69/Pdt.G/2023/PN Tng	11 Agu. 2023	31 Agu. 2023	31 Agu. 2023	20 hari	31 Agu. 2023	27 Sep. 2023
237	232/PDT/2023/PT BTN	1185/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Agu. 2023	31 Agu. 2023	01 Sep. 2023	11 hari	01 Sep. 2023	05 Okt. 2023
238	221/PDT/2023/PT BTN	118/Pdt.G/2022/PN Srg	11 Agu. 2023	14 Sep. 2023	14 Sep. 2023	34 hari	14 Sep. 2023	-
239	223/PDT/2023/PT BTN	400/Pdt.G/2022/PN Tng	11 Agu. 2023	07 Sep. 2023	07 Sep. 2023	27 hari	07 Sep. 2023	-
240	225/PDT/2023/PT BTN	1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng	11 Agu. 2023	07 Sep. 2023	07 Sep. 2023	27 hari	08 Sep. 2023	29 Sep. 2023
241	227/PDT/2023/PT BTN	232/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Agu. 2023	04 Sep. 2023	04 Sep. 2023	21 hari	04 Sep. 2023	-
242	228/PDT/2023/PT BTN	1078/Pdt.G/2022/PN Tng	14 Agu. 2023	14 Sep. 2023	14 Sep. 2023	31 hari	14 Sep. 2023	01 Nov. 2023
243	229/PDT/2023/PT BTN	176/Pdt.G/2022/PN Srg	16 Agu. 2023	07 Sep. 2023	07 Sep. 2023	22 hari	07 Sep. 2023	30 Okt. 2023
244	230/PDT/2023/PT BTN	1280/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Agu. 2023	14 Sep. 2023	14 Sep. 2023	24 hari	14 Sep. 2023	-
245	231/PDT/2023/PT BTN	703/Pdt.G/2022/PN Tng	21 Agu. 2023	14 Sep. 2023	14 Sep. 2023	24 hari	14 Sep. 2023	-

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
246	233/PDT/2023/PT BTN	968/Pdt.G/2022/PN Tng	28 Agu. 2023	19 Sep. 2023	19 Sep. 2023	22 hari	19 Sep. 2023	18 Okt. 2023
247	234/PDT/2023/PT BTN	159/Pdt.G/2022/PN Tng	28 Agu. 2023	26 Sep. 2023	26 Sep. 2023	29 hari	26 Sep. 2023	-
248	235/PDT/2023/PT BTN	294/Pdt.G/2022/PN Tng	28 Agu. 2023	20 Sep. 2023	20 Sep. 2023	23 hari	20 Sep. 2023	-
249	236/PDT/2023/PT BTN	1117/Pdt.G/2022/PN Tng	28 Agu. 2023	14 Sep. 2023	14 Sep. 2023	17 hari	14 Sep. 2023	-
250	237/PDT/2023/PT BTN	1121/Pdt.Bth/2022/PN Tng	28 Agu. 2023	21 Sep. 2023	21 Sep. 2023	24 hari	21 Sep. 2023	-
251	238/PDT/2023/PT BTN	919/Pdt.G/2022/PN Tng	29 Agu. 2023	19 Sep. 2023	19 Sep. 2023	21 hari	19 Sep. 2023	19 Okt. 2023
252	239/PDT/2023/PT BTN	390/Pdt.Plw/2020/PN Tng	29 Agu. 2023	19 Sep. 2023	19 Sep. 2023	21 hari	20 Sep. 2023	-
253	241/PDT/2023/PT BTN	157/Pdt.G/2022/PN Srg	31 Agu. 2023	26 Sep. 2023	26 Sep. 2023	26 hari	26 Sep. 2023	17 Okt. 2023
254	242/PDT/2023/PT BTN	84/Pdt.G/2023/PN Tng	01 Sep. 2023	21 Sep. 2023	21 Sep. 2023	20 hari	21 Sep. 2023	23 Okt. 2023
255	243/PDT/2023/PT BTN	957/Pdt.Bth/2022/PN Tng	01 Sep. 2023	21 Sep. 2023	21 Sep. 2023	20 hari	21 Sep. 2023	-
256	244/PDT/2023/PT BTN	149/Pdt.G/2023/PN Tng	04 Sep. 2023	26 Sep. 2023	26 Sep. 2023	22 hari	26 Sep. 2023	-
257	250/PDT/2023/PT BTN	921/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Sep. 2023	20 Sep. 2023	20 Sep. 2023	12 hari	20 Sep. 2023	23 Okt. 2023
258	252/PDT/2023/PT BTN	1082/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Sep. 2023	26 Sep. 2023	26 Sep. 2023	18 hari	27 Sep. 2023	23 Okt. 2023
259	240/PDT/2023/PT BTN	306/Pdt.G/2022/PN Tng	30 Agu. 2023	16 Okt. 2023	16 Okt. 2023	47 hari	16 Okt. 2023	30 Okt. 2023
260	245/PDT/2023/PT BTN	1329/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Sep. 2023	03 Okt. 2023	03 Okt. 2023	25 hari	03 Okt. 2023	07 Nov. 2023
261	246/PDT/2023/PT BTN	286/Pdt.G/2023/PN Tng	08 Sep. 2023	03 Okt. 2023	03 Okt. 2023	25 hari	03 Okt. 2023	-
262	247/PDT/2023/PT BTN	665/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Sep. 2023	03 Okt. 2023	03 Okt. 2023	25 hari	03 Okt. 2023	08 Nov. 2023
263	248/PDT/2023/PT BTN	259/Pdt.G/2023/PN Tng	08 Sep. 2023	16 Okt. 2023	16 Okt. 2023	38 hari	16 Okt. 2023	-
264	249/PDT/2023/PT BTN	869/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Sep. 2023	16 Okt. 2023	16 Okt. 2023	38 hari	16 Okt. 2023	07 Nov. 2023
265	251/PDT/2023/PT BTN	1146/Pdt.G/2022/PN Tng	08 Sep. 2023	01 Okt. 2023	02 Okt. 2023	24 hari	03 Okt. 2023	08 Nov. 2023
266	253/PDT/2023/PT BTN	25/Pdt.G/2022/PN Pdl	12 Sep. 2023	09 Okt. 2023	09 Okt. 2023	27 hari	11 Okt. 2023	-
267	254/PDT/2023/PT BTN	117/Pdt.G/2022/PN Srg	12 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	35 hari	17 Okt. 2023	06 Nov. 2023
268	255/PDT/2023/PT BTN	1349/Pdt.G/2022/PN Tng	19 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	28 hari	17 Okt. 2023	09 Nov. 2023
269	256/PDT/2023/PT BTN	532/Pdt.G/2022/PN Tng	22 Sep. 2023	16 Okt. 2023	16 Okt. 2023	24 hari	16 Okt. 2023	-
270	257/PDT/2023/PT BTN	2/Pdt.G/2023/PN Srg	22 Sep. 2023	11 Okt. 2023	10 Okt. 2023	18 hari	11 Okt. 2023	26 Okt. 2023
271	258/PDT/2023/PT BTN	329/Pdt.G/2022/PN Tng	25 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	22 hari	17 Okt. 2023	21 Nov. 2023
272	259/PDT/2023/PT BTN	113/Pdt.G/2023/PN Tng	25 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	22 hari	17 Okt. 2023	10 Nov. 2023
273	260/PDT/2023/PT BTN	828/Pdt.G/2022/PN Tng	25 Sep. 2023	19 Okt. 2023	19 Okt. 2023	24 hari	19 Okt. 2023	-
274	261/PDT/2023/PT BTN	1244/Pdt.G/2022/PN Tng	25 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	22 hari	17 Okt. 2023	20 Nov. 2023
275	262/PDT/2023/PT BTN	22/Pdt.G/2023/PN Tng	26 Sep. 2023	18 Okt. 2023	18 Okt. 2023	22 hari	18 Okt. 2023	13 Nov. 2023
276	263/PDT/2023/PT BTN	3/Pdt.G/2023/PN Rkb	26 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	21 hari	17 Okt. 2023	03 Nov. 2023
277	264/PDT/2023/PT BTN	23/Pdt.G/2023/PN Tng	26 Sep. 2023	11 Okt. 2023	11 Okt. 2023	15 hari	11 Okt. 2023	17 Nov. 2023
278	265/PDT/2023/PT BTN	27/Pdt.G/2022/PN Rkb	27 Sep. 2023	26 Okt. 2023	26 Okt. 2023	29 hari	26 Okt. 2023	23 Nov. 2023
279	266/PDT/2023/PT BTN	4/Pdt.G/2023/PN Rkb	27 Sep. 2023	18 Okt. 2023	18 Okt. 2023	21 hari	18 Okt. 2023	-
280	267/PDT/2023/PT BTN	201/Pdt.G/2022/PN Srg	29 Sep. 2023	26 Okt. 2023	26 Okt. 2023	27 hari	26 Okt. 2023	-
281	268/PDT/2023/PT BTN	188/Pdt.G/2022/PN Srg	02 Okt. 2023	24 Okt. 2023	24 Okt. 2023	22 hari	24 Okt. 2023	13 Nov. 2023
282	269/PDT/2023/PT BTN	1093/Pdt.G/2022/PN Tng	02 Okt. 2023	24 Okt. 2023	24 Okt. 2023	22 hari	24 Okt. 2023	18 Des. 2023
283	270/PDT/2023/PT BTN	580/Pdt.G/2022/PN Tng	04 Okt. 2023	25 Okt. 2023	25 Okt. 2023	21 hari	25 Okt. 2023	-
284	271/PDT/2023/PT BTN	200/Pdt.Bth/2022/PN Srg	05 Okt. 2023	05 Sep. 2023	19 Okt. 2023	14 hari	19 Okt. 2023	24 Okt. 2023
285	272/PDT/2023/PT BTN	15/Pdt.G/2023/PN Srg	05 Okt. 2023	09 Nov. 2023	09 Nov. 2023	35 hari	09 Nov. 2023	05 Des. 2023
286	273/PDT/2023/PT BTN	395/Pdt.G/2023/PN Tng	09 Okt. 2023	08 Nov. 2023	08 Nov. 2023	30 hari	08 Nov. 2023	
287	274/PDT/2023/PT BTN	1046/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Okt. 2023	10 Nov. 2023	10 Nov. 2023	32 hari	13 Nov. 2023	
288	275/PDT/2023/PT BTN	1326/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Okt. 2023	09 Nov. 2023	09 Nov. 2023	31 hari	09 Nov. 2023	
289	276/PDT/2023/PT BTN	1224/Pdt.G/2022/PN Tng	09 Okt. 2023	06 Nov. 2023	06 Nov. 2023	28 hari	06 Nov. 2023	
290	277/PDT/2023/PT BTN	128/Pdt.G/2023/PN Tng	16 Okt. 2023	08 Nov. 2023	08 Nov. 2023	23 hari	09 Nov. 2023	
291	278/PDT/2023/PT BTN	1209/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Okt. 2023	16 Nov. 2023	16 Nov. 2023	30 hari	16 Nov. 2023	
292	279/PDT/2023/PT BTN	548/Pdt.G/2023/PN Tng	17 Okt. 2023	13 Nov. 2023	13 Nov. 2023	27 hari	13 Nov. 2023	
293	280/PDT/2023/PT BTN	48/Pdt.G/2023/PN Tng	17 Okt. 2023	22 Nov. 2023	22 Nov. 2023	36 hari	22 Nov. 2023	
294	281/PDT/2023/PT BTN	1029/Pdt.G/2022/PN Tng	17 Okt. 2023	15 Nov. 2023	15 Nov. 2023	29 hari	15 Nov. 2023	
295	282/PDT/2023/PT BTN	28/Pdt.Bth/2022/PN Rkb	23 Okt. 2023	22 Nov. 2023	22 Nov. 2023	30 hari	22 Nov. 2023	
296	283/PDT/2023/PT BTN	384/Pdt.G/2023/PN Tng	24 Okt. 2023	22 Nov. 2023	22 Nov. 2023	29 hari	22 Nov. 2023	
297	284/PDT/2023/PT BTN	1388/Pdt.G/2021/PN Tng	24 Okt. 2023	23 Nov. 2023	23 Nov. 2023	30 hari	23 Nov. 2023	15 Des. 2023
298	285/PDT/2023/PT BTN	135/Pdt.Bth/2023/PN Tng	24 Okt. 2023	23 Nov. 2023	23 Nov. 2023	30 hari	23 Nov. 2023	
299	286/PDT/2023/PT BTN	8/Pdt.G/2023/PN Pdl	24 Okt. 2023	14 Nov. 2023	14 Nov. 2023	21 hari	14 Nov. 2023	12 Des. 2023
300	287/PDT/2023/PT BTN	70/Pdt.G/2023/PN SRG	24 Okt. 2023	21 Nov. 2023	21 Nov. 2023	28 hari	21 Nov. 2023	
301	288/PDT/2023/PT BTN	153/Pdt.G/2023/PN Tng	25 Okt. 2023	15 Nov. 2023	15 Nov. 2023	21 hari	15 Nov. 2023	
302	289/PDT/2023/PT BTN	1130/Pdt.G/2022/PN Tng	26 Okt. 2023	28 Nov. 2023	28 Nov. 2023	33 hari	28 Nov. 2023	27 Des. 2023
303	290/PDT/2023/PT BTN	1125/Pdt.G/2022/PN Tng	26 Okt. 2023	21 Nov. 2023	21 Nov. 2023	26 hari	21 Nov. 2023	
304	291/PDT/2023/PT BTN	861/Pdt.G/2022/PN Tng	01 Nov. 2023	15 Nov. 2023	15 Nov. 2023	14 hari	15 Nov. 2023	
305	292/PDT/2023/PT BTN	4/Pdt.G/2023/PN Srg	02 Nov. 2023	30 Nov. 2023	30 Nov. 2023	28 hari	30 Nov. 2023	
306	293/PDT/2023/PT BTN	1318/Pdt.G/2022/PN Tng	07 Nov. 2023	28 Nov. 2023	28 Nov. 2023	21 hari	29 Nov. 2023	
307	294/PDT/2023/PT BTN	235/Pdt.G/2023/PN Tng	07 Nov. 2023	28 Nov. 2023	28 Nov. 2023	21 hari	28 Nov. 2023	27 Des. 2023
308	295/PDT/2023/PT BTN	1358/Pdt.G/2022/PN Tng	07 Nov. 2023	28 Nov. 2023	28 Nov. 2023	21 hari	28 Nov. 2023	
309	298/PDT/2023/PT BTN	9/Pdt.G/2023/PN Pdl	10 Nov. 2023	29 Nov. 2023	29 Nov. 2023	19 hari	29 Nov. 2023	13 Des. 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi	Lama Proses	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
310	296/PDT/2023/PT BTN	1316/Pdt.G/2022/PN Tng	07 Nov. 2023	04 Des. 2023	05 Des. 2023	28 hari	05 Des. 2023	
311	297/PDT/2023/PT BTN	714/Pdt.G/2019/PN Tng	10 Nov. 2023	14 Des. 2023	14 Des. 2023	34 hari	14 Des. 2023	
312	299/PDT/2023/PT BTN	53/Pdt.G/2023/PN Tng	13 Nov. 2023	06 Des. 2023	06 Des. 2023	23 hari	06 Des. 2023	
313	300/PDT/2023/PT BTN	15/Pdt.G/2023/PN Tng	13 Nov. 2023	12 Des. 2023	12 Des. 2023	29 hari	12 Des. 2023	
314	301/PDT/2023/PT BTN	1077/Pdt.G/2022/PN Tng	13 Nov. 2023	05 Des. 2023	05 Des. 2023	22 hari	05 Des. 2023	
315	302/PDT/2023/PT BTN	837/Pdt.G/2019/PN Tng	15 Nov. 2023	06 Des. 2023	06 Des. 2023	21 hari	06 Des. 2023	
316	303/PDT/2023/PT BTN	1273/Pdt.G/2022/PN Tng	15 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	34 hari	19 Des. 2023	
317	304/PDT/2023/PT BTN	1297/Pdt.G/2022/PN Tng	15 Nov. 2023	13 Des. 2023	13 Des. 2023	28 hari	13 Des. 2023	
318	305/PDT/2023/PT BTN	218/Pdt.G/2023/PN Tng	15 Nov. 2023	13 Des. 2023	13 Des. 2023	28 hari	13 Des. 2023	
319	306/PDT/2023/PT BTN	422/Pdt.G/2023/PN Tng	15 Nov. 2023	07 Des. 2023	07 Des. 2023	22 hari	08 Des. 2023	
320	308/PDT/2023/PT BTN	92/Pdt.G/2023/PN Tng	15 Nov. 2023	14 Des. 2023	14 Des. 2023	29 hari	14 Des. 2023	
321	309/PDT/2023/PT BTN	12/Pdt.G/2023/PN Tng	17 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	32 hari	19 Des. 2023	
322	310/PDT/2023/PT BTN	646/Pdt.G/2023/PN Tng	17 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	32 hari	19 Des. 2023	
323	311/PDT/2023/PT BTN	645/Pdt.G/2022/PN Tng	20 Nov. 2023	14 Des. 2023	14 Des. 2023	24 hari	14 Des. 2023	
324	312/PDT/2023/PT BTN	183/Pdt.G/2022/PN Srg	20 Nov. 2023	14 Des. 2023	14 Des. 2023	24 hari	14 Des. 2023	
325	313/PDT/2023/PT BTN	6/Pdt.G/2019/PN Tng	27 Nov. 2023	11 Des. 2023	11 Des. 2023	14 hari	11 Des. 2023	
326	314/PDT/2023/PT BTN	803/Pdt.G/2017/PN Tng	27 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	22 hari	19 Des. 2023	
327	315/PDT/2023/PT BTN	498/Pdt.G/2023/PN Tng	27 Nov. 2023	12 Des. 2023	12 Des. 2023	15 hari	12 Des. 2023	
328	316/PDT/2023/PT BTN	331/Pdt.G/2023/PN Tng	28 Nov. 2023	20 Des. 2023	20 Des. 2023	22 hari	20 Des. 2023	
329	317/PDT/2023/PT BTN	1128/Pdt.G/2022/PN Tng	28 Nov. 2023	21 Des. 2023	21 Des. 2023	23 hari	21 Des. 2023	
330	318/PDT/2023/PT BTN	381/Pdt.G/2023/PN Tng	05 Des. 2023	20 Des. 2023	20 Des. 2023	15 hari	21 Des. 2023	
331	319/PDT/2023/PT BTN	1287/Pdt.G/2022/PN Tng	05 Des. 2023	21 Des. 2023	21 Des. 2023	16 hari	21 Des. 2023	
332	320/PDT/2023/PT BTN	858/Pdt.G/2023/PN Tng	05 Des. 2023	21 Des. 2023	21 Des. 2023	16 hari	21 Des. 2023	
333	321/PDT/2023/PT BTN	53/Pdt.G/2023/PN SRG	07 Des. 2023	21 Des. 2023	21 Des. 2023	14 hari	27 Des. 2023	

II. DATA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

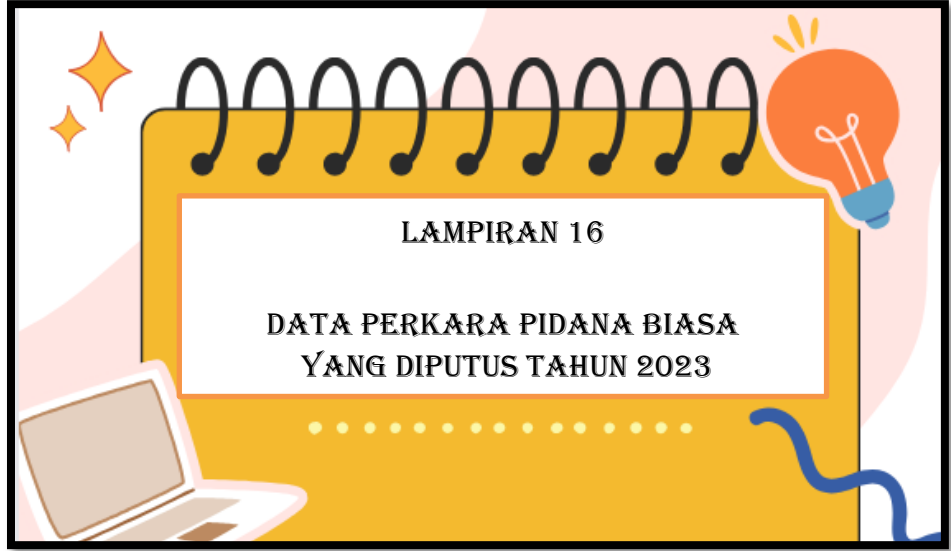
Bulan	Jumlah perkara perdata yang diputus	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan (s.d. selesai minutasi)				Jumlah perkara perdata diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata diselesaikan tidak tepat waktu
		0-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	≥ 91 hari		
Januari 2023	23	21	2	-	-	23	-
Februari 2023	31	26	5	-	-	31	-
Maret 2023	55	47	8	-	-	55	-
April 2023	22	16	6	-	-	22	-
Mei 2023	27	13	14	-	-	27	-
Juni 2023	22	13	9	-	-	22	-
Juli 2023	24	16	8	-	-	24	-
Agustus 2023	33	27	6	-	-	33	-
September 2023	21	19	2	-	-	21	-
Oktober 2023	26	22	4	-	-	26	-
November 2023	25	20	5	-	-	25	-
Desember 2023	24	20	4	-	-	24	-
Total	309	260	73	-	-	333	-

III. DATA PERKARA PERDATA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Periode	Jumlah perkara perdata yang diputus	Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Januari 2023	23	13	10
Februari 2023	31	20	11
Maret 2023	55	28	27
April 2023	22	17	5
Mei 2023	27	15	12
Juni 2023	22	12	10
Juli 2023	24	12	12
Agustus 2023	33	20	13
September 2023	21	9	12
Oktober 2023	26	18	8
November 2023	25	6	19
Desember 2023	24	0	24
Total	333	170	163

IV. DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Bulan	Jumlah putusan perkara perdata	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (sejak tanggal putus banding)		Jumlah putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah putusan yang dikirim tidak tepat waktu
		0-14 hari	> 14 hari		
Januari 2023	23	23	-	23	-
Februari 2023	31	31	-	31	-
Maret 2023	55	55	-	55	-
April 2023	22	22	-	22	-
Mei 2023	27	27	-	27	-
Juni 2023	22	22	-	22	-
Juli 2023	24	24	-	24	-
Agustus 2023	33	33	-	33	-
September 2023	21	21	-	21	-
Oktober 2023	26	26	-	26	-
November 2023	25	25	-	25	-
Desember 2023	24	24	-	24	-
Total	333	333	0	333	-



LAMPIRAN 16

DATA PERKARA PIDANA BIASA
YANG DIPUTUS TAHUN 2023

**DATA PERKARA PIDANA BIASA BANDING UNTUK LAPORAN KINERJA (SAKIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

I. DATA PERKARA PIDANA BIASA YANG DIPUTUS PADA BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi (tanggal)
1	117/PID.SUS/2022/PT BTN	1240/Pid.Sus/2022/PN Tng	14 Des. 2022	10 Jan. 2023	11 Jan. 2023	28 hari	12 Jan. 2023	16 Jan. 2023
2	119/PID.SUS/2022/PT BTN	158/Pid.Sus/2022/PN Rkb	14 Des. 2022	02 Jan. 2023	02 Jan. 2023	19 hari	03 Jan. 2023	-
3	120/PID.SUS/2022/PT BTN	223/Pid.Sus/2022/PN Pdl	21 Des. 2022	10 Jan. 2023	11 Jan. 2023	21 hari	11 Jan. 2023	-
4	121/PID.SUS/2022/PT BTN	224/Pid.Sus/2022/PN Pdl	23 Des. 2022	12 Jan. 2023	13 Jan. 2023	21 hari	16 Jan. 2023	-
5	122/PID.SUS/2022/PT BTN	1605/Pid.Sus/2022/PN Tng	23 Des. 2022	11 Jan. 2023	11 Jan. 2023	19 hari	12 Jan. 2023	25 Jan. 2023
6	123/PID/2022/PT BTN	164/Pid.B/2022/PN Rkb	27 Des. 2022	10 Jan. 2023	11 Jan. 2023	15 hari	11 Jan. 2023	-
7	1/PID.SUS/2023/PT BTN	188/Pid.Sus/2022/PN Rkb	04 Jan. 2023	18 Jan. 2023	18 Jan. 2023	14 hari	20 Jan. 2023	-
8	2/PID.SUS/2023/PT BTN	192/Pid.Sus/2022/PN Rkb	04 Jan. 2023	31 Jan. 2023	31 Jan. 2023	27 hari	31 Jan. 2023	-
9	3/PID.SUS/2023/PT BTN	187/Pid.Sus/2022/PN Tng	04 Jan. 2023	24 Jan. 2023	24 Jan. 2023	20 hari	24 Jan. 2023	16 Feb. 2023
10	4/PID.SUS/2023/PT BTN	681/Pid.Sus/2022/PN Srg	09 Jan. 2023	24 Jan. 2023	24 Jan. 2023	15 hari	24 Jan. 2023	-
11	5/PID.SUS/2023/PT BTN	690/Pid.Sus/2022/PN Srg	09 Jan. 2023	26 Jan. 2023	27 Jan. 2023	18 hari	27 Jan. 2023	-
12	8/PID/2023/PT BTN	763/Pid.B/2022/PN Srg	11 Jan. 2023	26 Jan. 2023	27 Jan. 2023	16 hari	27 Jan. 2023	-
13	6/PID.SUS/2023/PT BTN	1799/Pid.Sus/2022/PN Tng	11 Jan. 2023	01 Feb. 2023	01 Feb. 2023	21 hari	01 Feb. 2023	-
14	7/PID/2023/PT BTN	1690/Pid.Sus/2022/PN Tng	11 Jan. 2023	07 Feb. 2023	08 Feb. 2023	28 hari	10 Feb. 2023	28 Feb. 2023
15	9/PID.SUS/2023/PT BTN	191/Pid.Sus/2022/PN Pdl	11 Jan. 2023	09 Feb. 2023	09 Feb. 2023	29 hari	10 Feb. 2023	21 Mar. 2023
16	10/PID.SUS/2023/PT BTN	1719/Pid.Sus/2022/PN Tng	16 Jan. 2023	02 Feb. 2023	02 Feb. 2023	17 hari	02 Feb. 2023	28 Feb. 2023
17	11/PID.SUS/2023/PT BTN	205/Pid.Sus/2022/PN Pdl	24 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	23 hari	17 Feb. 2023	27 Feb. 2023
18	12/PID.SUS/2023/PT BTN	853/Pid.Sus/2022/PN Srg	31 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	16 hari	17 Feb. 2023	24 Mar. 2023
19	13/PID/2023/PT BTN	800/Pid.B/2022/PN Srg	31 Jan. 2023	22 Feb. 2023	22 Feb. 2023	22 hari	23 Feb. 2023	-
20	14/PID.SUS/2023/PT BTN	239/Pid.Sus/2022/PN Pdl	31 Jan. 2023	22 Feb. 2023	22 Feb. 2023	22 hari	24 Feb. 2023	-
21	15/PID/2023/PT BTN	913/Pid.B/2022/PN Srg	03 Feb. 2023	28 Feb. 2023	28 Feb. 2023	25 hari	01 Mar. 2023	-
22	16/PID.SUS/2023/PT BTN	728/Pid.Sus/2022/PN Srg	03 Feb. 2023	21 Feb. 2023	21 Feb. 2023	18 hari	21 Feb. 2023	-
23	17/PID/2023/PT BTN	1744/Pid.B/2022/PN Tng	03 Feb. 2023	23 Feb. 2023	23 Feb. 2023	20 hari	23 Feb. 2023	-
24	18/PID.SUS/2023/PT BTN	1977/Pid.Sus/2022/PN Tng	03 Feb. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	13 hari	17 Feb. 2023	06 Mar. 2023
25	19/PID.SUS/2023/PT BTN	1502/Pid.Sus/2022/PN Tng	03 Feb. 2023	23 Feb. 2023	23 Feb. 2023	20 hari	23 Feb. 2023	07 Mar. 2023
26	21/PID.SUS/2023/PT BTN	869/Pid.Sus/2022/PN Srg	07 Feb. 2023	28 Feb. 2023	28 Feb. 2023	21 hari	01 Mar. 2023	-
27	20/PID/2023/PT BTN	1883/Pid.B/2022/PN Tng	03 Feb. 2023	07 Mar. 2023	07 Mar. 2023	32 hari	08 Mar. 2023	-
28	22/PID.SUS/2023/PT BTN	621/Pid.Sus/2022/PN Srg	17 Feb. 2023	02 Mar. 2023	02 Mar. 2023	13 hari	06 Mar. 2023	16 Mar. 2023
29	23/PID.SUS/2023/PT BTN	257/Pid.Sus/2022/PN Pdl	27 Feb. 2023	21 Mar. 2023	21 Mar. 2023	22 hari	24 Mar. 2023	05 Apr. 2023
30	24/PID/2023/PT BTN	1973/Pid.B/2022/PN Tng	28 Feb. 2023	29 Mar. 2023	29 Mar. 2023	29 hari	31 Mar. 2023	11 Mei 2023
31	27/PID.SUS/2023/PT BTN	851/Pid.Sus/2022/PN Srg	28 Feb. 2023	27 Mar. 2023	27 Mar. 2023	27 hari	28 Mar. 2023	-
32	28/PID/2023/PT BTN	169/Pid.B/2022/PN Rkb	02 Mar. 2023	17 Mar. 2023	17 Mar. 2023	15 hari	20 Mar. 2023	-
33	29/PID/2023/PT BTN	898/Pid.B/2022/PN Srg	02 Mar. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	26 hari	28 Mar. 2023	-
34	30/PID/2023/PT BTN	1009/Pid.B/2022/PN Srg	06 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	24 hari	31 Mar. 2023	-
35	31/PID.SUS/2023/PT BTN	979/Pid.Sus/2022/PN Srg	06 Mar. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	22 hari	28 Mar. 2023	-
36	32/PID.SUS/2023/PT BTN	975/Pid.Sus/2022/PN Srg	07 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	23 hari	31 Mar. 2023	-
37	33/PID.SUS/2023/PT BTN	270/Pid.Sus/2022/PN Pdl	07 Mar. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	21 hari	28 Mar. 2023	06 Apr. 2023
38	34/PID.SUS/2023/PT BTN	271/Pid.Sus/2022/PN Pdl	07 Mar. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	21 hari	28 Mar. 2023	06 Apr. 2023
39	35/PID.SUS/2023/PT BTN	272/Pid.Sus/2022/PN Pdl	07 Mar. 2023	28 Mar. 2023	28 Mar. 2023	21 hari	28 Mar. 2023	18 Apr. 2023
40	37/PID/2023/PT BTN	947/Pid.B/2022/PN Srg	09 Mar. 2023	30 Mar. 2023	30 Mar. 2023	21 hari	31 Mar. 2023	-
41	25/PID.SUS/2023/PT BTN	953/Pid.Sus/2022/PN Srg	28 Feb. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	35 hari	05 Apr. 2023	17 Apr. 2023
42	26/PID.SUS/2023/PT BTN	952/Pid.Sus/2022/PN Srg	28 Feb. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	35 hari	05 Apr. 2023	17 Apr. 2023
43	36/PID.SUS/2023/PT BTN	802/Pid.Sus/2022/PN Srg	09 Mar. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	26 hari	05 Apr. 2023	17 Apr. 2023
44	38/PID/2023/PT BTN	948/Pid.B/2022/PN Srg	09 Mar. 2023	03 Apr. 2023	03 Apr. 2023	25 hari	04 Apr. 2023	-
45	39/PID.SUS/2023/PT BTN	1867/Pid.Sus/2022/PN Tng	09 Mar. 2023	04 Apr. 2023	04 Apr. 2023	26 hari	05 Apr. 2023	08 Mei 2023
46	40/PID.SUS/2023/PT BTN	2243/Pid.Sus/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	03 Apr. 2023	03 Apr. 2023	21 hari	04 Apr. 2023	12 Mei 2023
47	41/PID.SUS/2023/PT BTN	2010/Pid.Sus/2022/PN Tng	13 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	29 hari	12 Apr. 2023	15 Mei 2023
48	42/PID.SUS/2023/PT BTN	5/Pid.Sus/2023/PN Pdl	15 Mar. 2023	03 Apr. 2023	03 Apr. 2023	19 hari	04 Apr. 2023	-
49	43/PID.SUS/2023/PT BTN	2051/Pid.Sus/2022/PN Tng	17 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	26 hari	12 Apr. 2023	12 Mei 2023
50	44/PID.SUS/2023/PT BTN	1868/Pid.Sus/2022/PN Tng	17 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	25 hari	12 Apr. 2023	08 Mei 2023
51	45/PID/2023/PT BTN	2141/Pid.B/2022/PN Tng	27 Mar. 2023	06 Apr. 2023	06 Apr. 2023	10 hari	06 Apr. 2023	-

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi (tanggal)
52	46/PID/2023/PT BTN	2140/Pid.B/2022/PN Tng	27 Mar. 2023	06 Apr. 2023	06 Apr. 2023	10 hari	06 Apr. 2023	-
53	47/PID.SUS/2023/PT BTN	1945/Pid.Sus/2022/PN Tng	27 Mar. 2023	17 Apr. 2023	17 Apr. 2023	21 hari	18 Apr. 2023	-
54	51/PID.SUS/2023/PT BTN	71/Pid.Sus/2023/PN Tng	30 Mar. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	12 hari	12 Apr. 2023	17 Mei 2023
55	52/PID/2023/PT BTN	2163/Pid.B/2022/PN Tng	30 Mar. 2023	17 Apr. 2023	17 Apr. 2023	18 hari	18 Apr. 2023	-
56	53/PID.SUS/2023/PT BTN	18/Pid.Sus/2023/PN Rkb	30 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	13 hari	12 Apr. 2023	-
57	54/PID.SUS/2023/PT BTN	14/Pid.Sus/2023/PN Rkb	30 Mar. 2023	12 Apr. 2023	12 Apr. 2023	13 hari	12 Apr. 2023	-
58	48/PID.SUS/2023/PT BTN	1026/Pid.Sus/2022/PN Srg	28 Mar. 2023	02 Mei. 2023	02 Mei. 2023	35 hari	03 Mei. 2023	06 Jun. 2023
59	49/PID.SUS/2023/PT BTN	1027/Pid.Sus/2022/PN Srg	28 Mar. 2023	02 Mei. 2023	02 Mei. 2023	35 hari	03 Mei. 2023	29 Mei 2023
60	50/PID.SUS/2023/PT BTN	20/Pid.Sus/2023/PN Srg	28 Mar. 2023	10 Mei. 2023	10 Mei. 2023	43 hari	10 Mei. 2023	-
61	55/PID/2023/PT BTN	9/Pid.B/2023/PN Srg	04 Apr. 2023	03 Mei. 2023	03 Mei. 2023	29 hari	03 Mei. 2023	-

62	56/PID/2023/PT BTN	1805/Pid.B/2022/PN Tng	18 Apr. 2023	11 Mei. 2023	11 Mei. 2023	23 hari	12 Mei. 2023	31 Mei 2023
63	57/PID.SUS/2023/PT BTN	103/Pid.Sus/2023/PN Tng	18 Apr. 2023	17 Mei. 2023	17 Mei. 2023	29 hari	17 Mei. 2023	-
64	58/PID.SUS/2023/PT BTN	2052/Pid.Sus/2022/PN Tng	18 Apr. 2023	16 Mei. 2023	16 Mei. 2023	28 hari	17 Mei. 2023	12 Jun. 2023
65	59/PID.SUS/2023/PT BTN	188/Pid.Sus/2023/PN Tng	18 Apr. 2023	09 Mei. 2023	09 Mei. 2023	21 hari	10 Mei. 2023	12 Jun. 2023
66	60/PID.SUS/2023/PT BTN	189/Pid.Sus/2023/PN Tng	18 Apr. 2023	09 Mei. 2023	09 Mei. 2023	21 hari	10 Mei. 2023	12 Jun. 2023
67	61/PID.SUS/2023/PT BTN	190/Pid.Sus/2023/PN Tng	18 Apr. 2023	09 Mei. 2023	09 Mei. 2023	21 hari	09 Mei. 2023	12 Jun. 2023
68	62/PID/2023/PT BTN	54/Pid.B/2023/PN Tng	18 Apr. 2023	17 Mei. 2023	17 Mei. 2023	29 hari	17 Mei. 2023	22 Mei 2023
69	63/PID.SUS/2023/PT BTN	16/Pid.Sus/2023/PN Pdl	27 Apr. 2023	24 Mei. 2023	24 Mei. 2023	27 hari	24 Mei. 2023	-
70	64/PID.SUS/2023/PT BTN	44/Pid.Sus/2023/PN Rkb	05 Mei. 2023	23 Mei. 2023	23 Mei. 2023	18 hari	23 Mei. 2023	-
71	65/PID.SUS/2023/PT BTN	125/Pid.Sus/2023/PN Tng	05 Mei. 2023	30 Mei. 2023	30 Mei. 2023	25 hari	31 Mei. 2023	22 Jun. 2023
72	68/PID/2023/PT BTN	72/Pid.B/2023/PN Tng	10 Mei. 2023	24 Mei. 2023	24 Mei. 2023	14 hari	25 Mei. 2023	23 Jun. 2023
73	69/PID/2023/PT BTN	73/Pid.B/2023/PN Tng	10 Mei. 2023	24 Mei. 2023	24 Mei. 2023	14 hari	25 Mei. 2023	23 Jun. 2023
74	66/PID/2023/PT BTN	110/Pid.B/2023/PN Srg	10 Mei. 2023	07 Jun. 2023	07 Jun. 2023	28 hari	08 Jun. 2023	26 Jun. 2023
75	67/PID.SUS/2023/PT BTN	2121/Pid.Sus/2022/PN Tng	10 Mei. 2023	14 Jun. 2023	14 Jun. 2023	35 hari	15 Jun. 2023	14 Jul 2023
76	70/PID.SUS/2023/PT BTN	966/Pid.Sus/2022/PN Srg	25 Mei. 2023	21 Jun. 2023	22 Jun. 2023	28 hari	23 Jun. 2023	-
77	71/PID.SUS/2023/PT BTN	210/Pid.Sus/2023/PN Srg	25 Mei. 2023	15 Jun. 2023	15 Jun. 2023	21 hari	20 Jun. 2023	18 Jul 2023
78	72/PID/2023/PT BTN	118/Pid.B/2023/PN Srg	31 Mei. 2023	21 Jun. 2023	21 Jun. 2023	21 hari	22 Jun. 2023	11 Jul. 2023
79	73/PID.SUS/2023/PT BTN	211/Pid.Sus/2023/PN Srg	31 Mei. 2023	22 Jun. 2023	22 Jun. 2023	22 hari	23 Jun. 2023	18 Jul 2023
80	74/PID.SUS/2023/PT BTN	2228/Pid.Sus/2022/PN Tng	31 Mei. 2023	22 Jun. 2023	23 Jun. 2023	23 hari	23 Jun. 2023	-
81	1/PID.C/2023/PT BTN	14/Pid.C/2023/PN Tng	04 Jul. 2023	10 Jul. 2023	12 Jul. 2023	8 hari	12 Jul. 2023	07 Agu 2023
82	75/PID.SUS/2023/PT BTN	41/Pid.Sus/2023/PN Tng	16 Jun. 2023	05 Jul. 2023	05 Jul. 2023	19 hari	05 Jul. 2023	31 Jul 2023
83	76/PID/2023/PT BTN	278/Pid.B/2023/PN Tng	19 Jun. 2023	12 Jul. 2023	12 Jul. 2023	23 hari	13 Jul. 2023	27 Jul 2023
84	77/PID/2023/PT BTN	306/Pid.B/2023/PN Tng	19 Jun. 2023	13 Jul. 2023	13 Jul. 2023	24 hari	14 Jul. 2023	-
85	78/PID/2023/PT BTN	288/Pid.B/2023/PN Tng	19 Jun. 2023	13 Jul. 2023	13 Jul. 2023	24 hari	13 Jul. 2023	20 Jul 2023
86	79/PID.SUS/2023/PT BTN	218/Pid.Sus/2023/PN Srg	22 Jun. 2023	13 Jul. 2023	13 Jul. 2023	21 hari	13 Jul. 2023	-
87	80/PID.SUS/2023/PT BTN	150/Pid.Sus/2023/PN Tng	22 Jun. 2023	13 Jul. 2023	13 Jul. 2023	21 hari	13 Jul. 2023	02 Agu 2023
88	81/PID/2023/PT BTN	364/Pid.B/2023/PN Tng	27 Jun. 2023	25 Jul. 2023	25 Jul. 2023	28 hari	25 Jul. 2023	21 Agu. 2023
89	82/PID.SUS/2023/PT BTN	77/Pid.Sus/2023/PN Rkb	27 Jun. 2023	13 Jul. 2023	13 Jul. 2023	16 hari	14 Jul. 2023	-
90	83/PID/2023/PT BTN	366/Pid.B/2023/PN Tng	27 Jun. 2023	12 Jul. 2023	12 Jul. 2023	15 hari	13 Jul. 2023	09 Agu 2023
91	84/PID.SUS/2023/PT BTN	166/Pid.Sus/2023/PN Srg	04 Jul. 2023	25 Jul. 2023	25 Jul. 2023	21 hari	25 Jul. 2023	-
92	85/PID.SUS/2023/PT BTN	58/Pid.Sus/2023/PN Rkb	04 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	23 hari	27 Jul. 2023	11 Agu 2023
93	86/PID/2023/PT BTN	404/Pid.B/2023/PN Tng	04 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	23 hari	27 Jul. 2023	23 Agu. 2023
94	87/PID/2023/PT BTN	403/Pid.B/2023/PN Tng	04 Jul. 2023	24 Jul. 2023	24 Jul. 2023	20 hari	24 Jul. 2023	21 Agu. 2023
95	88/PID.SUS/2023/PT BTN	55/Pid.Sus/2023/PN Srg	04 Jul. 2023	27 Jul. 2023	27 Jul. 2023	23 hari	27 Jul. 2023	-
96	89/PID.SUS/2023/PT BTN	30/Pid.Sus/2023/PN Rkb	05 Jul. 2023	03 Agu. 2023	03 Agu. 2023	29 hari	03 Agu. 2023	11 Agu. 2023
97	90/PID.SUS/2023/PT BTN	32/Pid.Sus/2023/PN Rkb	05 Jul. 2023	10 Agu. 2023	10 Agu. 2023	36 hari	11 Agu. 2023	21 Agu. 2023
98	91/PID/2023/PT BTN	476/Pid.B/2023/PN Tng	25 Jul. 2023	16 Agu. 2023	16 Agu. 2023	22 hari	16 Agu. 2023	29 Sep. 2023
99	92/PID.SUS/2023/PT BTN	257/Pid.Sus/2023/PN Srg	26 Jul. 2023	30 Agu. 2023	30 Agu. 2023	35 hari	30 Agu. 2023	14 Sep. 2023
100	93/PID.SUS/2023/PT BTN	258/Pid.Sus/2023/PN Srg	26 Jul. 2023	30 Agu. 2023	30 Agu. 2023	35 hari	30 Agu. 2023	14 Sep. 2023
101	94/PID.SUS/2023/PT BTN	138/Pid.Sus/2023/PN Srg	31 Jul. 2023	24 Agu. 2023	24 Agu. 2023	24 hari	28 Agu. 2023	-
102	95/PID.SUS/2023/PT BTN	684/Pid.Sus/2023/PN Tng	31 Jul. 2023	15 Agu. 2023	15 Agu. 2023	15 hari	16 Agu. 2023	-
103	96/PID.SUS/2023/PT BTN	71/Pid.Sus/2023/PN Pdl	31 Jul. 2023	21 Agu. 2023	21 Agu. 2023	21 hari	21 Agu. 2023	05 Sep. 2023
104	97/PID/2023/PT BTN	645/Pid.B/2023/PN Tng	31 Jul. 2023	21 Agu. 2023	21 Agu. 2023	21 hari	22 Agu. 2023	-
105	98/PID.SUS/2023/PT BTN	241/Pid.Sus/2023/PN Srg	03 Agu. 2023	23 Agu. 2023	23 Agu. 2023	20 hari	23 Agu. 2023	-
106	99/PID.SUS/2023/PT BTN	127/Pid.Sus/2023/PN Srg	03 Agu. 2023	23 Agu. 2023	23 Agu. 2023	20 hari	23 Agu. 2023	12 Sep. 2023
107	100/PID.SUS/2023/PT BTN	128/Pid.Sus/2023/PN Srg	03 Agu. 2023	23 Agu. 2023	23 Agu. 2023	20 hari	23 Agu. 2023	12 Sep. 2023
108	101/PID.SUS/2023/PT BTN	129/Pid.Sus/2023/PN Srg	03 Agu. 2023	23 Agu. 2023	23 Agu. 2023	20 hari	23 Agu. 2023	12 Sep. 2023
109	102/PID.SUS/2023/PT BTN	130/Pid.Sus/2023/PN Srg	03 Agu. 2023	23 Agu. 2023	23 Agu. 2023	20 hari	23 Agu. 2023	12 Sep. 2023
110	105/PID.SUS/2023/PT BTN	165/Pid.Sus/2023/PN Srg	14 Agu. 2023	31 Agu. 2023	31 Agu. 2023	17 hari	31 Agu. 2023	13 Sep. 2023
111	103/PID.SUS/2023/PT BTN	711/Pid.Sus/2023/PN Tng	10 Agu. 2023	14 Sep. 2023	14 Sep. 2023	35 hari	14 Sep. 2023	-
112	104/PID.SUS/2023/PT BTN	430/Pid.Sus/2023/PN Tng	14 Agu. 2023	06 Sep. 2023	06 Sep. 2023	23 hari	06 Sep. 2023	-
113	106/PID.SUS/2023/PT BTN	60/Pid.Sus/2023/PN Tng	18 Agu. 2023	07 Sep. 2023	07 Sep. 2023	20 hari	07 Sep. 2023	05 Okt. 2023
114	107/PID/2023/PT BTN	639/Pid.B/2023/PN Tng	18 Agu. 2023	01 Sep. 2023	01 Sep. 2023	14 hari	01 Sep. 2023	-
115	108/PID.SUS/2023/PT BTN	98/Pid.Sus/2023/PN Pdl	21 Agu. 2023	19 Sep. 2023	19 Sep. 2023	29 hari	19 Sep. 2023	-
116	109/PID/2023/PT BTN	681/Pid.B/2023/PN Tng	21 Agu. 2023	11 Sep. 2023	11 Sep. 2023	21 hari	11 Sep. 2023	05 Okt. 2023
117	110/PID/2023/PT BTN	686/Pid.B/2023/PN Tng	28 Agu. 2023	21 Sep. 2023	21 Sep. 2023	24 hari	21 Sep. 2023	-

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi (tanggal)
118	111/PID/2023/PT BTN	234/Pid.B/2023/PN Srg	31 Agu. 2023	20 Sep. 2023	20 Sep. 2023	20 hari	20 Sep. 2023	16 Okt. 2023
119	112/PID/2023/PT BTN	735/Pid.B/2023/PN Tng	04 Sep. 2023	21 Sep. 2023	21 Sep. 2023	17 hari	21 Sep. 2023	17 Okt. 2023
120	113/PID/2023/PT BTN	348/Pid.B/2023/PN Tng	04 Sep. 2023	21 Sep. 2023	21 Sep. 2023	17 hari	21 Sep. 2023	18 Okt. 2023
121	114/PID.SUS/2023/PT BTN	240/Pid.Sus/2023/PN Srg	05 Sep. 2023	26 Sep. 2023	26 Sep. 2023	21 hari	26 Sep. 2023	13 Okt. 2023
122	115/PID/2023/PT BTN	843/Pid.B/2023/PN Tng	18 Sep. 2023	16 Okt. 2023	16 Okt. 2023	28 hari	16 Okt. 2023	-
123	116/PID/2023/PT BTN	362/Pid.B/2023/PN SRG	19 Sep. 2023	10 Okt. 2023	10 Okt. 2023	21 hari	10 Okt. 2023	-
124	117/PID/2023/PT BTN	365/Pid.B/2023/PN SRG	19 Sep. 2023	10 Okt. 2023	10 Okt. 2023	21 hari	10 Okt. 2023	-
125	118/PID.SUS/2023/PT BTN	712/Pid.Sus/2023/PN Tng	20 Sep. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	27 hari	18 Okt. 2023	06 Nov. 2023
126	119/PID.SUS/2023/PT BTN	923/Pid.Sus/2023/PN Tng	21 Sep. 2023	10 Okt. 2023	10 Okt. 2023	19 hari	10 Okt. 2023	31 Okt. 2023
127	120/PID.SUS/2023/PT BTN	924/Pid.Sus/2023/PN Tng	21 Sep. 2023	16 Okt. 2023	16 Okt. 2023	25 hari	16 Okt. 2023	31 Okt. 2023
128	121/PID.SUS/2023/PT BTN	925/Pid.Sus/2023/PN Tng	21 Sep. 2023	10 Okt. 2023	10 Okt. 2023	19 hari	10 Okt. 2023	08 Nov. 2023
129	122/PID/2023/PT BTN	877/Pid.B/2023/PN Tng	25 Sep. 2023	19 Okt. 2023	19 Okt. 2023	24 hari	19 Okt. 2023	-
130	123/PID/2023/PT BTN	474/Pid.B/2023/PN SRG	27 Sep. 2023	19 Okt. 2023	19 Okt. 2023	22 hari	20 Okt. 2023	-
131	124/PID.SUS/2023/PT BTN	134/Pid.Sus/2023/PN Pdl	27 Sep. 2023	12 Okt. 2023	12 Okt. 2023	15 hari	12 Okt. 2023	-
132	125/PID/2023/PT BTN	934/Pid.B/2023/PN Tng	02 Okt. 2023	24 Okt. 2023	24 Okt. 2023	22 hari	25 Okt. 2023	23 Nov. 2023
133	126/PID/2023/PT BTN	989/Pid.B/2023/PN Tng	02 Okt. 2023	24 Okt. 2023	24 Okt. 2023	22 hari	25 Okt. 2023	-
134	127/PID.SUS/2023/PT BTN	854/Pid.Sus/2023/PN Tng	02 Okt. 2023	19 Okt. 2023	19 Okt. 2023	17 hari	19 Okt. 2023	07 Des. 2023
135	128/PID/2023/PT BTN	495/Pid.B/2023/PN SRG	02 Okt. 2023	24 Okt. 2023	24 Okt. 2023	22 hari	25 Okt. 2023	09 Nov. 2023
136	129/PID.SUS/2023/PT BTN	137/Pid.Sus/2023/PN Rkb	06 Okt. 2023	26 Okt. 2023	26 Okt. 2023	20 hari	26 Okt. 2023	-
137	130/PID.SUS/2023/PT BTN	1064/Pid.Sus/2023/PN Tng	06 Okt. 2023	24 Okt. 2023	24 Okt. 2023	18 hari	25 Okt. 2023	15 Nov. 2023
138	131/PID.SUS/2023/PT BTN	148/Pid.Sus/2023/PN Pdl	23 Okt. 2023	06 Nov. 2023	06 Nov. 2023	14 hari	06 Nov. 2023	-
139	132/PID.SUS/2023/PT BTN	1111/Pid.Sus/2023/PN Tng	23 Okt. 2023	21 Nov. 2023	21 Nov. 2023	29 hari	22 Nov. 2023	-
140	133/PID/2023/PT BTN	1022/Pid.B/2023/PN Tng	23 Okt. 2023	13 Nov. 2023	13 Nov. 2023	21 hari	13 Nov. 2023	-
141	134/PID.SUS/2023/PT BTN	1051/Pid.Sus/2023/PN Tng	23 Okt. 2023	21 Nov. 2023	21 Nov. 2023	29 hari	22 Nov. 2023	-
142	135/PID.SUS/2023/PT BTN	850/Pid.Sus/2023/PN Tng	23 Okt. 2023	14 Nov. 2023	14 Nov. 2023	22 hari	14 Nov. 2023	-
143	136/PID.SUS/2023/PT BTN	849/Pid.Sus/2023/PN Tng	23 Okt. 2023	14 Nov. 2023	14 Nov. 2023	22 hari	15 Nov. 2023	-
144	137/PID.SUS/2023/PT BTN	143/Pid.Sus/2023/PN Pdl	24 Okt. 2023	23 Nov. 2023	23 Nov. 2023	30 hari	23 Nov. 2023	-
145	138/PID/2023/PT BTN	126/Pid.B/2023/PN Pdl	26 Okt. 2023	21 Nov. 2023	21 Nov. 2023	26 hari	22 Nov. 2023	04 Des. 2023
146	139/PID.SUS/2023/PT BTN	961/Pid.Sus/2023/PN Tng	30 Okt. 2023	22 Nov. 2023	22 Nov. 2023	23 hari	23 Nov. 2023	-
147	140/PID.SUS/2023/PT BTN	990/Pid.Sus/2023/PN Tng	30 Okt. 2023	20 Nov. 2023	20 Nov. 2023	21 hari	21 Nov. 2023	-
148	141/PID/2023/PT BTN	1419/Pid.B/2023/PN Tng	09 Nov. 2023	23 Nov. 2023	23 Nov. 2023	14 hari	23 Nov. 2023	-
149	142/PID.SUS/2023/PT BTN	1168/Pid.Sus/2023/PN Tng	09 Nov. 2023	29 Nov. 2023	29 Nov. 2023	20 hari	29 Nov. 2023	-
150	143/PID.SUS/2023/PT BTN	151/Pid.Sus/2023/PN Rkb	09 Nov. 2023	28 Nov. 2023	28 Nov. 2023	19 hari	28 Nov. 2023	-
151	144/PID/2023/PT BTN	1135/Pid.B/2023/PN Tng	14 Nov. 2023	04 Des. 2023	04 Des. 2023	20 hari	04 Des. 2023	27 Des. 2023
152	145/PID.SUS-LH/2023/PT BT	1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng	14 Nov. 2023	04 Des. 2023	04 Des. 2023	20 hari	04 Des. 2023	22 Des. 2023
153	146/PID.SUS/2023/PT BTN	153/Pid.Sus/2023/PN Pdl	16 Nov. 2023	12 Des. 2023	12 Des. 2023	26 hari	12 Des. 2023	-
154	147/PID/2023/PT BTN	1280/Pid.B/2023/PN Tng	17 Nov. 2023	06 Des. 2023	06 Des. 2023	19 hari	07 Des. 2023	-
155	148/PID.SUS/2023/PT BTN	477/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
156	149/PID.SUS/2023/PT BTN	478/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
157	150/PID.SUS/2023/PT BTN	479/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
158	151/PID.SUS/2023/PT BTN	480/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
159	152/PID.SUS/2023/PT BTN	481/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
160	153/PID.SUS/2023/PT BTN	482/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
161	154/PID.SUS/2023/PT BTN	483/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
162	155/PID.SUS/2023/PT BTN	484/Pid.Sus/2023/PN SRG	20 Nov. 2023	19 Des. 2023	19 Des. 2023	29 hari	19 Des. 2023	-
163	156/PID/2023/PT BTN	160/Pid.B/2023/PN Pdl	20 Nov. 2023	11 Des. 2023	11 Des. 2023	21 hari	11 Des. 2023	-
164	158/PID.SUS/2023/PT BTN	638/Pid.Sus/2023/PN SRG	28 Nov. 2023	21 Des. 2023	21 Des. 2023	23 hari	21 Des. 2023	-
165	159/PID.SUS/2023/PT BTN	1292/Pid.Sus/2023/PN Tng	06 Des. 2023	20 Des. 2023	20 Des. 2023	14 hari	20 Des. 2023	-
166	160/PID.SUS/2023/PT BTN	168/Pid.Sus/2023/PN Pdl	08 Des. 2023	27 Des. 2023	27 Des. 2023	19 hari	27 Des. 2023	-
167	163/PID/2023/PT BTN	1385/Pid.B/2023/PN Tng	12 Des. 2023	21 Des. 2023	21 Des. 2023	9 hari	21 Des. 2023	-
168	166/PID.SUS/2023/PT BTN	178/Pid.Sus/2023/PN Pdl	13 Des. 2023	28 Des. 2023	28 Des. 2023	15 hari	28 Des. 2023	-

II. DATA PERKARA PIDANA BIASA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

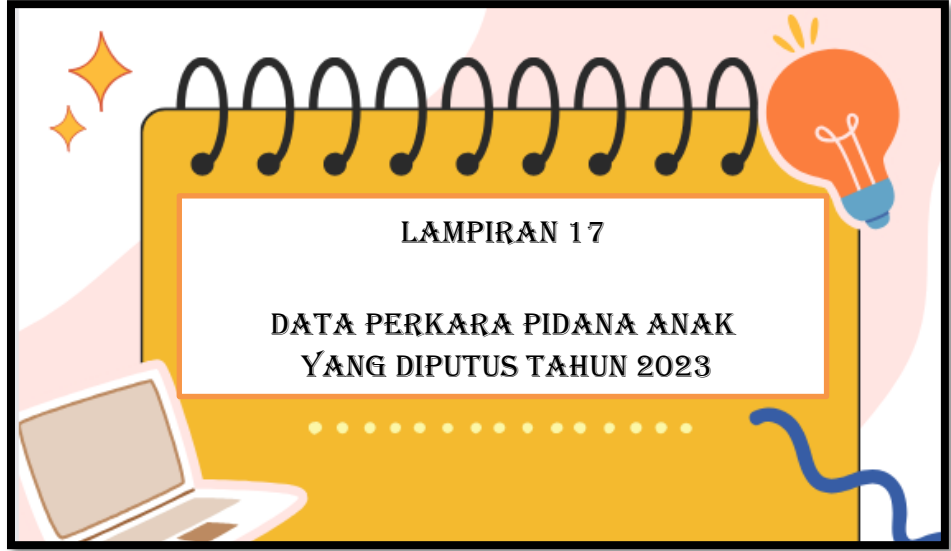
Bulan	Jumlah perkara pidana biasa yang diputus	Jumlah perkara pidana biasa yang diselesaikan (s.d. selesai minutasi)				Jumlah perkara biasa diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pidana biasa diselesaikan tidak tepat waktu
		0-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	≥ 91 hari		
Januari 2023	12	12	0	0	0	12	-
Februari 2023	14	14	0	0	0	14	-
Maret 2023	14	13	1	0	0	14	-
April 2023	17	15	2	0	0	17	-
Mei 2023	16	13	3	0	0	16	-
Juni 2023	7	6	1	0	0	7	-
Juli 2023	15	15	0	0	0	15	-
Agustus 2023	15	12	3	0	0	15	-
September 2023	11	10	1	0	0	11	-
Oktober 2023	16	16	0	0	0	16	-
November 2023	13	13	0	0	0	13	-
Desember 2023	18	18	0	0	0	18	-
Total	168	157	11	0	0	168	0

III. DATA PERKARA PIDANA BIASA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Periode	Jumlah perkara pidana biasa yang diputus	Jumlah perkara pidana biasa yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Januari 2023	12	3	9
Februari 2023	14	7	7
Maret 2023	14	6	8
April 2023	17	9	8
Mei 2023	16	11	5
Juni 2023	7	5	2
Juli 2023	15	10	5
Agustus 2023	15	11	4
September 2023	11	6	5
Oktober 2023	16	8	8
November 2023	13	1	12
Desember 2023	18	2	16
Total	168	79	89

IV. DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA BIASA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Bulan	Jumlah putusan perkara pidana biasa	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (sejak tanggal putus banding)		Jumlah putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah putusan yang dikirim tidak tepat waktu
		0-14 hari	> 14 hari		
Januari 2023	12	12	-	12	-
Februari 2023	14	14	-	14	-
Maret 2023	14	14	-	14	-
April 2023	17	17	-	17	-
Mei 2023	16	16	-	16	-
Juni 2023	7	7	-	7	-
Juli 2023	15	15	-	15	-
Agustus 2023	15	15	-	15	-
September 2023	11	11	-	11	-
Oktober 2023	16	16	-	16	-
November 2023	13	13	-	13	-
Desember 2023	18	18	-	18	-
Total	168	168	-	168	-



LAMPIRAN 17

DATA PERKARA PIDANA ANAK
YANG DIPUTUS TAHUN 2023

**DATA PERKARA PIDANA ANAK BANDING UNTUK LAPORAN KINERJA (SAKIP) BULAN TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

I. DATA PERKARA PIDANA ANAK YANG DIPUTUS PADA BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
1	1/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	125/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tng	09 Jan. 2023	11 Jan. 2023	11 Jan. 2023	2 hari	12 Jan. 2023	18 Jan. 2023
2	2/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	51/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg	16 Jan. 2023	24 Jan. 2023	24 Jan. 2023	8 hari	24 Jan. 2023	-
3	3/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	53/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg	25 Jan. 2023	30 Jan. 2023	30 Jan. 2023	5 hari	30 Jan. 2023	-
4	4/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg	25 Jan. 2023	31 Jan. 2023	31 Jan. 2023	6 hari	31 Jan. 2023	-
5	5/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg	03 Feb. 2023	14 Feb. 2023	14 Feb. 2023	11 hari	15 Feb. 2023	-
6	6/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg	07 Mar. 2023	10 Mar. 2023	10 Mar. 2023	3 hari	10 Mar. 2023	21 Mar. 2023
7	7/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg	07 Mar. 2023	10 Mar. 2023	10 Mar. 2023	3 hari	10 Mar. 2023	21 Mar. 2023
8	8/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	15/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG	23 Mei. 2023	26 Mei. 2023	26 Mei. 2023	3 hari	30 Mei. 2023	15 Jun. 2023
9	9/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdl	23 Mei. 2023	29 Mei. 2023	29 Mei. 2023	6 hari	30 Mei. 2023	-
10	10/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tng	31 Jul. 2023	04 Agu. 2023	04 Agu. 2023	4 hari	04 Agu. 2023	06 Sep. 2023
11	12/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb	12 Okt. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	5 hari	17 Okt. 2023	-
12	13/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb	12 Okt. 2023	19 Okt. 2023	19 Okt. 2023	7 hari	19 Okt. 2023	-
13	14/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb	12 Okt. 2023	17 Okt. 2023	17 Okt. 2023	5 hari	17 Okt. 2023	-
14	11/PID.SUS-Anak/2023/PT BTN	4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdl	04 Okt. 2023	12 Okt. 2023	12 Okt. 2023	8 hari	12 Okt. 2023	30 Okt. 2023

II. DATA PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Bulan	Jumlah perkara pidana anak yang diputus	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan (s.d. selesai minutasi)		Jumlah perkara pidana anak diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pidana anak diselesaikan tidak tepat waktu
		0-40 hari	≥ 41 hari		
Januari 2023	4	4	-	4	-
Februari 2023	1	1	-	1	-
Maret 2023	2	2	-	2	-
April 2023	0	0	-	0	-
Mei 2023	2	2	-	2	-
Juni 2023	0	0	-	0	-
Juli 2023	0	0	-	0	-
Agustus 2023	1	1	-	1	-
September 2023	0	0	-	0	-
Oktober 2023	4	4	-	4	-
November 2023	0	0	-	0	-
Desember 2023	0	0	-	0	-
Total	14	14	-	14	-

III. DATA PERKARA PIDANA ANAK YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Periode	Jumlah perkara pidana anak yang diputus	Jumlah perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Januari 2023	4	1	3
Februari 2023	1	0	1
Maret 2023	2	2	0
April 2023	0	0	0
Mei 2023	2	1	1
Juni 2023	0	0	0
Juli 2023	0	0	0
Agustus 2023	1	1	0
September 2023	0	0	0
Oktober 2023	4	1	3
November 2023	0	0	0
Desember 2023	0	0	0
Total	14	6	8

IV. DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Bulan	Jumlah putusan perkara pidana anak	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (sejak tanggal putus banding)		Jumlah putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah putusan yang dikirim tidak tepat waktu
		0-14 hari	> 14 hari		
Januari 2023	4	4	-	4	-
Februari 2023	1	1	-	1	-
Maret 2023	2	2	-	2	-
April 2023	0	0	-	0	-
Mei 2023	2	2	-	2	-
Juni 2023	0	0	-	0	-
Juli 2023	0	0	-	0	-
Agustus 2023	1	1	-	1	-
September 2023	0	0	-	0	-
Oktober 2023	4	4	-	4	-
November 2023	0	0	-	0	-
Desember 2023	0	0	-	0	-
Total	14	14	-	14	-



LAMPIRAN 18

DATA PERKARA TIPIKOR
YANG DIPUTUS TAHUN 2023

**DATA PERKARA TIPIKOR BANDING UNTUK LAPORAN KINERJA (SAKIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

I. DATA PERKARA TIPIKOR YANG DIPUTUS PADA BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2023

No.	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tk.I	Tanggal Register Banding	Tanggal Putus Banding	Tanggal Minutasi Banding	Lama Proses Banding	Dikirim ke PN Pengaju	Diajukan Kasasi
1	23/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN	33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	08 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	27 hari	04 Jan. 2023	-
2	24/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN	31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	14 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	21 hari	04 Jan. 2023	-
3	25/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN	32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	14 Des. 2022	04 Jan. 2023	04 Jan. 2023	21 hari	05 Jan. 2023	-
4	26/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN	29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	14 Des. 2022	05 Jan. 2023	05 Jan. 2023	22 hari	05 Jan. 2023	-
5	27/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN	30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	14 Des. 2022	05 Jan. 2023	05 Jan. 2023	22 hari	05 Jan. 2023	14 Feb. 2023
6	1/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	19 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	28 hari	17 Feb. 2023	01 Mar. 2023
7	2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	19 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	28 hari	17 Feb. 2023	28 Mar. 2023
8	3/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	19 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	28 hari	17 Feb. 2023	01 Mar. 2023
9	4/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	19 Jan. 2023	08 Feb. 2023	08 Feb. 2023	20 hari	09 Feb. 2023	21 Mar. 2023
10	5/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	19 Jan. 2023	16 Feb. 2023	16 Feb. 2023	28 hari	17 Feb. 2023	01 Mar. 2023
11	6/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	19 Jan. 2023	15 Feb. 2023	15 Feb. 2023	27 hari	16 Feb. 2023	07 Mar. 2023
12	8/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	31 Jan. 2023	21 Feb. 2023	21 Feb. 2023	21 hari	22 Feb. 2023	14 Mar. 2023
13	7/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	31 Jan. 2023	08 Mar. 2023	08 Mar. 2023	36 hari	09 Mar. 2023	03 Apr. 2023
14	9/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	09 Feb. 2023	09 Mar. 2023	09 Mar. 2023	28 hari	10 Mar. 2023	pencabutan kasasi
15	10/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	09 Feb. 2023	09 Mar. 2023	09 Mar. 2023	28 hari	10 Mar. 2023	pencabutan kasasi
16	11/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	13 Feb. 2023	16 Mar. 2023	16 Mar. 2023	31 hari	17 Mar. 2023	pencabutan kasasi
17	12/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	13 Feb. 2023	09 Mar. 2023	10 Mar. 2023	25 hari	10 Mar. 2023	-
18	13/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	13 Feb. 2023	09 Mar. 2023	10 Mar. 2023	25 hari	10 Mar. 2023	-
19	14/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	15 Feb. 2023	09 Mar. 2023	09 Mar. 2023	22 hari	10 Mar. 2023	-
20	15/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	15 Feb. 2023	09 Mar. 2023	10 Mar. 2023	23 hari	10 Mar. 2023	29 Mar. 2023
21	16/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	21 Feb. 2023	16 Mar. 2023	16 Mar. 2023	23 hari	17 Mar. 2023	06 Apr. 2023
22	17/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	21 Feb. 2023	16 Mar. 2023	16 Mar. 2023	23 hari	17 Mar. 2023	31 Mar. 2023
23	18/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Feb. 2023	15 Mar. 2023	15 Mar. 2023	20 hari	16 Mar. 2023	pencabutan kasasi
24	19/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Feb. 2023	11 Apr. 2023	11 Apr. 2023	47 hari	11 Apr. 2023	05 Mei 2023
25	20/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	06 Mar. 2023	03 Apr. 2023	03 Apr. 2023	28 hari	04 Apr. 2023	10 Apr. 2023
26	21/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	06 Mar. 2023	03 Apr. 2023	03 Apr. 2023	28 hari	04 Apr. 2023	10 Apr. 2023
27	22/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	64/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	13 Jun. 2023	13 Jun. 2023	21 hari	14 Jun. 2023	03 Jul. 2023
28	23/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	13 Jun. 2023	13 Jun. 2023	21 hari	14 Jun. 2023	03 Jul. 2023
29	24/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	13 Jun. 2023	13 Jun. 2023	21 hari	14 Jun. 2023	03 Jul. 2023
30	25/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	13 Jun. 2023	13 Jun. 2023	21 hari	14 Jun. 2023	03 Jul. 2023
31	26/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	13 Jun. 2023	13 Jun. 2023	21 hari	14 Jun. 2023	03 Jul. 2023
32	27/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	72/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	20 Jun. 2023	20 Jun. 2023	28 hari	21 Jun. 2023	26 Jun. 2023
33	28/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg	23 Mei. 2023	20 Jun. 2023	20 Jun. 2023	28 hari	21 Jun. 2023	26 Jun. 2023
34	29/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	26 Mei. 2023	22 Jun. 2023	22 Jun. 2023	27 hari	23 Jun. 2023	-
35	30/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	26 Mei. 2023	22 Jun. 2023	22 Jun. 2023	27 hari	23 Jun. 2023	03 Jul. 2023
36	31/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	26 Mei. 2023	22 Jun. 2023	22 Jun. 2023	27 hari	22 Jun. 2023	03 Jul. 2023
37	32/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	20 Jul. 2023	10 Agu. 2023	10 Agu. 2023	21 hari	10 Agu. 2023	-
38	33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	25 Jul. 2023	10 Agu. 2023	10 Agu. 2023	16 hari	10 Agu. 2023	-
39	34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	08 Agu. 2023	19 Sep. 2023	19 Sep. 2023	42 hari	19 Sep. 2023	04 Okt. 2023
40	35/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	21 Agu. 2023	18 Sep. 2023	18 Sep. 2023	28 hari	19 Sep. 2023	04 Okt. 2023
41	36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	22 Agu. 2023	20 Sep. 2023	20 Sep. 2023	29 hari	20 Sep. 2023	04 Okt. 2023
42	37/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	22 Agu. 2023	20 Sep. 2023	20 Sep. 2023	29 hari	20 Sep. 2023	04 Okt. 2023
43	38/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	24 Agu. 2023	18 Sep. 2023	18 Sep. 2023	25 hari	19 Sep. 2023	04 Okt. 2023
44	39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg	29 Agu. 2023	19 Sep. 2023	19 Sep. 2023	21 hari	19 Sep. 2023	-
45	40/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	17/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG	17 Okt. 2023	14 Nov. 2023	14 Nov. 2023	28 hari	15 Nov. 2023	05 Des. 2023
46	41/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	18/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG	31 Okt. 2023	28 Nov. 2023	28 Nov. 2023	28 hari	28 Nov. 2023	05 Des. 2023
47	42/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	20/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG	16 Nov. 2023	13 Des. 2023	13 Des. 2023	27 hari	13 Des. 2023	-
48	43/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN	21/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG	16 Nov. 2023	13 Des. 2023	13 Des. 2023	27 hari	13 Des. 2023	-

II. DATA PERKARA TIPIKOR YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Bulan	Jumlah perkara pidana tipikor yang diputus	Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan (s.d. selesai minutasi)			Jumlah perkara tipikor diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara tipikor diselesaikan tidak tepat waktu
		0-30 hari	31-60 hari	≥ 61 hari		
Januari 2023	5	5	0	-	5	-
Februari 2023	7	7	0	-	7	-
Maret 2023	11	9	2	-	11	-
April 2023	3	2	1	-	3	-
Mei 2023	0	0	0	-	0	-
Juni 2023	10	10	0	-	10	-
Juli 2023	0	0	0	-	0	-
Agustus 2023	2	2	0	-	2	-
September 2023	6	5	1	-	6	-
Oktober 2023	0	0	0	-	0	-
November 2023	2	2	0	-	0	-
Desember 2023	2	2	0	-	0	-
Total	48	44	4	-	48	-

III. DATA PERKARA TIPIKOR YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Periode	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Jumlah perkara tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Januari 2023	5	1	4
Februari 2023	7	7	0
Maret 2023	11	4	7
April 2023	3	3	0
Mei 2023	0	0	0
Juni 2023	10	9	1
Juli 2023	0	0	0
Agustus 2023	2	0	2
September 2023	6	5	1
Oktober 2023	0	0	0
November 2023	2	0	2
Desember 2023	2	2	0
Total	48	31	17

IV. DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU PADA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

Bulan	Jumlah putusan perkara tipikor	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (sejak tanggal putus banding)		Jumlah putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah putusan yang dikirim tidak tepat waktu
		0-14 hari	> 14 hari		
Januari 2023	5	5	-	5	-
Februari 2023	7	7	-	7	-
Maret 2023	11	11	-	11	-
April 2023	3	3	-	3	-
Mei 2023	0	0	-	0	-
Juni 2023	10	10	-	10	-
Juli 2023	0	0	-	0	-
Agustus 2023	2	2	-	2	-
September 2023	6	6	-	6	-
Oktober 2023	0	0	-	0	-
November 2023	2	2	-	2	-
Desember 2023	2	2	-	2	-
Total	48	48	-	48	-



LAMPIRAN 19

**ANALISIS EFISIENSI
SASARAN 1 DAN SASARAN 2**

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu						
• Perdata	100%	100%	100%	333 perkara	333 perkara	100%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu						
• Pidana	100%	100%	100%	168 perkara	168 perkara	100%
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu						
• Pidana Khusus	100%	100%	100%	62 perkara	62 perkara	100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi						
• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	49%	96%	287 perkara	277 perkara	96%
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan						
• Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90,5	93,92	104%	90,5	93,92	104%
Rata-rata capaian kinerja fisik	88,30%	88,58	100%	850 perkara	840 perkara	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 01	24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%	24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 03	216.444.000	213.765.731	98,76%	216.444.000	213.765.731	98,76%

Kesimpulan :

1. **Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif sebesar 100%**
2. **Realisasi Anggaran Baik Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar 97,99% dan Dipa 03 sebesar 98,75%**
3. **Karena capaian kinerja fisik (100%) > realisasi anggaran 97,99% dan 98,75%, maka Sasaran Stragetis 1 sudah dicapai secara EFISIEN**

Serang, 03 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. Andirani Nurdin, S.H.,M.H.

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2023**

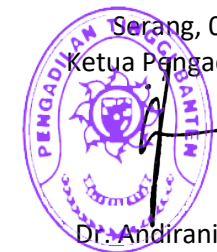
SASARAN STRATEGIS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu						
• Perdata	100%	100%	100%	333 perkara	333 perkara	100%
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu						
• Pidana	100%	100%	100%	168 perkara	168 perkara	100%
Persentase Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu						
• Pidana Khusus	100%	100%	100%	62 perkara	62 perkara	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik	100%	100%	100%	563 perkara	563 perkara	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 01	24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%	24.419.570.000	23.928.238.307	97,99%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Dipa 03	216.444.000	213.765.731	98,76%	216.444.000	213.765.731	98,76%

Kesimpulan :

1. **Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 efektif sebesar 100%**
2. **Realisasi Anggaran Baik Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar 97,99% dan Dipa 03 sebesar 98,75%**
3. **Karena capaian kinerja fisik (100%) > realisasi anggaran 97,99% dan 98,75%, maka Sasaran Stragetis 2 sudah dicapai secara EFISIEN**



Serang, 03 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Banten

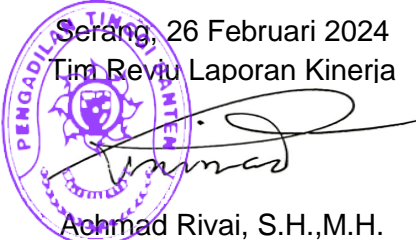
Dr. Andirani Nurdin, S.H.,M.H.



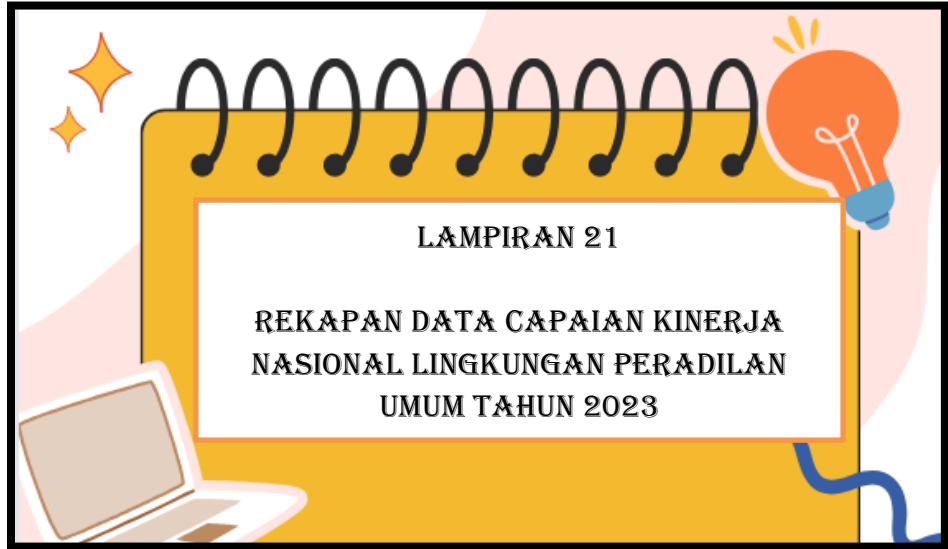
CHEKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah Menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Pengadilan Tinggi Banten disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pegumpulan data/informasi disetiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj Pengadilan Tinggi Banten bukan merupakan gabungan partisipasi dari satker dibawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Serang, 26 Februari 2024
 Tim Reviu Laporan Kinerja



Achmad Rivai, S.H.,M.H.



LAMPIRAN 21

**REKAPAN DATA CAPAIAN KINERJA
NASIONAL LINGKUNGAN PERADILAN
UMUM TAHUN 2023**

REKAPAN DATA CAPAIAN KINERJA NASIONAL LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2023

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel													Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										KATEGORI PENGADILAN			
		Indikator Kinerja																										
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Capaian Per Sasaran	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target		Realisasi		Capaian
01	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	98	100	102,04%	98	100	102,04%	98	100	102,04%	40	51,42	128,55%	90	94,38	104,87%	107,91%	99	100	101,01%	99	100	101,01%	99	100	101,01%	101,01%	301-1000 Perkara
02	Pengadilan Tinggi Mataram	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	38	38,51	101,34%	94	94,39	100,41%	100,35%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
03	Pengadilan Tinggi Denpasar	95	99,8	105,05%	95	99,8	105,05%	95	99,8	105,05%	40	42,00	105,00%	90	98,67	109,63%	105,96%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
04	Pengadilan Tinggi Riau	96	98,97	103,09%	96	100	104,17%	100	100	100,00%	40	42,50	106,25%	96	98,15	102,24%	103,15%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
05	Pengadilan Tinggi Jambi	96	100	104,17%	98	100	102,04%	96	100	104,17%	40	37,82	94,55%	93	100,00	107,53%	102,49%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
06	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	40	41,10	102,75%	90	98,56	109,51%	102,45%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
07	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	40	44,96	112,40%	95	98,02	103,18%	103,12%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
08	Pengadilan Tinggi Ambon	95	98	103,16%	95	98	103,16%	95	98	103,16%	35	37,00	105,71%	95	100,00	105,26%	104,09%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
09	Pengadilan Tinggi Banten	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	51	49,00	96,08%	90,5	93,92	103,78%	99,97%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
10	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	58,90	117,80%	90	96,19	106,88%	104,94%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
11	Pengadilan Tinggi Bengkulu	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	30	30,18	100,60%	96	96,25	100,26%	100,17%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
12	Pengadilan Tinggi Bandung	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	33,75	39,29	116,41%	90	99,00	110,00%	105,28%	96	99,31	103,45%	96	100	104,17%	96	100	104,17%	103,93%	> 1000 Perkara
13	Pengadilan Tinggi Makassar	100	94,42	94,42%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	52	55,21	106,17%	90	97,11	107,90%	101,70%	98	54,35	55,46%	98	98,02	100,02%	98	78,26	79,86%	78,45%	> 1000 Perkara
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	95	99,7	104,95%	95	99,69	104,94%	95	100	105,26%	50	58,09	116,18%	93	97,59	104,94%	107,25%	97	99,88	102,97%	97	99,12	102,19%	97	100	103,09%	102,75%	> 1000 Perkara
15	Pengadilan Tinggi Manado	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	35	90,29	257,97%	90	93,79	104,21%	135,59%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
16	Pengadilan Tinggi Semarang	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	50	51,57	103,14%	95	99,77	105,02%	104,79%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	105,26%	> 1000 Perkara
17	Pengadilan Tinggi Papua Barat	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	51,26	102,52%	92	93,63	101,77%	100,86%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
18	Pengadilan Tinggi Medan	84	93	110,71%	94	95	101,06%	95	91	95,79%	37	71,00	191,89%	98	97,84	99,84%	119,86%	98	100	102,04%	96	100	104,17%	96	100	104,17%	103,46%	> 1000 Perkara
19	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	22	22,34	101,55%	93	97,00	104,30%	101,17%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
20	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	93	100	107,53%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	60	63,05	105,08%	90	95,00	105,56%	106,64%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
21	Pengadilan Tinggi Jayapura	96	100	104,17%	96	99,25	103,39%	96	100	104,17%	35	64,81	185,17%	92	95,72	104,04%	120,19%	95	100	105,26%	96	100	104,17%	96	100	104,17%	104,53%	< 300 Perkara
22	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	95	86,27	90,81%	95	86,89	91,46%	95	90	94,74%	25	30,63	122,52%	85	88,33	103,92%	100,69%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
23	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	90	56,41	62,68%	95	96,56	101,64%	92,86%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
24	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	34	35,00	102,94%	85	96,87	113,96%	103,38%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
25	Pengadilan Tinggi Pontianak	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	60	33,92	56,53%	93	104,86	112,75%	97,02%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
26	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	98	100	102,04%	98	100	102,04%	98	100	102,04%	37	37,30	100,81%	94	97,72	103,96%	102,18%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
27	Pengadilan Tinggi Palembang	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	55	39,15	71,18%	92	99,37	108,01%	95,84%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	< 300 Perkara
28	Pengadilan Tinggi Kupang	100	95,98	95,98%	100	100	100,00%	100	92,86	92,86%	42	37,61	89,55%	90	99,31	110,34%	97,75%	90	95,98	106,64%	90	100	111,11%	90	92,86	103,18%	106,98%	301-1000 Perkara
29	Pengadilan Tinggi Jakarta	95	99,71	104,96%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	55	51,14	92,98%	90	96,25	106,94%	103,08%	75	97,61	130,15%	92	100	108,70%	95	98,46	103,64%	114,16%	> 1000 Perkara
30	Pengadilan Tinggi Kendari	90	100	111,11%	90	100	111,11%	90	100	111,11%	30	49,45	164,83%	90	103,61	115,12%	122,66%	90	100	111,11%	90	100	111,11%	90	100	111,11%	111,11%	< 300 Perkara
31	Pengadilan Tinggi Padang	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	76,18	152,36%	93	98,00	105,38%	111,55%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	301-1000 Perkara
32	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	99	100	101,01%	99	100	101,01%	98	100	102,04%	52	44,80	86,15%	90	92,63	102,92%	98,63%	98	100	102,04%	97	100	103,09%	99	100	101,01%	102,05%	< 300 Perkara
	Rata-Rata	97,19%	98,93%	101,91%	97,56%	99,33%	101,88%	97,63%	99,11%	101,59%	43,71%	47,87%	114,36%	91,86%	97,14%	105,82%	105,11%	97,84%	98,35%	100,79%	98,31%	99,91%	101,72%	98,47%	99,05%	100,65%	101,05%	

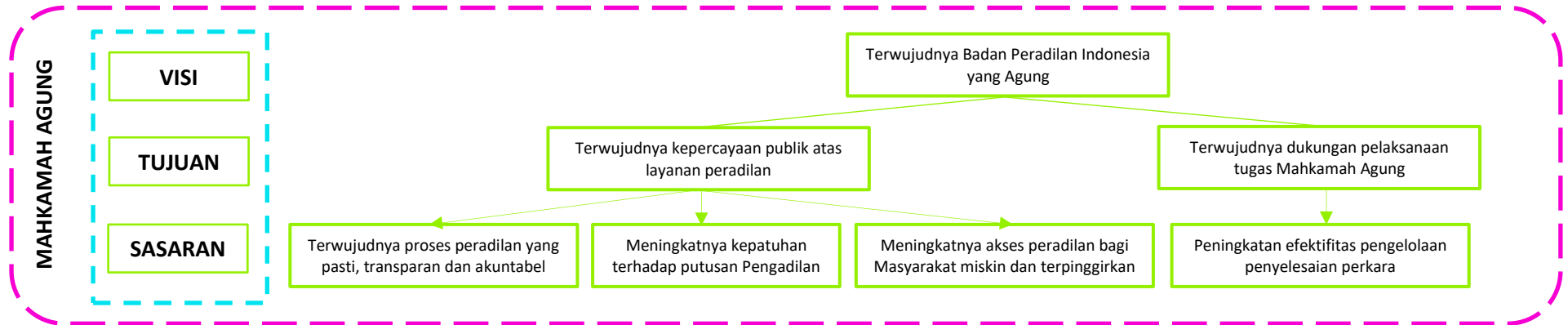
Catatan : Sumber Data yang digunakan adalah data capaian kinerja dari Pengadilan Tk Banding di Lingkungan Peradilan Umum sebanyak 32 Satker dari 34 Satker yang ada atau setara dengan 94,12%



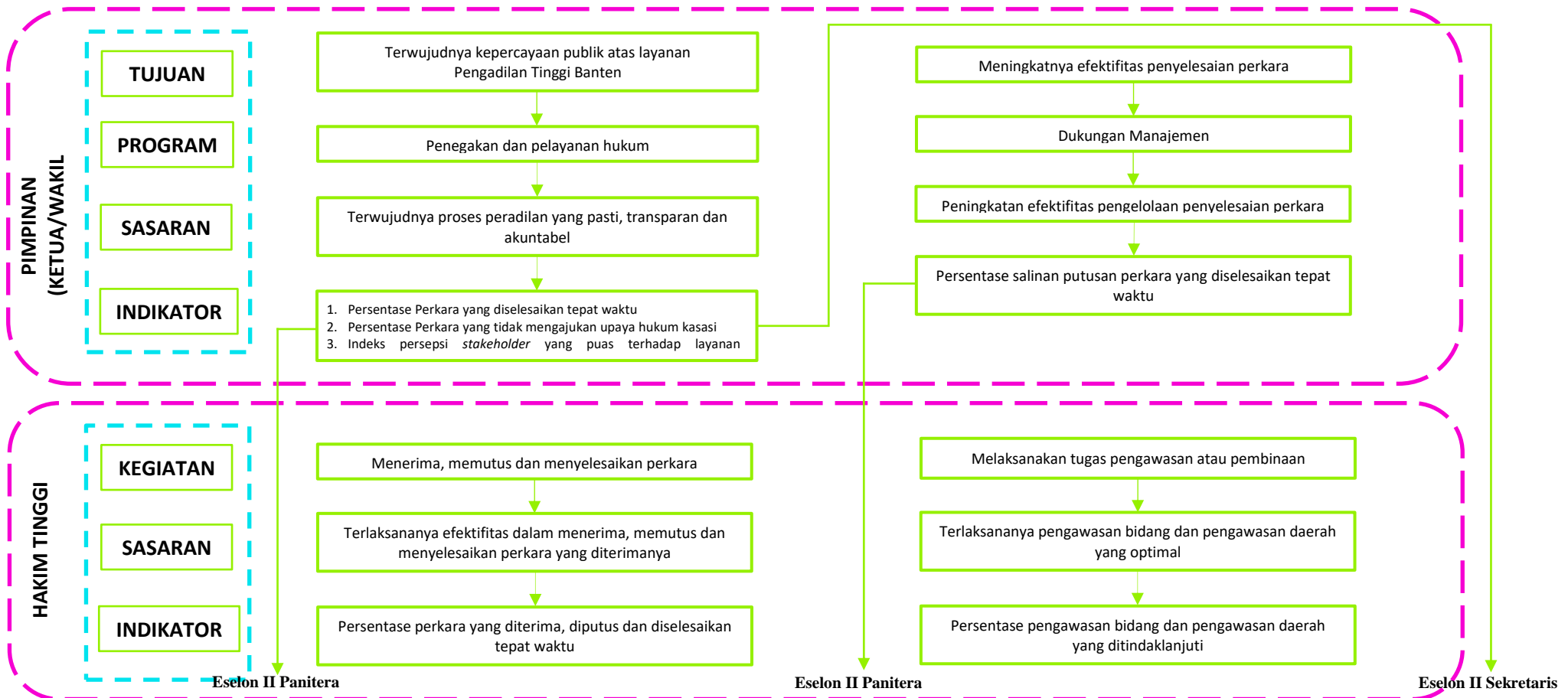
LAMPIRAN 22

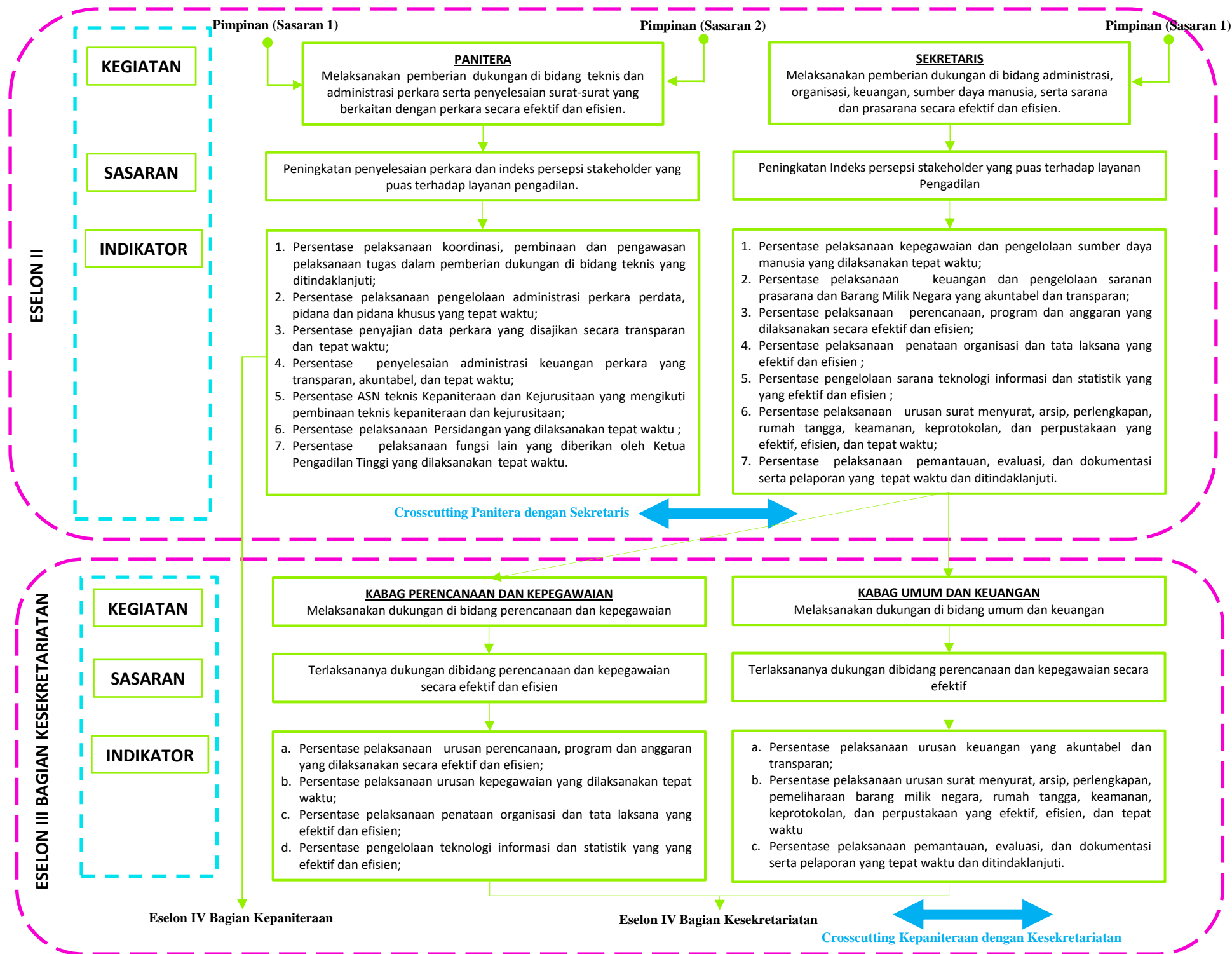
POHON KINERJA
PENGADILAN TINGGI BANTEN

POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN



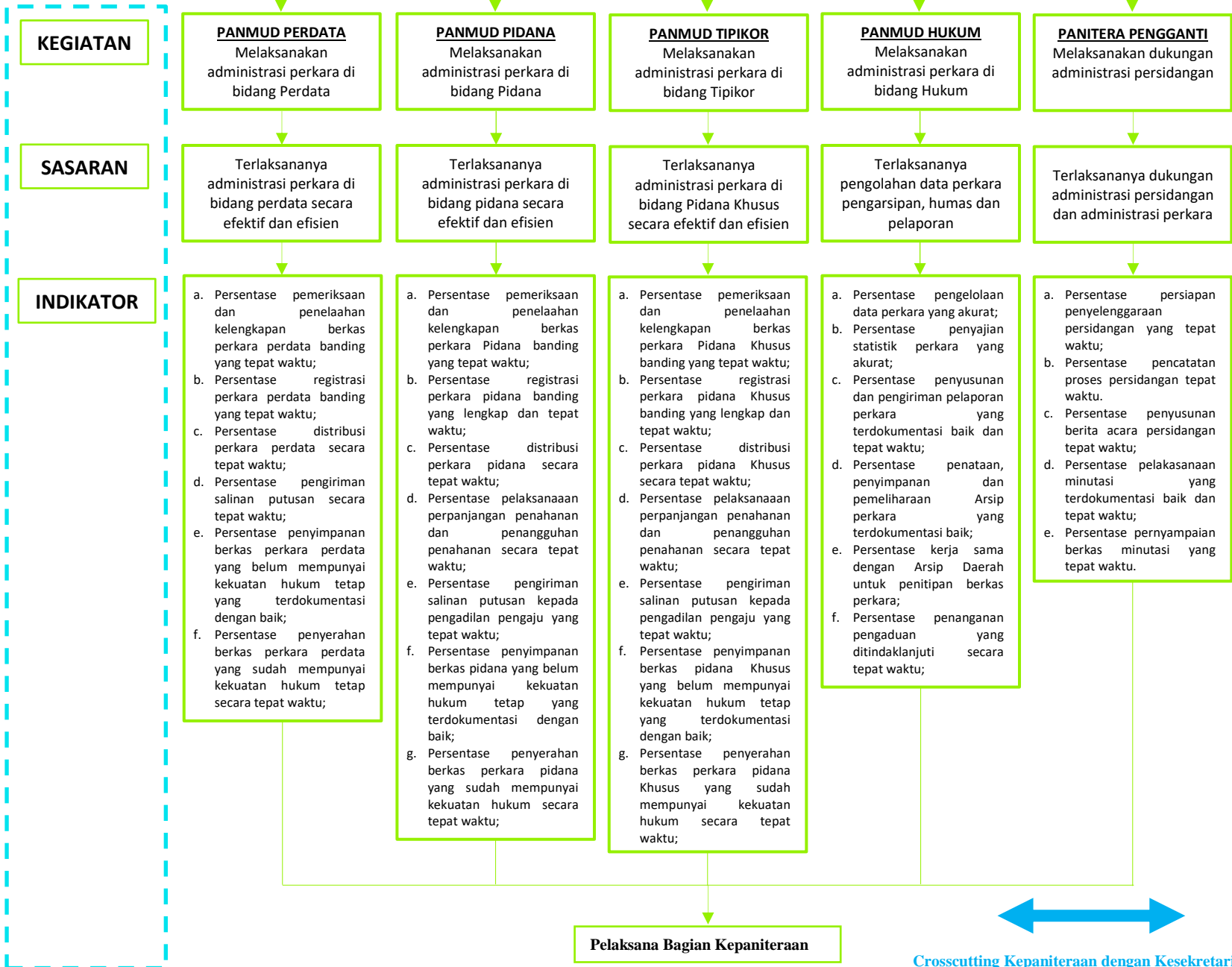
Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Banten selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN DAN PANITERA PENGANGTI

Eselon II (Panitera)

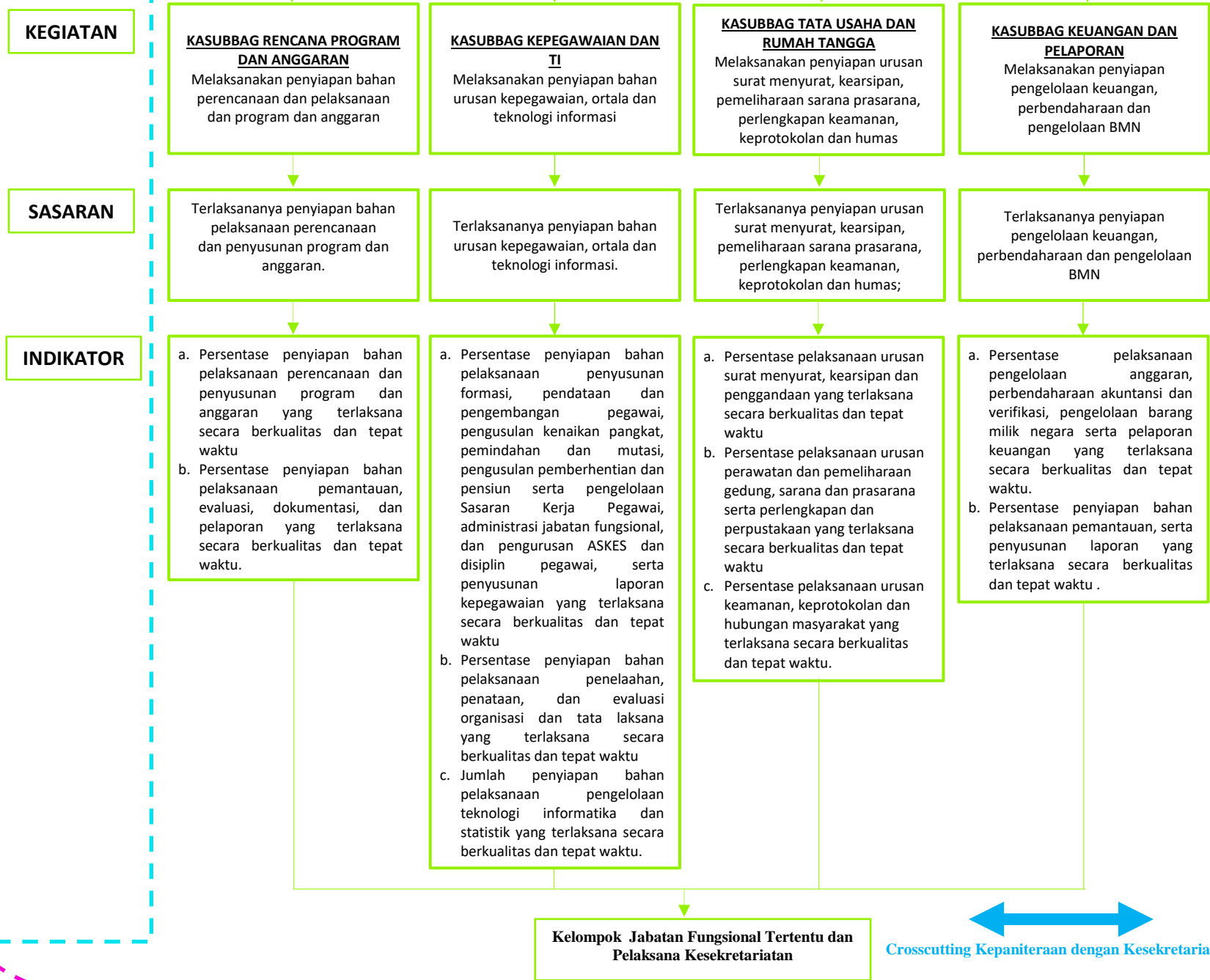


Pelaksana Bagian Kepaniteraan

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN

Eselon III (Kepala Bagian)



Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN

Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

KEGIATAN

JF PERENCANA DAN PELAKSANA SUBBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Membantu pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran

JF ANALIS SDM APARATUR, JF PRANATA KOMPUTER DAN PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI

Membantu pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi

JF ARSIPARIS, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAKSANA SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

Membantu pelaksanaan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokolkan dan humas

JF ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN, JF PRANATA KEUANGAN APBN DAN PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN

Membantu pelaksanaan penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

SASARAN

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi.

Terlaksananya penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokolkan dan humas

Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

INDIKATOR

- a. Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi SAKTI yang tepat waktu
- b. Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akuntabel dan tepat waktu
- c. Persentase penginputan revisi DIPA/POK dalam aplikasi SAKTI yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- d. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
- e. Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu.
- f. Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu.
- g. Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi SAKTI tepat waktu
- h. Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat dan tepat waktu;
- i. Persentase penginputan capaian kinerja utama pada aplikasi e_SAKIP Komdanas.
- j. Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.

- a. Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama yang akurat dan efisien
- b. Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akuntabel dan tepat waktu.
- c. Persentase verifikasi terhadap kenaikan pangkat online pada aplikasi SIKEP yang tepat waktu
- d. Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu.
- e. Persentase penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi yang tepat waktu.
- f. Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu
- g. Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu
- h. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik.
- i. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif
- j. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi
- k. Persentase pengembangan sistem informasi yang terdokumentasi
- l. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti

- a. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu.
- b. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu
- c. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu
- d. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu
- e. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
- f. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu
- g. Persentase kegiatan penyajian informasi dan pengumpulan dokumentasi.
- h. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu.
- i. Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu

- a. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu
- b. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu
- c. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG,terusan penghasilan/ gaji, uang muka gaji, uang lembur, tunjangan hakim Ad Hoc, UM, honorarium, vakasi, dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu.
- d. Persentase permintaan BP,ADK perubahan data pegawai, ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu
- e. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akurat dan tepat waktu.
- f. Persentase pelaksanaan laporan keuangan yang akuntabel.
- g. Persentase pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu.
- h. Persentase pelaksanaan analisis laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- i. Persentase pengelolaan uang persediaan yang akuntabel.
- j. Persentase pengelolaan pembayaran yang akuntabel dan tepat waktu.
- k. Persentase pemungutan atau pembayaran atas kewajiban kepada negara yang akuntabel dan tepat waktu.
- l. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)

ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

PANMUD PERDATA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

PANMUD PIDANA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

PANMUD TIPIKOR
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Tipikor

PANMUD HUKUM
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

SASARAN

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara di bidang Pidana Khusus secara efektif dan efisien

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

INDIKATOR

- a. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- b. Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- c. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- d. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- e. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum
- f. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- g. Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- h. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

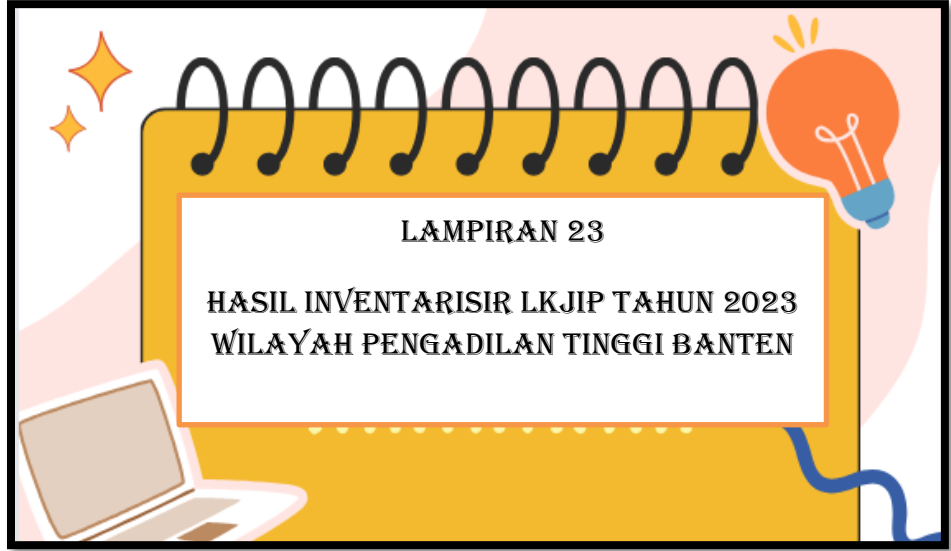
- a. Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- b. Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu
- c. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- d. Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- e. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- f. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- g. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu
- h. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- i. Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- j. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

- a. Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- b. Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu.
- c. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu.
- d. Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- e. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- f. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- g. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu dan terdokumentasi baik
- h. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- i. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

- a. Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- b. Persentase Verifikasi advokat melalui aplikasi Ecour tepat waktu
- c. Persentase pencatatan register sumpah/janji advokat terdokumentasi baik
- d. Persentase pengumpulan dokumen PNBPN terdokumentasidengan baik
- e. Persentas pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus terdokumentasi dengan baik
- f. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik
- g. Persentase penginputas Aplikasi pelaporan tepat waktu
- h. Persentase penyiapan bahan-bahan penyempahan advokat efektif, akuntabel dan tepat waktu.



Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan



LAMPIRAN 23

HASIL INVENTARISIR LKJIP TAHUN 2023
WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANTEN

